La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa
Muhammad Aris | Arditya Prayogi | Hartini Amin
Andi Tenri | Kuflia Muak Hara | Kartika Sari | Tesaannisa
La Ode Abdul Munafi | Wa Ode Rohmiati Mandati

Teori SOSIOLOGI

Editor :
Hamidin Rasulu | Waode Munaeni

Teori SOSIOLOGI

Sosiologi adalah studi tentang perilaku dan interaksi manusia dalam masyarakat. Teori sosiologi membantu kita memahami bagaimana manusia dan masyarakat berperilaku dan bertindak, serta bagaimana menyelesaikan konflik dan mengatasi masalah yang sedang terjadi. Ada tiga paradigma utama dalam sosiologi: paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Paradigma fakta sosial didasarkan pada pemikiran bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berinteraksi dan berfungsi untuk mencapai keseimbangan dan stabilitas sosial. Paradigma definisi sosial didasarkan pada pemikiran bahwa masyarakat merupakan hasil konstruksi sosial yang dilakukan oleh individu. Paradigma perilaku sosial didasarkan pada gagasan bahwa masyarakat merupakan hasil perilaku dan interaksi individu.

Beberapa tokoh penting dalam sosiologi antara lain Emile Durkheim, Karl Marx, Max Weber, dan George Herbert Mead. Durkheim dikenal sebagai bapak sosiologi dan mengembangkan teori fakta sosial. Marx mengembangkan teori konflik, yang berfokus pada pertarungan antar kelas sosial. Weber mengembangkan teori tindakan sosial, yang berfokus pada makna subjektif yang melekat pada tindakan individu. Mead mengembangkan teori interaksionisme simbolik, yang berfokus pada bagaimana individu menciptakan makna melalui simbol dan bahasa.

eureka
media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-120-179-9
9 786231 201799

TEORI SOSIOLOGI

La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa
Muhammad Aris
Arditya Prayogi
Hartini Amin
Andi Tenri
Kuflia Muak Hara
Kartika Sari
Tesaannisa
La Ode Abdul Munafi
Wa Ode Rohmiati Mandati

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

TEORI SOSIOLOGI

Penulis : La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa, Muhammad Aris, Arditya Prayogi, Hartini Amin, Andi Tenri, Kuflia Muak Hara, Kartika Sari, Tesaannisa, La Ode Abdul Munafi, Wa Ode Rohmiati Mandati

Editor : Hamidin Rasulu
Waode Munaeni

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Nurlita Novia Asri

ISBN : 978-623-120-179-9

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JANUARI 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan buku yang berjudul **"Teori Sosiologi"** dapat diselesaikan. Buku ini terdiri dari 10 bab yang mencakup mencakup Teori Otoritas Max Weber, Teori Filsafat Positif Auguste Conte, Teori Fakta-Fakta Sosial Emile Durkheim, Teori Konflik Karl Marx, Teori Struktur Fungsional Talcot Parson, Teori Interaksionisme Simbolik George Herbert Mead, Teori Agen Struktur Anthony Giddens, Teori Public Sphere Jurgen Habermas, Teori Kuasa Pengetahuan Michel Foucault, Teori Habitus dan Ranah Pierre Bourdieu, Teori Dramaturgi Erving Goffman.

Kami berharap dengan terbitnya buku ini dapat berguna untuk para pembaca yang mempelajarinya. Terimakasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu berkontribusi dalam penyusunan buku ini.

Baubau, November 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....**iii**
DAFTAR ISI.....**iv**
BAB 1 TEORI OTORITAS MAX WEBER
Oleh : La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa.....**1**
A. Pengantar.....1
B. Otoritas Legal Rasional.....7
C. Otoritas Tradisional.....13
D. Otoritas Karismatik.....16
E. Penutup.....22
DAFTAR PUSTAKA.....23
TENTANG PENULIS.....25
BAB 2 TEORI FILSAFAT POSITIV AUGUSTE CONTE
Oleh : Muhammad Aris.....**26**
A. Pengertian Filsafat Positiv.....26
B. Filsafat Positivisme Menurut Auguste Comte.....29
C. Konsep-Konsep Teori Sosiologi Auguste Comte.....33
D. Pengaruh Positivisme Terhadap Perkembangan Sosiologi.....35
E. Pengaruh Dinamika Sosial Terhadap Perkembangan Sosiologi.....36
F. Pengaruh Tahap Perkembangan Terhadap Perkembangan Sosiologi.....38
G. Pengaruh Hukum Tiga Tahap Terhadap Perkembangan Sosiologi.....39
H. Pengaruh Masyarakat Statis dan Dinamis Terhadap Perkembangan Sosiologi.....40
DAFTAR PUSTAKA.....41
TENTANG PENULIS.....43
BAB 3 TEORI KONFLIK KARL MARX
Oleh : Arditya Prayogi.....**44**
A. Pendahuluan.....44
B. Biografi Intelektual Karl Marx.....46
C. Postulat Karl Marx Tentang Konflik Sosial.....48
D. Teori Konflik Karl Marx.....51

E. Penutup 57
DAFTAR PUSTAKA 59
TENTANG PENULIS 61
BAB 4 TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL TALCOTT PARSONS
Oleh : Hartini Amin 62
A. Teori Struktural Fungsional 62
B. Konsep-Konsep Teori Struktural Fungsional Talcot Parson 65
C. Pengaruh Teori Struktural Fungsional Terhadap Perkembangan Sosiologi 68
D. Analisis Parsons Tentang Keluarga 70
DAFTAR PUSTAKA 75
TENTANG PENULIS 76
BAB 5 TEORI INTERAKSIONISME SIMBOLIK GEORGE HERBERT MEAD
Oleh : Andi Tenri 77
A. Pengantar 77
B. Sumber Filsafat 78
C. Konsep-Konsep yang Dibangun 80
D. Postulat Fundamental atas Individu dan Masyarakat. 84
E. Metode dan Peluang Aplikasi 89
F. Penutup 90
DAFTAR PUSTAKA 92
TENTANG PENULIS 93
BAB 6 TEORI AGEN STRUKTUR ANTHONY GIDDENS
Oleh : Kuflia Muak Hara 94
A. Latar Belakang Intelektual Anthony Giddens 94
B. Konsep Agen dan Struktur 97
C. Strukturasi dan Interaksi Sosial 103
D. Reflektivitas dan Perubahan Sosial 105
DAFTAR PUSTAKA 108
TENTANG PENULIS 110
BAB 7 TEORI PUBLIC SPHERE JURGEN HABERMAS
Oleh : Kartika Sari 111
A. Pendahuluan 111
B. Konsep Ruang Publik Habermas 114

C. Elemen Konstitutif 115
D. Ruang Publik dan Masyarakat Sipil 118
E. Aktor di Ruang Publik 120
DAFTAR PUSTAKA 125
TENTANG PENULIS 127
BAB 8 TEORI KUASA PENGETAHUAN MICHEL FOUCAULT
Oleh : Tesaannisa 128
A. Kuasa sebagai Mekanisme yang Menyusup dalam Setiap Aspek Kehidupan 128
B. Pengetahuan sebagai Alat Kuasa 130
C. Mekanisme Operasi Kuasa Pengetahuan 131
DAFTAR PUSTAKA 142
TENTANG PENULIS 144
BAB 9 TEORI HABITUS DAN RANAH PIERRE BOURDIEU
Oleh : La Ode Abdul Munafi 145
A. Siapakah Pierre Bourdieu 145
B. Menjembatani Dikotomi Paradigma 147
C. Habitus 152
D. Ranah 157
E. Tinjauan Akhir 160
DAFTAR PUSTAKA 162
TENTANG PENULIS 163
BAB 10 TEORI DRAMATURGI ERVING GOFFMAN
Oleh : Wa Ode Rohmiati Mandati 164
A. Teori 164
B. Deskripsi Sosok 169
C. Konteks Sosial 170
D. Jenis Realita Sosial 172
E. Lingkup Realitas Sosial 173
F. Pemikiran dan Teori yang Mempengaruhinya 174
G. Penutup 178
DAFTAR PUSTAKA 179
TENTANG PENULIS 182

BAB 1

TEORI OTORITAS MAX WEBER

Oleh : La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa

A. Pengantar

Weber (Soekanto, 2009) mengartikan otoritas[1] sebagai suatu hak yang telah ditetapkan dalam sebuah tata tertib sosial yang dimaksudkan untuk melakukan penetapan kebijaksanaan, pembuatan keputusan akan hal-hal yang dirasa vital, serta untuk mengentaskan berbagai pertentangan. Otoritas ini sendiri dapat berasal dari tiga hal yakni karisma, tradisional, dan legal rasional.

Penjelasan Weber (Soekanto, 2009) tentang otoritas dapat memberikan informasi bahwa otoritas pada dasarnya merupakan sebuah hak. Adapun hak tersebut ditetapkan melalui sebuah mekanisme sosial yang tertib, yang memiliki maksud untuk melakukan penetapan kebijaksanaan sebagai keputusan terhadap hal-hal yang penting, selain itu pula diharapkan dapat meredakan pertentangan yang mungkin saja ada pada obyek penerapan otoritas.

Lebih lanjut otoritas berkutat pada hak yang telah diatur melalui mekanisme tertentu. Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh (Setiadi & Kolip, 2011) mengartikan otoritas sebagai hak moral yang memiliki kesamaan terhadap nilai dan

[1] Otoritas memiliki padanan penyebutan kata berupa wewenang. Dalam beberapa literatur seperti Soekanto (2009) tidaklah digunakan istilah otoritas melainkan wewenang. Dengan maksud demi penyeragaman penyebutan namun memiliki makna yang sama, maka dipilih memakai penyebutan otoritas walaupun dalam naskah yang ada tertulis wewenang

norma dalam masyarakat, agar nantinya dapat berguna dalam menjalankan keputusan umum dengan dampak yang besar terhadap pembuat keputusan, dan dilaksanakannya keputusan, yang pada akhirnya keputusan tersebut menjadi manifestasi keinginan pemilik hak moral tersebut.

Hak moral yang dimaksudkan oleh Setiadi dan Kolip (2011) adalah hak yang dimiliki oleh seseorang dengan acuan umum dalam skala penilaian rasa oleh anggota masyarakat kebanyakan. Selain itu pula, otoritas bersumber dari beberapa jalan, antara lain (1) tradisi seperti adat istiadat yang telah lama dilaksanakan, (2) pemberian Tuhan seperti adanya anggapan turunan atau titisan Tuhan atau Dewa, (3) kualitas pribadi seperti karisma atau kekuatan supranatural, (4) hukum perundang-undangan yang memuat sanksi hukum bagi pelanggarnya, dan (5) aspek instrumental seperti ilmu pengetahuan dan kekayaan.

Hak moral tersebut diharapkan memiliki kesamaan dengan moral yang diterima oleh masyarakat. Bila masyarakat menerima maka akan menjadi modal dalam pelaksanaan hak tersebut untuk hal pembuatan keputusan, pelaksanaan keputusan, yang sedikit banyaknya keputusan yang dibuat merupakan arah dari keinginan pemilik otoritas.

Dari dua pengertian tentang otoritas di atas, dapat diketahui beberapa asumsi dasar tentang, antara lain :

1. Otoritas merupakan hak (moral) yang memiliki kesamaan dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat;
2. Otoritas ditetapkan melalui sebuah mekanisme yang tertib di dalam kehidupan masyarakat;
3. Otoritas dimaksudkan untuk melakukan penetapan kebijaksanaan yang memiliki dampak besar terhadap pembuat keputusan;
4. Otoritas dimaksudkan untuk melaksanakan keputusan;
5. Otoritas diharapkan dapat mengetaskan berbagai permasalahan seperti pertentangan;
6. Keputusan yang dihasilkan melalui otoritas diharapkan menjadi perwujudan keinginan pemegang otoritas.

Berdasarkan beberapa asumsi di atas maka jelaslah bahwa otoritas merupakan sebuah hak (moral) yang mana memiliki kesamaan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat, ditetapkan melalui mekanisme yang tertib di dalam kehidupan masyarakat, melakukan penetapan kebijakan yang diarahkan menimbulkan dampak besar terhadap pembuat keputusan, pelaksanaannya dapat mengentaskan berbagai permasalahan pertentangan, menjadi perwujudan dari keinginan pemegang otoritas.

Sehubungan dengan topik penelitian ini maka digunakan eksemplar ikutan dari teori otoritas Weber (Weber, 1947) (Weber, 1968) (Weber, 2006) berupa legal rasional, tradisional, dan karismatik yang juga menjadi landasarn kepemimpinan. Hal ini dimaksudkan untuk membantu menjelaskan kepemimpinan sesuai dengan bentuk otoritas yang melekat pada kepemimpinan sebagaimana yang digambarkan dalam proposal ini, yakni pada kepala desa dan pada ketua lembaga adat. Weber membuat tiga tipe dasar atas legitimasi kekuasaan, yang mana klaim legitimasi tersebut didasarkan pada dasar rasional, dasar tradisional, dan dasar karismatik. Legitimasi ini menjadi pengakuan akan otoritas yang dijalankan oleh penguasa (pemilik kekuasaan). Otoritas secara komprehensif disampaikan oleh Weber dengan dasar yang bersumber dari tiga tipe legitimasi di atas Weber (1947, 1968, 2006), Kalberg (2003), Setiadi & Kolip (2011), Ritzer (2012), Johnson (1988), Wirawan (2013), Maliki (2012), Ritzer & Smart (2011b), Soekanto (2009), Hasansulama, Mahmudin, & Sugarda (1983), Ritzer & Goodman (2011a), Basrowi (2005), Jones (2010), Sztompka (2010). Adapun tiga tipe otoritas sebagaimana yang dikemukakan oleh Weber dapat diringkas pada Tabel 1 berikut di bawah ini.

Tabel 1. 1. Tiga Tipe Otoritas Max Weber

Weber (1947; 1968; 2006)	Rational Legal Legal Rasional	Traditional Tradisional	Charismatic Karismatik
Kalberg (2003)	Rational Legal	Traditional	Charismatic
Setiadi & Kolip (2011)	Wewenang Rasional	Wewenang Tradisional	Wewenang Karismatik
Ritzer (2012)	Otoritas Legal Rasional	Otoritas Tradisional	Otoritas Karismatik
Johnson (1988)	Otoritas Legal Rasional	Otoritas Tradisional	Otoritas Karismatik
Wirawan (2013)	Legal Rasional	Otoritas Tradisional	Kekuasaan Karismatik
Maliki (2012)	Otoritas Legal Rational	Otoritas Tradisional	Otoritas Karismatik
Ritzer & Smart (2011b)	Otoritas Rasional Legal	Otoritas Tradisional	Otoritas Karismatis
Soekanto (2009)	Wewenang Rasional (Legal)	Wewenang Tradisional	Wewenang Karismatis
Hasansulama, Mahmudin, & Sugarda (1983)	Wewenang Birokrasi	Wewenang Tradisional	Wewenang Karismatis
Ritzer & Goodman (2011a)	Sistem Otoritas Legal Rasional	Sistem Otoritas Tradisional	Sistem Otoritas Karismatik
Basrowi (2005)	Kekuasaan Rasional Legal	Kekuasaan Tradisional	Kekuasaan Karismatik
Jones (2010)	Legal Rasional	Tradisional	Karismatik
Sztompka (2010)	Hukum Rasional	Tradisi	Karismatis
Soemardjan & Soemardi (1964)	Kekuasaan Legal	Kekuasaan Tradisionil	Kekuasaan Charismatis / Pulung

(Sumber : Weber (1947; 1968; 2006), Kalberg (2003), Setiadi & Kolip (2011), Ritzer (2012), Johnson (1988), Wirawan (2013), Maliki (2012), Ritzer & Smart (2011b), Soekanto (2009), Hasansulama, Mahmudin, & Sugarda (1983), Ritzer & Goodman (2011a), Basrowi (2005), Jones (2010), Sztompka (2010), Soemardjan & Soemardi (1964).

Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa otoritas legal rasional bersifat formal yang berbasis pada aturan tertulis, otoritas tradisional bersifat informal yang berbasis pada kebiasaan yang dilembagakan, dan otoritas kharismatik bersifat bersifat non formal yang berbasis pada kesetiaan atas kualitas luar biasa pada diri seseorang. Penjelasan otoritas legal rasional, otoritas tradisional, dan otoritas karismatik akan dijabarkan secara panjang pada pembahasan yang tidak terpisahkan dalam sub bab ini.

Otoritas sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap seorang pemimpin. Ketetergantungan masyarakat kepada pemimpin yang memiliki sifat karismatik sangat besar. Sementara itu pengakuan masyarakat terhadap pemimpin yang mendapatkan otoritas legal rasional paling dinamis. Sedangkan otoritas tradisional terbilang memiliki posisi yang sangat rapuh karena sangat tergantung pada nilai-nilai budaya masyarakat. Apabila nilai budaya tersebut semakin menghilang maka legitimasi terhadap pemimpin tradisional juga semakin memudar.

Maliki (2012) menggunakan kata legitimasi atau dominasi dalam menyebut otoritas bila dalam kosakata Weber sendiri. Ia menyatakan bahwa Weber memberikan tiga tipe ideal kekuasaan legitimasi, yakni legitimasi tradisional yang diterapkan oleh kepala suku, kepala keluarga, dan kaum aristokrat feodal. Selanjutnya adalah legitimasi karismatik yang dicontohkan oleh pemimpin revolusi, nabi, atau prajurit pejuang.

Terakhir adalah legitimasi legal rational yang dijalankan oleh birokrat dan menteri pada pemerintahan. Parkin dalam Maliki (2012) membuat basis pengakuan kepatuhan pada beberapa tipe dominasi. Pada tipe dominasi tradisional basis pengakuan kepatuhannya dapat berupa pernyataan "*patuhilah saya karena begitulah yang selalu dilakukan oleh semua orang selama ini*". Pada tipe karisma basis pengakuan kepatuhannya berisi pernyataan "*patuhilah saya karena saya dapat menjamin bisa mengubah kehidupan kalian*". Dan tipe terakhir berupa legal

rational yang berisi basis pengakuan kepatuhan, contohnya berupa pernyataan "*patuhilah saya karena saya adalah orang yang diangkat menjadi penguasa susuai dengan ketentuan hukum yang berlaku*".

Menurut Maliki (2012), Weber melihat kekuasaan dalam organisasi modern diperjuangkan oleh partai, dan ketika partai berhasil meraih mendapatkan legitimasi maka ia akan segera melakukan sinkronisasi pola kekuasaannya pada pemerintahan yang didapatkannya. Weber juga menempatkan legitimasi sebagai sebuah cara mempertahankan kekuasaan selain kontrol yang dipelihara pada kelompok yang dikuasai. Adapun cara pemeliharaannya adalah dengan melakukan variasi-variasi pemeliharaan seperti mengadakan pengadilan, polisi, dan bentuk-bentuk penegak kekuasaan lainnya.

Peran ketiga legitimasi berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang ada di dalam masyarakat. Legitimasi legal formal dan legitimasi karismatik berada pada dua kutub yang berbeda. Apabila legitimasi legal formal masih kuat maka legitimasi karismatik tidak terlalu dibutuhkan di dalam masyarakat. Ketika kepercayaan terhadap legitimasi legal formal melemah maka legitimasi karismatik akan sangat dibutuhkan untuk menghindari terjadinya konflik di dalam masyarakat. Legitimasi tradisional cenderung berada di tengah-tengah kutub antara legitimasi legal rasional dan legitimasi karismatik. Karena posisinya tersebut maka ia dapat menguatkan legitimasi sebuah pihak sementara saat yang bersamaan melemahkan legitimasi yang lainnya, begitu pula sebaliknya.

Kasus-kasus perpaduan otoritas banyak terjadi di berbagai tempat dengan situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Pada negara-negara kerajaan di Eropa Barat seperti Inggris, Belanda, Belgia, Spanyol, Swedia, dan sebagainya, sistem pemerintahan tidak lagi didominasi oleh kekuasaan kerajaan atas dasar otoritas tradisional. Namun pemerintahan dijalankan oleh seorang Perdana Menteri yang mendapat otoritas legal rasional dari sistem demokrasi. Raja hanya menjadi simbol pemersatu yang tetap sangat diperlukan ketika terjadi

pertentangan di dalam masyarakat. Sistem seperti ini juga dianut oleh negara-negara kerajaan di belahan bumi Asia seperti Thailand dan Jepang.

Namun kondisi yang agak berbeda yaitu bersatunya otoritas legal rasional dengan otoritas tradisional juga terjadi di berbagai tempat, seperti yang dapat kita lihat pada negara-negara di Timur Tengah. Seorang Raja atau Emir (Amir) sebagai kepala negara juga sekaligus sebagai kepala pemerintahan, contohnya Raja di Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab dan lain sebagainya.

Pada kasus di Indonesia sebagaimana yang baru terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, terjadi penggabungan antara kekuasaan yang dilandasi oleh otoritas karismatik dan legitimasi tradisional dengan kekuasaan yang dilandasi oleh otoritas legal rasional. Hal ini seperti yang terjadi pada Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana Sultan Yogya yang memiliki karisma bagi warganya juga sebagai Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada pembahasan tentang otoritas di bawah ini akan disajikan tentang otoritas legal rasional, otoritasl tradisional, dan otoritas karismatik. Otoritas ini akan digunakan dalam menjelaskan kepemimpinan kepala desa dan kepemimpinan ketua lembaga adat.

B. Otoritas Legal Rasional

Otoritas legal rasional (Weber, 2006) asalnya terbangun dari dua hal yakni kepercayaan atas adanya aturan yang legal serta orang yang padanya dipercayakan otoritas atas dasar aturan tersebut sehingga dapat memerintah. Otoritas legal rasional didapatkan dari organisasi yang formal dan biasanya melalui selembar kertas yang diakui. Contohnya surat keputusan, surat pengangkatan, surat penunjukan, dan surat-surat ketetapan lainnya. Otoritas legal rasional misalnya diperoleh dari negara, perusahaan, perkumpulan profesional, dan semacamnya. Kepercayaan yang diperoleh pada otoritas legal rasional akan hilang ketika dokumen yang mendasari

otoritas tersebut telah berakhir yang menandakan bahwa otoritas legal rasional memiliki jangka waktu tertentu. Oleh karena itu aktor yang memperoleh otoritas dapat berasal dari semua golongan asalkan memiliki surat dasar pengesahan.

Penjelasan lain tentang otoritas legal rasional disampaikan oleh Soekanto (2009), yang mengemukakan menjelaskan bahwa wewenang rasional (otoritas legal rasional) adalah berdasar pada hukum yang ada dalam masyarakat. Adapun hukum tersebut dimaknai menjadi pedoman yang dilegitimasi dan dipatuhi oleh masyarakat, hingga mendapat dukungan pengakuan oleh institusi negara. Negara mendukung wewenang rasional dalam bentuk penyediaan aparat penegak hukum, fasilitas penegakan disiplin bagi warga, bangunan hukum, serta pedoman yang mengatur tata penegakan hukum tersebut. Selain itu pula wewenang rasional yang diterapkan hendaknya mempertimbangkan aspek kesamaan dan kecocokan dengan kebudayaan yang berlaku dalam sebuah masyarakat, jika sama maka kemungkinan keberhasilannya akan semakin besar.

Sejalan dengan definisi di atas, (Setiadi & Kolip, 2011) yang sama-sama menggunakan istilah wewenang untuk otoritas, bahwa wewenang rasional atau legal sebagai sebuah sebagai sistem hukum yang diterapkan pada sebuah masyarakat. Sistem tersebut merupakan hukum formal dengan ketentuan, tata kelola, alat penegakan hukum, batasan, yang mana dengan keberadaannya menjadi sumber sumber rujukan dalam pelaksanaan wewenang rasional yang diterapkan. Hukum menjadi sangat penting dalam wewenang rasional, karena dengannya maka pemilik wewenang rasional dapat memaksa dan mengkondisikan anggota masyarakat untuk sesuai dengan kehendak pemilik wewenang rasional, selama berada dalam koridor hukum yang telah disepakati.

Otoritas legal rasional merupakan cara yang dianggap normal oleh Weber (Allen, 2004) dalam mewujudkan penguasaan pada masyarakat modern. Hal ini dapat dipahami karena salah satu wujud otoritas legal rasional berupa birokrasi

adalah terbangun melalui berbagai prinsip yang rasional[2]. Pelaksanaan otorital legal rasional menjadikan semua pihak yang terlibat dalam otoritas yang lebih dahulu ada seperti otoritas tradisional dan otoritas karismatik, untuk tunduk dan patuh. Tidak dimungkinkan adanya pengecualian sanksi kepada pemimpin pada dua otoritas tadi disebabkan oleh kelalaian yang ditimbulkannya, pemimpin dan para anggota yang ada dalam otoritas tradisional dan karismatik berada pada kedudukan yang sama bila berada di hadapan otoritas legal formal.

Orang-orang yang bekerja membantu pemimpin pada otoritas legal formal memiliki kemungkinan untuk dapat berkarir dengan baik dalam birokrasi. Dikatakan baik karena apa yang mereka selesaikan sesuai dengan kadar yang telah disepakati, seperti wilayah kerja, lama kerja, wewenang pekerjaan, hierarki konsultasi, pengawasan, pelatihan, dan berbagai hal lain yang sangat jelas[3].

Berjalannya otoritasl legal formal benar-benar memisahkan antara hal yang bersifat pribadi dengan pekerjaan, seperti kepemilikan benda-benda, urusan pembicaraan. Turut pula dikembangkan beberapa aturan yang mengatur tata hubungan antar para pekerja untuk lebih fokus pada peningkatan kinerja, sehingga tingkah yang tidak mencerminkan hal tersebut seperti protes dengan menghambat jalannya pekerjaan sangat tidak dianjurkan, bahkan mungkin mendapat sanksi.

---

[2] Weber merupakan tokoh sosiologi yang sangat mengedepankan prinsip rasionalitas. Adapun birokrasi dianggap rasional karena memuat berbagai ketentuan yang *fair* dan dapat diakses oleh siapapun sesuai dengan kriteria yang ada. Seperti penentuan syarat untuk menjadi staff, lama waktu menjalankan otoritas, pedoman tertulis, surat yang menerangkan legalnya otoritas, dan lain sebagainya.

[3] Hal demikian menghindarkan terjadinya tumpang tindih yang biasanya terjadi pada dua otoritas lainnya. Pada otoritas tradisional dan otoritas karismatik, tumpang tindih dianggap sebagai hal biasa bahkan mencerminkan *multitasking* (kemampuan menjalankan beberapa tugas atau pekerjaan dalam waktu yang bersamaan) yang biasanya dikagumi banyak orang.

Para pekerja dalam otoritas ini pula diarahkan untuk tidak memanfaatkan posisinya dalam otoritas untuk mendapatkan penghasilan, karena upah yang mereka terima telah disepakati sesuai dengan kinerja yang dapat ditunjukan. Pekerja purna bhakti pada sektor publik akan menerima penghasilan pensiun, sedangkan para sektor swasta akan menerima pesangon. Besaran penghasilan ketika pensiun akan sangat ditentukan oleh seberapa tinggi posisi yang sempat diraihnya semasa menjalankan tugas.

Adapun hal ini juga sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan kedudukannya. Berbagai instrumen yang tersedia dalam otoritas legal rasional mengharuskan pekerja yang terpilih untuk menempati posisi penting harus sesuai dengan penilaian dari pemimpin yang beberapa tingkat di atasnya. Penentuan pekerja tersebut tidak dilakukan melalui mekanisme pemilihan melainkan penunjukan. Mekanisme penunjukan diyakini mampu menghasilkan kemungkinan yang lebih besar dalam memilih pekerja dengan kesamaan-kesamaan yang dijaga oleh tradisi yang berlangsung dalam otoritas legal rasional yang sedang beroperasi.

Otoritas legal rasional berjalan dengan memanfaatkan pengetahuan. Kekurangawasan dalam menerapkan pengetahuan dapat saja memantik kritik dari pihak lain yang menuntut pelayanan yang memuaskan. Tempat berkedudukannya otoritas legal rasional (kantor) memiliki sekumpulan informasi yang dipelihara sebagai bekal yang dapat dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan otoritas, sehingga para pekerja biasanya akan memiliki pengetahuan yang bahkan lebih daripada posisi atau otoritas tertentu yang diberikan padanya.

Pemegang otoritas tidak memiliki keseganan dalam memberikan perintah kepada pekerjanya, karena dalam dunia otoritas legal rasional tidak melibatkan kepentingan pribadi dalam pekerjaan. Birokrasi sebagai bentuk otoritas legal resmi memiliki jalur informasi yang resmi, yang dapat dijadikannya sebagai pedia penyampaian pesan tanpa diketahui oleh pihak

yang tidak berkepentingan, adapun bagi siapa saja yang terbukti membocorkan informasi rahasia tersebut akan dikenakan penindakan disiplin kepadanya. Birokrasi diupayakan untuk dapat berjalan dengan baik hingga terhindar dari kritik yang dapat timbul akibat hal-hal yang tidak perlu.

Otoritas legal formal dalam perkembangannya telah menjadi sebuah mesin yang efektif. Bila digambarkan seperti piramida maka pemimpin otoritas legal formal menempati posisi puncak namun terdiri dari sedikit pihak, bila dibandingkan dengan para pekerjanya yang jauh lebih melimpah. Kemudian otoritas legal rasional memiliki ketentuan yang dapat mengganti pemimpinnya, yang mana ketika hal itu terjadi tidak mempengaruhi kinerja dari para pekerja.

Weber meyakini bahwa birokrasi merupakan sebuah cara yang paling efisien dalam menjalankan berbagai aturan otoritas legal formal. Bahkan birokrasi menjadi bentuk organisasi yang paling maju di antara organisasi-organisasi lainnya. Melihat para pekerjanya dapat berkembang, hal tersebut ditunjang oleh penekanan akan ketepatan, kecepatan, ketidakambiguan, pengetahuan tentang dokumen, keberlanjutan, kebijsaksanaan, kesatuan, jenjang karir yang ketat, penghindaran gesekan, dan pengeluaran biaya materi dan pribadi, yang mana semua ini diarahkan untuk menciptakan administrasi birokrasi.

Birokrasi sebagaimana dijelaskan oleh Wirawan (2012) sebagai organisasi yang menjalankan otoritas legal rasional memiliki ciri, antara lain (1) aturan mengarahkan aktivitas, (2) keberadaan ruang khusus yang bersesuaian keahlian, (3) hierarki yang ada terorganisir, (4) pekerja yang terlibat di dalamnya memiliki kemampuan yang sesuai dengan yang dibutuhkan, (5) pekerja tidak mempunyai kepemilikan atas alat-alat yang membantu pekerjaannya, (6) para pekerja yang bekerja mendapatkan gaji sebagai sumber kekayaan yang dimiliki, dan (7) tingkah laku para pekerja dalam bekerja dicatat.

Mengkaji otoritas legal rasional tidak akan jauh dari birokrasi, karena memang birokrasi telah diimpikan Weber sebagai tipe idealnya. Senada dengan Wirawan (2012) dalam

menjelaskan ciri-ciri otoritas legal rasional (birokrasi) Weber, Blankenship (Ritzer, 2012) menjelaskan beberapa sifat-sifat utama yang berlaku pada birokrasi, antara lain:

1. Terdiri dari pengaturan yang saling berkelanjutan atas fungsi jabatan resmi yang memiliki aturan tersendiri,
2. Jabatan yang ada berada pada ruang keahlian yang terbatas, selain itu pula memuat kewajiban khusus dalam melaksanakan aneka fungsi otoritas, serta memiliki perangkat yagn dapat memaksa untuk dilaksanakannya pekerjaan yang dibebankan,
3. Memiliki hierarki jabatan,
4. Setiap yang menempati jabatan diharuskan mendapatkan orientasi kualifikasi yang dipersyaratkan,
5. Staf diperlengkapi dengan peralatan yang dapat menunjang posisi yang ditempatinya,
6. Pemegang jabatan tidak diperkenankan untuk memanfaatkan keuntungan dari posisinya melainkan semata-mata hanya untuk organisasinya, dan
7. Berbagai tindakan, aturan admistrasi, dan keputusan sebaiknya memiliki salinan secara tertulis.

Weber (Allen, 2004) hanya sedikit mencurahkan perhatiannya dalam mengungkap sepak terjang kelompok sayap kanan[4] sehubungan dengan penerapan otoritas legal formal. Otoritas legal formal berupa birokrasi tidak hanya berada pada area kekuasaan negara namun ia juga dapat diterapkan pada organisasi swasta. Hal ini disebabkan karena aturan yang terdapat dalam birokrasi dianggap sangat efisien.

[4] Kelompok sayap kanan merupakan istilah antonim dari kelompok sayap kiri. Pelaksanaan otoritas legal formal lumrah memiliki kedua kelompok tersebut sebagai manifestasi dari keberagaman ideologi yang dianut oleh kelompok-kelompok politik yang ingin mendominasi puncak organisasi legal formal pada sebuah negara. Sayap kanan dialamatkan pada kelompok yang cenderung kepada agama tertentu, sedangkan sayap kiri ditujukan pada kelompok yang umumnya mengagumi cara pandang Karl Marx. Terdapat kelompok lain yang mengklaim diri seagai penengah yakni kelompok tengah. Kelompok ini terdiri dari pihak yang tidak terakomodasi dari sayap kanan maupun sayap kiri.

Sastroatmodjo (1995) mengemukakan bahwa birokrasi administratif Weber memiliki empat ciri, antara lain (1) struktur hierarkhis, (2) kontiunitas, (3) impersonalitas, dan (4) keahlian. Struktur hierarkhis menekankan staf yang ditempatkan pada struktur yang sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Kontiunitas diartikan sebagai terjaganya keberlanjutan karir beserta kompensasi keahlian yang rutin dibayarkan. Impersonalitas dimaknai sebagai pelaksanaan tugas tanpa menyandarkan selain kepada aturan baku yang tertulis sebagaimana telah ditetapkan oleh organisasi. Terakhir yakni keahlian, dijelaskan bahwa pejabat yang dipilih atas dasar keahliannya, diberikan pelatihan untuk menjalankan fungsinya dalam mengawasi atau turut terlibat langsung pengaturan pengetahuan yang berada dalam dokumen. Keempat ciri tersebut lalu kemudian dimaknai sebagai birokrasi ala Weber.

C. Otoritas Tradisional

Otoritas tradisional (Allen, 2004) merupakan otoritas yang didasarkan pada penghormatan kepada aturan yang suci, adat yang kuno, serta melibatkan loyalitas kepada guru secara pribadi. Ketaatan tidak diberikan kepada sebuah organisasi tetapi juga kepada orang tertentu yang secara tradisi ditempatkan sebagai tuan atau pemilik kekuasaan kerajaan. Tuan kepada pengikutnya memiliki otoritas yang luas, tetapi keluasan otoritas yang dimilikinya hanya dibatasi oleh tradisi-tradisi yang berlaku padanya.

Hampir sama dengan orotiras karismatik, staf dalam otoritas tradisional yang bertugas membantu tidak memiliki batasan-batasan yang jelas sebagaimana yang terdapat dalam otoritas legal rasional. Semuanya berorientasi kepada keinginan pemilik otoritas tradisional. Selain itu pula dalam hal rekruitmen staf berlangsung secara tidak terorganisir melainkan dari rekomendasi staf yang ada dalam otoritas tradisional atau sebagaimana yang diingikan oleh pemegang otoritas tradisional. Dalam otoritas tradisional terdapat pembantu yang dalam kehidupan manusia dianggap hina, tidak mendapat gaji yang

sesuai sebagaimana yang terdapat dalam organisasi otoritas legal rasional. Selain itu pula budak dapat saja diangkat derajat sosialnya menjadi lebih tinggi manakalah pemilik otoritas tradisional menginginkannya. Pemegang otoritas tradisional memiliki kewenangan dalam melakukan hal tersebut, dan masyarakat mengikutinya.

Dalam skala tertentu dapat timbul perlawanan dari para pengikut otoritas tradisional kepada pemegang otoritas tradisional. Hal ini biasanya disebabkan oleh lampauan yang melewati batas pada tindakan-tindakan yang diambil oleh pemilik otoritas tradisional. Perlawanan tersebut mulai dari bentuk pernyataan ketidak setujuan hingga berupa perang revolusi tradisional.

Untuk bentuknya yang sederhana, otoritas tradisional terdapat dalam setiap rumah tangga manusia. Ayah secara tradisional menjadi pemilik otoritas tradisional, posisi ayah tidak tergantikan siapapun walaupun dirinya sakit dan lemah. Ibu dan anaknya yang beranjak dewasa akan tetap memperlakukan ayah sebagai pemimpin rumah tangga dengan segala tradisi yang dijalankannya.

Format otoritas tradisional yang paling populer berlangsung di bawah feodalisme. Hal ini berlangsung antara para pemilik tanah dengan orang-orang yang menggarap tanah miliknya. Berbagai aturan dibuat dalam lingkup feodalisme untuk memupuk harta yang sejalan dengan meningkatnya kehormatan dan besarnya otoritas tradisional yang dimilikinya. Dalam sejarahnya, feodalisme menjadi salah satu bagian dari sejarah lahirnya kapitalisme, di mana terdapat masa di mana kapitalisme masih dalam bentuknya yang sederhana berupa hubungan kerja antara pemilik tanah sebagai pemegang otoritas tradisional dengan para pekerja atau budak yang bekerja demi memenuhi tuntutan tuan tanah.

Weber sendiri melihat otoritas tradisional (Allen, 2004) pada masa lampau sebagai penghalang adanya pasar. Pasar merupakan ruang di mana terjadi pertemuan antara penjaul dan pembeli yang saling mempertukarkan barang dan jasa dengan

nilai yang disepakati setimpal. Namun dengan kondisi feodalisme yang dijalankan oleh pemiliki otoritas tradisional maka hasil-hasil kerja yang telah didapatkan oleh para penggarap lahan terakumulasi dengan sangat besarnya dan terkumpul pada pemilik otoritas tradisional semata.

Penjelasan Allen (2004) tentang Weber atas otoritas tradisional juga ditambahkan oleh Basrowi (2005). Dalam pandangannya, otoritas Weber lebih dimaknai sebagai bentuk kekuasaan, sedangkan tradisional tidak berubah walaupun ia merupakan bagian daripada penggambaran Weber atas otoritas. Otoritas tradisional sendiri diartikannya sebagai sebuah tatanan sosial yang berdasarkan pada adat istiadat masa lampau. Otoritas tradisional membutuhkan kesetiaan pribadi pada pengikutnya untuk pemilik otoritas tradisional, dan memberikan perintah serta persetujuan terhadap hal-hal yang dikerjakan dan dipersembahkan oleh para pengikutnya.

Sztompka (2010) menempatkan tradisional sebagai sebuah kebijakan yang diberikan secara turun temurun. Selain itu pula tradisional memberikan legitimasi atas pandangan kehidupan, keyakinan, pranata, dan aturan yang telah lebih dulu ada. Tradisional juga mempersiapkan simbol identitas secara bersama-sama yang memberi keyakinan, memperkokoh loyalitas terhadap bangsa, kelompok, komunitas. Terakhir, tradisional merupakan wadah pelarian dan tempat berkeluh kesah atas kehidupan modern.

Syarbaini, Rahman, & Djihado (2004) menjelaskan otoritas dengan sebutan wewenang. Menurutnya wewenang tradisional merupakan wewenang yang berasal dari adat kebiasaan masyarakat seperti kerajaan. Wewenang tersebut terlembaga serta dipercaya dapat membawa kepada kemanfaatan berupa rasa tenteram dan nyaman dalam kehidupan para pengikutnya. Adapun contoh kerajaan yang digambarkan oleh Syarbaini, Rahman, & Djihado (2004) antara lain terdiri dari seorang raja, lalu diikuti oleh bangsawan, orang yang bekerja pada pemerintahan, tukang-tukang dan pelayan-pelayan, petani serta buruh, dan terakhir para budak-budak. Pada posisi yang

pertama disebutkan memiliki jumlah yang sangat sedikit, semakin ke arah akhir maka jumlahnya semakin banyak.

Maliki (2012) menjelaskan otoritas tradisional Weber sebagai keyakinan atas kegiatan pengkultusan adat istiadat yang telah berlangsung sejak lama. Otoritas tradisional berlaku pada kepala suku, kepala keluarga, dan kalangan aristokral yang feodal. Adapun otoritas tradisional dapat menjadi alat ukut dalam menyaksikan realitas yang ada dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan kekuasaan.

Setiadi & Kolip (2011) menyatakan otoritas dalam kosakata wewenang Baginya wewenang tradisional dimiliki oleh individu maupun kelompok yang dalam waktu lama berada di dalam masyarakat dan memiliki kekuasaan. Kekuasaan yang dimilikinya diterima dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat di mana wewenang tradisional ini berada, selain itu pula masyarakat akan mempercayai dan memberikan pengakuan atasnya. Wewenang tradisional dapat saja berkurang bahkan hilang manakala pemegang wewenang tradisional tidak lagi menyeuaikan diri dengan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

D. Otoritas Karismatik

Otoritas karismatik dibangun pada pondasi kesetiaan yang luar biasa oleh pengikut kepada orang yang dianggap suci, memiliki sifat kepahlawanan atau sifat teladan dari seseorang, memiliki tatanan nilai normatif berdasarkan wahyu. Otoritas karismatik hanya berlaku bagi orang-orang terpilih di dalam masyarakat, tentunya dengan segenap kemampuannya yang istimewa dan sangat berbeda dengan kebanyakan orang yang ada.

Sztompka (2010) menyatakan bahwa kriteria yang paling kuno dalam menentukan prestasi pada bidang agama, politik, dan peperangan adalah karisma pribadi. Karisma dinyatakannya sebagai kualitas orang atas tindakan, peran, lembaga, simbol, serta benda materi yang dipercaya memiliki kekuatan yang paling puncak, vital, serta mendasar. Karisma

oleh Sztompka (2010) dapat dirasakan oleh yang membawanya secara subjektif juga dapat dibayangkan oleh yang mengakuinya.

Weber (Sztompka, 2010) menyatakan bahwa karisma dibutuhkan pada perubahan yang revolusioner, sedangkan kekuasaan tradisional dan kekuasaan hukum rasional lebih dipakai pada tindakan yang rutin atau tindakan kompromi saat kehidupan telah berjalan mapan.

Lebih jauh Sztompka (2010) menjelaskan bahwa legitimasi karismatis secara signifikan paling besar sangat terasa saat terjadinya krisis sosial, saat idologi diganti, norma hukum yang ada dihilangkan, pemerintahan tidak diakui, tradisi ditinggalkan. Karismatis menjadi sebuah wewenang di luar lingkaran diruntuhkan yang biasanya akan dicari dan diberi kepercayaan untuk menjalankan kekuasaan yang tersedia, saat itu pula penerimaan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap karismatis akan meningkat. Dalam kondisi demikian karismatis diharapkan dapat menyediakan rasa aman, alternatif solusi kepemimpinan yang masih dipandang baik, serta menjadi tumpuan tanggungjawab masyarakat dalam menciptakan situasi yang kondusif.

Weber (1968) menganggap bahwa otoritas karismatik merupakan sesuatu yang penting dalam lingkup ranah sosial. Karena keberadaannya yang sangat mempengaruhi otoritas legal maupun otoritas tradisional, yang mana dapat mempengaruhi para pengikut dari dua otoritas lainnya untuk merubah orientasi keikutsertaannya pada otoritas yang telah diikutinya. Menurut Weber, kemunculan otoritas karismatik sangat berpotensi merubah pemikiran dan tindakan orang dengan dramatis.

Weber (Wirawan, 2012) membuat perbedaan antara otoritas dengan kekuasaan, yang mana kekuasaan memiliki orientasi pada kekuatan sementara otoritas merupakan kekuasaan yang mendapat legitimasi dengan memperoleh pengakuan secara hukum. Semakin besar sisi karismatik seorang

pemimpin utamanya kelompok bawah maka semakin besar pula proyeksi kekuatan yang dapat dimobilisasi pada suatu sistem.

Johnson (1988) membedakan antara otoritas dengan kekuasaan. Otoritas diartikannya sebagai probabilitas saat seseorang ditaati atas dasar suatu kepercayaan akan legitimasi hak yang untuk memberi pengaruh, sedangkan kekuasaan dimaksudkannya sebagai kemampuan dalam mengatasi resistensi dari orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang secara khusus mempengaruhi perilaku orang-orang.

Soekanto (2009) menyatakan bahwa kekuasaan yang tanpa dibarengi dengan wewenang adalah kekuatan yang absah, olehnya kekuasaan perlu memperoleh pengakuan dan pengesahan dari masyarakat yang dipimpin agar menjadi wewenang. Karisma dapat saja hilang karena masyarakatnya telah berubah dan memiliki pemahaman yang berbeda. Perubahan itu tidak jarang sulit terkejar oleh pihak yang memiliki kewenangan karismatis yang pada akhirnya ditinggalkan oleh kemajuan dan perkembangan masyarakat. Ketiga wewenang yang disampaikan oleh Weber (Soekanto, 2009) dapat dengan mudah ditemukan keberadaannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat namun demikian di antaranya ada yang terlihat mendominasi.

Soekanto (2009) mengilustrasikan bagaimana perubahan wewenang tradisional tumbuh subur pada masyarakat yang kehidupannya tenang dan stabil, sementara pada masyarakat yang mengalami perubahan secara progresif, mendalam, lagi luas adalah ladang yang tepat bagi kemunculan wewenang karismatis. Pada tahap selanjutnya manakala masyarakat telah menjadi sangat rasional maka wewenang yang rasional tampil menggeser wewenang karismatis.

Setiadi & Kolip (2011) menyatakan bahwa wewenang karismatik didasarkan pada daya tarik, yakni kemampuan spesial yang ada dalam diri seseorang sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Karisma yang ada pada diri seseorang dapat saja dianggap berkurang hingga lenyap manakala diketahui telah melakukan kesalahan.

Kajian Weber pada otoritas yang mana salah satunya di dalamnya berupa karismatik adalah merupakan wujud peminatan Weber pada politik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ritzer (2012) bahwa Weber merupakan tokoh yang menginginkan masyarakat terbentuk melalui cara-cara selain revolusi. Cara tersebut dijalankan oleh sekelompok orang sebagai pemimpin politik, yang memiliki otoritas melalui proses demokrasi. Proses demokrasi yang dijalankan akan menghasilkan pemimpin yang sah berikut dominasinya, hingga tahap ini maka lahirlah otoritas.

Ritzer (2012) menyatakan bahwa otoritas karisma Weber seringkali dikaitkan dengan kemampuan istimewa dan kualitas yang luar biasa. Smith dalam Ritzer (2012) juga mengemukakan bahwa karisma dapat dimengerti tergantung dari bagaimana cara pengikutnya mendefinisikannya. Sedangkan Miyahara dalam Ritzer (2012) menyatakan bahwa bila seseorang memiliki karisma maka akan dijalani proses pemisahan dirinya dari orang biasa yang berujung pada perlakuan-perlakuan lebih oleh adanya anggapan bahwa pada diri seseorang tersebut terdapat kualitas adialamiah, adimanusiawi, dan hal-hal luar biasa yang tidak tampak pada diri orang biasa.

Weber (Ritzer, 2012) menilai adanya keanehan pada organisasi yang padanya diterapkan otoritas karismatik. Ia melihat bagaimana organisasi ini berjalan dengan dipandang dari kacamata organisasi yang menerapkan otoritas legal rasional. Weber menetapkan beberapa aspek baku untuk mengamati organisasi dengan tingkat struktur otoritas karismatik, pendukung, dan staf yang menjalankan otoritas karismatik. Organisasi dengan otoritas karismatik memiliki pemimpin yang kurang dalam syarat-syarat yang biasa dipersyaratkan bagi pemimpin otoritas legal rasional, selain itu pula para anggota staf atau pendamping pemimpin tidak mendapat pelatihan teknis.

Adapun staf pemimpin direkrut berdasarkan kadar karisma yang mirip dengan karisma yang dimiliki oleh pemimpin. Dalam hal pekerjaan tidak ada jenjang karir,

kenaikan jabatan, pengangkatan, serta pemecatan yang jelas. Pemimpin karismatik dengan bebas melakukan intervensi tanpa batas yang jelas, tidak adanya aturan formal, pembidangan staf, dan dalam pengambilan keputusan tidak adanya sosok yang dijadikan patokan selain dari pemimpin karismatik.

Selanjutnya Weber (Ritzer, 2012) menjelaskan bahwa organisasi yang ditinggal wafat oleh pemimpinnya yang karismatik akan memiliki kadar karismatik yang tidak murni lagi. Para staf yang ditinggalkan akan memiliki pekerjaan besar dan sulit yakni berupaya menjalankan organisasi dengan senantiasa menghadirkan karisma yang sama dengan yang pernah dimiliki oleh pemimpinnya yang telah berlalu. Cara yang dilakukan dapat dengan mencari sosok yang benar-benar baru tetapi berkarisma sama lalu menelitinya sesuai aturan yang berlaku dalam organisasi yang dijalankan, atau mengangkat orang yang sebelumnya telah ditunjuk untuk menjadi pengganti pemimpin serta pilihan tersebut diterima oleh komunitasnya.

Apabila otoritas karismatik terus dijalankan dengan baik maka ia dapat menjadi cikal dari otoritas tradisional yang baik pula ataupun otoritas legal rasional yang baik, hal ini kemudian menjadi siklus. Dalam perkembangan selanjutnya Weber sendiri memperkirakan bahwa otoritas karismatik pada akhirnya tidak akan lebih kuat bila dibandingkan dengan otoritas legal rasional dalam dunia modern, walaupun pada kenyataannya otoritas karismatik akan selalu menjadi ancaman yang sangat serius bagi otoritas legal rasional dan otoritas tradisional. Adapun pada otoritas legal rasional dinilai dapat terus berkembang dan juga mengancam keberadaan otoritas tradisional terutama otoritas karismatik.

Weber (2006) membahas kharismatik dalam tiga bagian, yakni karakter umum karisma, pondasi serta instabilitas otoritas karismatik, dan kerajaan karismatik. Pada bagian pertama karisma dijelaskannya sebagai sesuatu yang muncul pada masa sulit sebuah komunitas, yang mana orang yang memilikinya akan kuat secara jiwa dan raga, dipandang secara supra natural, dan tidak dimiliki oleh semua orang, yang dengannya ia mampu

memimpin keluar dari masalah yang sama-sama tengah dihadapi.

Pemegang karisma tidak akan menjalankan cara kerja mencapai misi sebagaimana cara kerja yang terdapat dalam organisasi birokratis, tetapi hanya mengenal determinasi batin dan batasan batin. Pemilik karisma seringkali menjauhkan diri dari urusan mendapatkan uang atau harga, apabila ada maka kasuistik seperti pada rampasan perang yang memang menjadi salah satu tujuan dari perjuangan yang dilakukannya. Pemilik karisma juga diharuskan untuk memilih dunia yang dijalaninya secara sepenuhnya, tidak menjalani dua dunia sekaligus yang dalam hal ini dicontohkan dengan pada anggota Ordo Jesuit yang melarang anggotanya menerima jabatan di gereja.

Pada bagian kedua dari karismatik dijelaskan bahwa karisma dapat hilang dari pemiliknya dan akan goyah dari pandangan para pengikutnya manakala ia terlihat tidak berdaya dalam upaya menyelesaikan masalah yang dihadapinya, hal ini dicontohkan ketika Yesus[5] tidak dapat melakukan apa-apa ketika dipancang di tiang salib. Instabilitas lainnya adalah apabila pemilik karisma tidak dapat mengeluarkan mukjizat bila ia seorang nabi, atau tidak bertindak heroik bila ia seorang pemimpin perang.

Adapun tindakan heroisme yang dilakukan oleh pemegang karisma bila gagal dalam tugas adalah dengan melakukan pengunduran diri atau mekanisme lainnya, hal ini sebagaimana yang pernah terjadi di China manakala seorang Kaisar gagal maka ia akan menghadapi pengusiran dan penghukuman dengan maksud pengorbanan agar Dewa merasa senang. Penyelesaian konflik khas karismatik biasanya dilakukan dengan melibatkan wahyu yang dibawa oleh nabi,

[5] Dalam ajaran agama Kristen disebutkan bahwa Yesus disalib, sedangkan dalam ajaran agama Islam disebutkan bahwa Yesus yang dianggap sebagai seorang nabi tidaklah disalib melainkan diselamatkan dari upaya percobaan penangkapan yang dapat membawanya ke tiang salib. Adapun sosok yang pada akhirnya ditangkap dan disalib adalah murid Yesus yang berkhianat kepada Yesus sehingga diserupakan kepada Yesus.

ramalan, dan pengadilan yang dilakukan oleh orang bijak dengan syarat karismatik.

Bagian terakhir dari penjelasan Weber (2006) tentang karismatik adalah kerajaan karismatik. Menurutnya sebuah kerajaan awalnya terbentuk dari heroisma yang berhasil ditunjukkan dalam peperangan hingga akhirnya membentuk sosok karisma. Sebelum sebuah kerajaan didirikan biasanya sosok pemilik karisma akan menjalankan dua sosok yakni pada sisi patriarkal dan pada sisi karismanya.

Pada sisi patriarkal, ia harus menjamin keluarga, kerabat, atau pihak lain yang bertalian dengannya, sedangkan dari sisi karismatik ia harus turut berpartisipasi dalam perang atau upaya-upaya lainnya yang dimaksudkan untuk menuntaskan permasalahan bersama. Pemilik karisma melalui perang akan selalu berdampingan dengan pemilik karisma damai, adapun pemilik karisma damai merupakan orang yang mendapatkan karisma melalui jalan selain perang.

E. Penutup

Berdasarkan pembahasan yang sudah disajikan maka dapat diketahui bahwa Mex Weber memiliki pandangan yang komprehensif tentang otoritas yang terdiri atas otoritas legal formal, otorital tradisional, dan otoritas karismatik. Dari ketiga bentuk otoritas tersebut telah mendapat ulasan dari berbagai kalangan dengan menggunakan terminologi yang sama maupun yang termodifikasi, di mana tetap berpedoman pada istilah yang dikemukakan oleh Weber. Kelebihan tulisan ini adalah menjelaskan apa yang Weber kemukakan tentang otoritas secara maksimal dengan menggali literatur asli yang menjadi curahan pikirannya, sedangkan kekurangan dari karya ini adalah belum mencantumkan deskripsi sosok, konteks sosial, konteks intelektual, dampak, penilaian, serta daftar karya-karya yang pernah dihasilkannya.

DAFTAR PUSTAKA

Allen, K. (2004). *Max Weber A Critical Introduction.* London (UK): Pluto Press.

Basrowi. (2005). *Pengantar Sosiologi.* Bogor (ID): Ghalia Indonesia.

Hasansulama, M., Mahmudin, E., & Sugarda, T. (1983). *Sosiologi Pedesaan.* Jakarta (ID): Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.

Johnson, D. (1988). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern Jilid I.* Jakarta (ID): Gramedia.

Jones, P. (2010). *Pengantar Teori-Teori Sosial Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme.* Jakarta (ID): Obor.

Kalberg, S. (2003). *Max Weber.* Oxford (UK): Blacwell Publishing.

Maliki, Z. (2012). *Rekonstruksi Teori Sosial Modern.* Yogyakarta (ID): Gadjah Mada University Press.

Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern.* Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar.

Ritzer, G., & Goodman, D. (2011a). *Teori Sosiologi Modern.* Jakarta (ID): Kendana Prenada MEdia Group.

Ritzer, G., & Smart, B. (2011b). *Handbook Teori Sosial.* Bandung (ID): Nusa Media.

Sastroatmodjo, S. (1995). *Perilaku Politik.* Semarang (ID): IKIP Semarang Press.

Setiadi, E., & Kolip, U. (2011). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya.* Jakarta (ID): Kencana.

Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta (ID): Rajawali Pers.

Soemardjan, S., & Soemardi, S. (1964). *Setangkai Bunga Sosiologi.* Jakarta (ID): Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Syarbaini, S., Rahman, A., & Djihado, M. (2004). *Sosiologi Dan Politik.* Bogor Selatan (ID): Ghalia Indonesia.

Sztompka, P. (2010). *Sosiologi Perubahan Sosial.* Jakarta (ID): Prenada.

Weber, M. (1947). *The Theory of Social and Economic Organization.* New York (US): The Free Press Glencoe & The Falcons Wings Press.

Weber, M. (1968). *Economy and Society.* New York (US): Bedminster Press Incoporated.

Weber, M. (2006). *Max Weber: Sosiologi.* Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar.

Wirawan, I. (2012). *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, Dan Perilaku Sosial).* Jakarta (ID): Kencana Prenada Media Group.

Wirawan. (2013). *Kepemimpinan: Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi, dan Penelitian.* Jakarta (ID): RajaGrafindo Persada.

TENTANG PENULIS

La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa lahir di Gelora (Jakarta Pusat) pada tanggal 18 November 1984. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Dayanu Ikhsanuddin (UNIDAYAN) tahun 2008. Penulis menyelesaikan pendidikan Magister pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin (UNIDAYAN) tahun 2012. Penulis bekerja sebagai Dosen pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dayanu Ikhsanuddin (UNIDAYAN) Baubau.

BAB 2

TEORI FILSAFAT POSITIV AUGUSTE CONTE

Oleh : Muhammad Aris

A. Pengertian Filsafat Positiv

Filsafat, falsafah, atau filosofi adalah metodologi yang mengkaji pertanyaan-pertanyaan umum dan asasi, misalnya pertanyaan-pertanyaan tentang eksistensi, penalaran, nilai-nilai luhur, akal budi, dan bahasa. Filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab, asas hukum, dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta ataupun mengetahui kebenaran dan arti "adanya" sesuatu. Filsafat juga merupakan studi tentang hakikat realitas dan keberadaan, soal apa yang mungkin diketahui serta perilaku yang benar atau salah. Filsafat memiliki beberapa cabang ilmu, di antaranya metafisika (berkaitan dengan sifat dasar realitas dan keberadaan), epistemologi (tentang "asal-muasal dan bidang pengetahuan serta batas dan keabsahannya"), etika, estetika, filsafat politik, logika, filsafat ilmu, dan sejarah filsafat barat. Filsafat juga dapat membantu manusia untuk membebaskan diri dari cara berpikir yang mistis dan dibimbing untuk selalu berpikir secara rasional. Selain itu, filsafat dapat mengajarkan tentang bagaimana mengadakan investigasi atau penelitian yang benar terhadap sebuah persoalan (Adamson et al, 2020).

Filsafat positiv adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan yang benar hanya berasal dari ilmu alam dan tidak berkaitan dengan metafisika. Pemikiran ini dikembangkan oleh Auguste Comte pada abad ke-19.

Positivisme menekankan pentingnya pengalaman aktual dan pengetahuan yang dapat diamati secara fisik sebagai sumber pengetahuan yang valid. Beberapa karakteristik filsafat positiv adalah:

1. Pengetahuan yang benar didasarkan pada pengalaman aktual dan observasi empiris. Pengalaman aktual: Pengalaman aktual merujuk pada pengalaman langsung yang diperoleh melalui penemuan, percobaan, atau pengamatan. Pengalaman ini melibatkan interaksi langsung dengan objek atau fenomena yang sedang dipelajari. Observasi empiris: Observasi empiris adalah pengamatan yang dilakukan menggunakan panca indera manusia. Dalam observasi empiris, informasi diperoleh melalui penggunaan indra manusia untuk mengamati dan mengumpulkan data tentang objek atau fenomena yang sedang diteliti. Kebenaran berdasarkan pengamatan: Kebenaran yang bersifat empiris diperoleh secara objektif berdasarkan pengamatan menggunakan panca indera. Hal ini berarti bahwa kebenaran tersebut dapat diverifikasi dan diamati oleh orang lain yang ingin melakukannya. Bukti empiris: Bukti empiris adalah informasi yang membenarkan suatu kepercayaan dalam kebenaran atau kebohongan suatu klaim empiris. Bukti ini diperoleh melalui observasi atau percobaan dan digunakan untuk mendukung atau menguji kebenaran suatu pernyataan. Pengalaman aktual dan observasi empiris merupakan dasar penting dalam memperoleh pengetahuan yang benar. Dengan melakukan pengamatan dan percobaan yang objektif, kita dapat memperoleh informasi yang dapat diverifikasi dan diandalkan untuk membangun pengetahuan yang akurat (Bird & Alexander, 2010).
2. Pengetahuan yang benar harus dapat diuji dan diverifikasi secara ilmiah. Obyektivitas: Pengetahuan ilmiah harus didasarkan pada fakta dan bukti yang dapat diobservasi secara objektif. Hal ini berarti bahwa pengetahuan harus bebas dari bias dan interpretasi pribadi. Metodologis:

Pengetahuan ilmiah diperoleh melalui penggunaan metode ilmiah atau metode penelitian yang sistematis. Metode ini melibatkan langkah-langkah yang terstruktur dan terdokumentasi untuk mengumpulkan data, melakukan eksperimen, dan menganalisis hasil. Sistematis: Pengetahuan ilmiah harus disusun secara logis dan teratur. Ini berarti bahwa pengetahuan harus dapat diorganisir dalam kerangka konseptual yang konsisten dan koheren. Universal: Pengetahuan ilmiah harus dapat diterapkan secara luas dan berlaku untuk semua orang dan situasi yang relevan. Ini berarti bahwa pengetahuan ilmiah harus dapat diverifikasi dan diuji ulang oleh orang lain untuk memastikan kebenarannya (Lippert *et al*, 2017).

3. Metafisika dan spekulasi filosofis dianggap tidak relevan dalam mencari pengetahuan yang benar. Namun, beberapa pandangan berbeda mengenai relevansi filsafat dalam mencari pengetahuan. Beberapa artikel menunjukkan bahwa filsafat dapat menjadi pijakan atau landasan berpikir manusia dalam dunia akademik sebagai penalaran akal dalam mencari dan mendalami sebuah ilmu pengetahuan. Filsafat juga dapat membantu dalam memahami kehidupan sebagai suatu keseluruhan, yang merupakan hasil berbagai sains dan pengalaman kemanusiaan. Namun, ada juga pandangan yang berbeda yang menyatakan bahwa pengetahuan harus benar dan jika tidak benar, maka disebut kontradiksi. Oleh karena itu, beberapa orang berpendapat bahwa spekulasi filosofis dan metafisika tidak relevan dalam mencari pengetahuan yang benar. Dalam kesimpulannya, relevansi filsafat dalam mencari pengetahuan yang benar masih menjadi perdebatan. Namun, filsafat dapat membantu dalam memahami kehidupan sebagai suatu keseluruhan dan menjadi pijakan atau landasan berpikir manusia dalam dunia akademik sebagai penalaran akal dalam mencari dan mendalami sebuah ilmu pengetahuan (Rapar, 2001).

4. Filsafat positiv menekankan pentingnya sains dan metode ilmiah dalam memahami dunia. Menurut filsafat positivisme, sains dan metode ilmiah adalah satu-satunya cara yang dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar dan objektif tentang dunia. Metode ilmiah sendiri terdiri dari beberapa langkah, antara lain merumuskan masalah, mengadakan studi kepustakaan, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis, mengumpulkan data, dan menganalisis data. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, filsafat positivisme memiliki peran penting dalam memperkuat pengajaran sains dan metode ilmiah di sekolah.

5. Dalam bidang ilmu sosial seperti sosiologi dan antropologi, positivisme sering dikaitkan dengan naturalisme, yang juga menekankan penggunaan metode ilmiah dalam mempelajari fenomena social. Positivisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan yang benar hanya berasal dari ilmu alam dan tidak berkaitan dengan metafisika. Dalam konteks sosiologi dan antropologi, positivisme berarti memahami dunia dengan berdasarkan sains dan menggunakan metode ilmiah untuk mempelajari fenomena sosial. Beberapa tokoh yang terkait dengan positivisme dalam ilmu sosial adalah Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Talcott Person. Mereka berpendapat bahwa hukum-hukum ilmu sosial dapat dibandingkan dengan hukum alam, dan tindakan manusia dapat diabstraksi dengan teori-teori lain. Pandangan positivisme dalam melihat kebudayaan juga menekankan pada analisis fakta-fakta yang teramati dan penggunaan metode ilmiah dalam memahami praktik social (Rapar, 2001).

B. Filsafat Positivisme Menurut Auguste Comte

Positivisme Auguste Comte adalah gerakan filosofis dan politik yang berusaha menghapuskan teologi dan metafisika, sehingga manusia modern hanya mengandalkan pengetahuan ilmiah. Comte percaya bahwa semua peristiwa kehidupan manusia merupakan proses aktualisasi yang dapat dianalisis

melalui hukum sebab akibat. Ia juga mengembangkan teori tiga tahap perkembangan intelektual manusia, yaitu tahap teologis, metafisik, dan positif. Pada tahap teologis, manusia menjelaskan fenomena alam melalui kekuatan supranatural. Pada tahap metafisik, manusia menjelaskan fenomena alam melalui konsep abstrak. Pada tahap positif, manusia menjelaskan fenomena alam melalui pengetahuan ilmiah. Positivisme Comte dianggap sebagai upaya untuk membatasi filsafat yang masih tercampur dengan pengetahuan non-empiris (metafisika, ideologi, dan agama). Positivisme Comte juga diakui sebagai landasan perkembangan sosiologi sebagai cabang ilmu sosial tersendiri. Filsafat positiv juga berpendapat bahwa tugas filsafat adalah memberikan penjelasan logis terhadap pemikiran, bukan sebagai teori. Dalam terminologi filsafat, positif berarti sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat dialami sebagai realitas, berlawanan dengan sesuatu yang hanya ada dalam angan-angan atau konstruksi pikiran manusia. Jadi, pengertian positivisme secara terminologi adalah suatu paham yang mencari pencapaian pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman nyata dan observasi empiris.

Positivisme adalah pendekatan filosofis yang berusaha mencapai pengetahuan berdasarkan pengalaman nyata dan pengamatan empiris. Dalam terminologi filsafat, positif berarti sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat dialami sebagai kenyataan, berlawanan dengan sesuatu yang hanya ada dalam imajinasi atau konstruksi pemikiran manusia. Positivisme juga percaya bahwa tugas filsafat adalah memberikan penjelasan logis tentang pemikiran, bukan sebagai teori. Positivisme adalah gerakan yang muncul pada akhir abad ke-19 dan dicirikan oleh minat yang kuat pada sains dan sikap skeptis terhadap agama dan metafisika. Logika positivisme adalah aliran pemikiran dalam filsafat yang membatasi pemikirannya pada segala sesuatu yang dapat dibuktikan dengan pengamatan atau analisis. Para pengikut positivisme percaya bahwa semua pengetahuan ilmiah harus didasarkan pada inferensi logis yang didasarkan pada fakta-fakta yang jelas (Soyomukti, 2011).

Auguste Comte adalah seorang filsuf Perancis yang mengembangkan beberapa teori, antara lain:

1. Hukum Tiga Tahap: Comte percaya bahwa masyarakat manusia berkembang melalui tiga tahap: tahap teologis, tahap metafisik, dan tahap positif. Pada tahap teologis, orang menjelaskan fenomena alam dan tatanan sosial melalui keyakinan agama dan kekuatan supranatural. Pada tahap metafisik, orang mulai menggunakan konsep abstrak dan penjelasan filosofis untuk memahami dunia. Terakhir, pada tahap positif, masyarakat mengandalkan pengamatan ilmiah dan bukti empiris untuk menjelaskan fenomena dan memandu kemajuan sosial.
2. Positivisme: Comte dianggap sebagai salah satu pendiri positivisme, sebuah gerakan filosofis yang menekankan penggunaan metode ilmiah dan observasi untuk memahami dunia. Dia percaya bahwa semua pengetahuan harus didasarkan pada bukti empiris dan prinsip-prinsip ilmiah harus diterapkan pada studi masyarakat.
3. Sosiologi: Penekanan Comte pada penerapan prinsip-prinsip ilmiah untuk mempelajari masyarakat meletakkan dasar bagi pengembangan sosiologi sebagai disiplin yang berbeda. Dia percaya bahwa sosiologi harus didasarkan pada prinsip-prinsip positivisme dan harus mempelajari masyarakat dengan menggunakan metode ilmiah.
4. Sistem Politik Positif: Buku Comte, Sistem Politik Positif, berisi gagasannya tentang bagaimana masyarakat harus diatur dan diatur. Dia percaya bahwa masyarakat harus diatur berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah dan pendekatan positivis harus digunakan untuk memandu pengambilan keputusan politik.

Penting untuk dicatat bahwa walaupun teori-teori Comte memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan sosiologi dan positivisme, teori-teori tersebut juga menghadapi kritik dan tunduk pada interpretasi yang berbeda (Maksum, 2015).

Filsafat positivis Auguste Comte memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut adalah beberapa teorinya berdampak pada bidang sains:

1. Penekanan pada bukti empiris: Comte percaya bahwa semua pengetahuan harus didasarkan pada bukti empiris dan prinsip-prinsip ilmiah harus diterapkan pada studi masyarakat. Penekanan pada bukti empiris ini memiliki dampak yang bertahan lama pada metode ilmiah, yang mengandalkan observasi dan eksperimen untuk menguji hipotesis dan teori.
2. Pengembangan sosiologi: Penekanan Comte pada penerapan prinsip-prinsip ilmiah untuk mempelajari masyarakat meletakkan dasar bagi pengembangan sosiologi sebagai disiplin yang berbeda. Sosiologi sejak itu menjadi bidang studi penting yang menggunakan metode ilmiah untuk memahami fenomena sosial.
3. Pengaruh terhadap ilmu-ilmu lain: Filsafat positivis Comte juga mempengaruhi bidang-bidang ilmu lainnya, seperti psikologi dan ekonomi. Penekanannya pada penggunaan metode ilmiah untuk memahami dunia telah mengarah pada pengembangan teori dan pendekatan baru di bidang ini.
4. Pemisahan sains dan agama: Penekanan Comte pada bukti empiris dan prinsip ilmiah membantu memisahkan sains dari agama. Pemisahan ini telah memungkinkan sains untuk berkembang secara mandiri dan telah menghasilkan penemuan dan kemajuan baru di berbagai bidang.

Kesimpulannya, filosofi positivis Auguste Comte memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Penekanannya pada bukti empiris dan prinsip-prinsip ilmiah telah mempengaruhi metode ilmiah dan mengarah pada pengembangan teori dan pendekatan baru di berbagai bidang. Teorinya juga membantu memisahkan sains dari agama, memungkinkan sains berkembang secara mandiri dan membuat penemuan baru (Nasution, 2016).

C. Konsep-Konsep Teori Sosiologi Auguste Comte

Dalam teori sosiologi Auguste Comte, terdapat beberapa konsep yang penting. Berikut adalah beberapa konsep dalam teori sosiologi Auguste Comte:

1. Positivisme: Comte mengembangkan teori positivisme yang menekankan pentingnya pengamatan empiris dan verifikasi ilmiah dalam memperoleh pengetahuan yang tepat. Positivisme adalah gerakan filosofis dan politik yang menekankan pentingnya pengamatan empiris dan verifikasi ilmiah dalam memperoleh pengetahuan yang akurat. Auguste Comte, seorang filsuf Prancis, adalah pendiri positivisme dan juga menamai dan mensistematisasikan ilmu sosiologi. Comte percaya bahwa seluruh alam semesta diatur oleh hukum alam, dan hukum ini dapat dipelajari melalui metode sains. Positivisme menjadi dasar pendekatan ilmiah dalam kajian sosiologi.

2. Dinamika Sosial: Comte menganggap dinamika sosial sebagai bagian terpenting dari sosiologi. Dinamika sosial merujuk pada teori perkembangan dan perubahan sosial dalam masyarakat. Dinamika sosial adalah bagian terpenting dari sosiologi menurut Auguste Comte. Dinamika sosial merujuk pada teori perkembangan dan perubahan sosial dalam masyarakat. Comte membagi sosiologi menjadi dua bagian, yaitu statika sosial dan dinamika sosial. Statika sosial dimaksudkan untuk mempelajari hukum-hukum aksi dan reaksi antara bagian-bagian dari suatu sistem sosial, sedangkan dinamika sosial mempelajari teori perkembangan dan kemajuan sosial. Dinamika sosial juga dianggap sebagai studi sejarah, yang menghilangkan filsafat spekulatif dari sejarah.

3. Tahap Perkembangan: Comte membagi perkembangan pemikiran manusia dan masyarakat ke dalam tiga tahap, yaitu tahap teologi, tahap metafisika, dan tahap positif. Tahap teologi, pada tahap ini, manusia menjelaskan fenomena sosial melalui kekuatan supranatural. Mereka

mengaitkan peristiwa dengan tindakan dewa, roh, atau entitas non-manusia lainnya. Tahap metafisika, tahap ini ditandai dengan keyakinan akan campur tangan ilahi dan penjelasan agama atas kejadian alam. Pada tahap metafisik, manusia menjelaskan fenomena sosial menggunakan konsep abstrak. Mereka menjauh dari penjelasan supernatural dan mulai menggunakan ide filosofis dan abstrak untuk memahami dunia. Tahap ini ditandai dengan penggunaan konsep-konsep seperti hukum alam, esensi, dan prinsip abstrak. Tahap positif ditandai dengan penggunaan metode ilmiah dan observasi empiris untuk menjelaskan fenomena sosial. Manusia mengandalkan bukti, data, dan pengamatan untuk memahami dunia di sekitar mereka. Tahap ini menekankan pentingnya objektivitas, eksperimentasi, dan akumulasi pengetahuan melalui inkuiri ilmiah.

4. Hukum Tiga Tahap: Comte juga mengemukakan hukum tiga tahap dalam pemikiran manusia, yaitu hukum teologis, hukum metafisik, dan hukum positif. Tahap teologis, pada tahap ini, penjelasan tentang fenomena sosial didasarkan pada kekuatan supranatural dan keyakinan agama. Orang mengaitkan peristiwa dan perilaku sosial dengan kehendak dewa atau roh. Tahap metafisik, pada tahap metafisik, fenomena sosial dijelaskan menggunakan konsep dan prinsip abstrak. Penjelasan didasarkan pada esensi, penyebab akhir, dan gagasan abstrak daripada kekuatan supernatural. Tahap positif, tahap positif ditandai dengan penjelasan fenomena sosial menggunakan metode ilmiah dan pengamatan empiris. Ini menekankan penggunaan alasan, bukti, dan pengamatan untuk memahami dan menjelaskan peristiwa sosial

5. Masyarakat Statis dan Dinamis: Comte membagi masyarakat menjadi dua tipe, yaitu masyarakat statis dan masyarakat dinamis. Masyarakat statis cenderung mempertahankan status quo dan tradisi nilai. Ini berfokus pada mempelajari hukum statis yang membentuk dasar masyarakat. Perspektif

ini menekankan stabilitas dan struktur masyarakat, menelaah tatanan sosial, norma, dan institusi yang ada. Masyarakat yang dinamis mengalami perubahan dan perkembangan sosial. Ini berfokus pada mempelajari perkembangan dan kemajuan masyarakat. Perspektif ini mengakui bahwa masyarakat terus berkembang dan beradaptasi dengan keadaan dan tantangan baru

Konsep-konsep ini merupakan beberapa aspek penting dalam teori sosiologi Auguste Comte. Dengan konsep-konsep ini, Comte berusaha membangun dasar ilmiah untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial dalam masyarakat (Rofiq, 2018).

D. Pengaruh Positivisme Terhadap Perkembangan Sosiologi

Pengaruh positivisme terhadap perkembangan sosiologi dapat dilihat dalam beberapa aspek:

1. Pendekatan ilmiah, positivisme mendorong penggunaan pendekatan ilmiah dalam sosiologi. Ini berarti bahwa pengetahuan sosiologi harus didasarkan pada observasi empiris dan pengukuran yang sistematis. Pendekatan ini melibatkan penggunaan metode penelitian yang objektif dan terukur, seperti survei, eksperimen, dan analisis statistic
2. Pemisahan antara fakta dan nilai, positivisme menekankan pemisahan antara fakta dan nilai dalam penelitian sosiologi. Ini berarti bahwa peneliti harus berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena sosial secara obyektif, tanpa memasukkan nilai-nilai pribadi mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai obyektivitas dan keabsahan ilmiah.
3. Penggunaan teori dan konsep yang teruji, positivisme mendorong penggunaan teori dan konsep yang dapat diuji secara empiris dalam sosiologi. Ini berarti bahwa teori-teori sosiologi harus dapat diuji melalui pengumpulan data dan analisis yang sistematis. Pendekatan ini bertujuan untuk

membangun pengetahuan yang dapat diverifikasi dan diterima secara ilmiah.

4. Pengembangan metodologi penelitian, positivisme telah berkontribusi pada pengembangan metodologi penelitian dalam sosiologi. Pendekatan ini melibatkan penggunaan metode-metode yang terstruktur dan terukur untuk mengumpulkan dan menganalisis data, seperti survei, wawancara terstruktur, dan analisis statistik. Metodologi ini membantu peneliti dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena sosial.

Meskipun positivisme telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan sosiologi, pendekatan ini juga telah dikritik. Beberapa kritikus berpendapat bahwa positivisme terlalu membatasi sosiologi hanya pada aspek-aspek yang dapat diobservasi dan diukur, sementara mengabaikan aspek-aspek yang lebih kompleks dan sulit diukur, seperti makna dan interpretasi sosial. Selain itu, positivisme juga dikritik karena kurangnya perhatian terhadap konteks sosial dan historis dalam penelitian sosiologi (Suaedi, 2016).

E. Pengaruh Dinamika Sosial Terhadap Perkembangan Sosiologi

Dinamika sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan sosiologi. Berikut adalah pengaruh-pengaruh dinamika sosial terhadap perkembangan sosiologi:

1. Perubahan sosial, dinamika sosial melibatkan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Perubahan sosial ini menjadi objek studi utama dalam sosiologi, yang mempelajari bagaimana perubahan tersebut terjadi, apa penyebabnya dan dampaknya terhadap masyarakat
2. Pemahaman tentang masyarakat, dinamika sosial membantu dalam memahami bagaimana masyarakat berinteraksi, membentuk kelompok, dan mengalami perubahan. Hal ini penting dalam sosiologi karena memungkinkan para ahli

sosiologi untuk memahami struktur sosial, norma, nilai dan proses sosial yang terjadi dalam masyarakat

3. Penelitian dan analisis, dinamika sosial memberikan landasan bagi penelitian dan analisis dalam sosiologi. Dengan mempelajari perubahan sosial, sosiolog dapat mengidentifikasi tren, pola, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika sosial. Hal ini memungkinkan pengembangan teori-teori sosiologi yang lebih komprehensif dan pemahaman yang lebih baik tentang masyarakat
4. Pengembangan konsep dan teori, dinamika sosial memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep dan teori dalam sosiologi. Melalui pemahaman tentang perubahan sosial, sosiolog dapat mengembangkan konsep-konsep seperti mobilitas sosial, konflik sosial, perubahan nilai sosial, dan lainnya. Konsep-konsep ini membantu dalam menjelaskan dan memahami fenomena sosial yang kompleks dalam masyarakat
5. Pengaruh terhadap kebijakan social, dinamika sosial juga memiliki pengaruh terhadap kebijakan sosial. Dengan memahami perubahan sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, sosiolog dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga terkait dalam merancang kebijakan sosial yang responsif terhadap dinamika sosial yang ada

Dengan demikian, dinamika sosial memiliki peran yang penting dalam perkembangan sosiologi. Melalui pemahaman dan penelitian tentang dinamika sosial, sosiolog dapat memahami dan menjelaskan fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat serta memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan kebijakan social (Wahana, 2016).

F. Pengaruh Tahap Perkembangan Terhadap Perkembangan Sosiologi

Tahap perkembangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan sosiologi. Berikut adalah beberapa pengaruh tahap perkembangan terhadap perkembangan sosiologi:

1. Revolusi sosial, perkembangan sosiologi dilatarbelakangi oleh Revolusi Sosial di Perancis. Revolusi ini memicu perubahan sosial yang signifikan dan menimbulkan kebutuhan untuk memahami masyarakat secara lebih mendalam.
2. Perubahan social, pokok perhatian sosiologi di Eropa pada awalnya adalah pada kesejahteraan masyarakat dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Sejak itu, sosiologi terus berkembang dan mempelajari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.
3. Teori social, para ilmuwan pada awal masehi hingga abad 19 mulai menyadari perlunya secara khusus mempelajari kondisi dan perubahan sosial. Mereka kemudian berupaya membangun suatu teori sosial berdasarkan ciri-ciri hakiki masyarakat pada tiap tahap peradaban.
4. Aliran dan paradigma, pada abad ke-20, sosiologi semakin berkembang dengan bermunculannya berbagai aliran, paradigma, teori, dan metode baru. Beberapa aliran dan paradigma yang muncul antara lain fungsionalisme, konflik, interaksionisme simbolik, dan feminisme.
5. Metode penelitian, sarana untuk kajian sosiologi dapat dilakukan dengan beberapa jalan, berupa pengamatan, perbandingan, eksperimen, serta metode historis. Metode penelitian yang digunakan dalam sosiologi terus berkembang dan semakin canggih seiring dengan perkembangan teknologi.

Dengan demikian, tahap perkembangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan sosiologi. Perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat memicu kebutuhan untuk memahami masyarakat secara lebih mendalam dan mempelajari perubahan sosial yang terjadi. Para ilmuwan kemudian berupaya membangun suatu teori sosial berdasarkan ciri-ciri hakiki masyarakat pada tiap tahap peradaban. Selain itu, sosiologi semakin berkembang dengan bermunculannya berbagai aliran, paradigma, teori, dan metode baru (Wilujeng, 2014).

G. Pengaruh Hukum Tiga Tahap Terhadap Perkembangan Sosiologi

Hukum Tiga Tahap adalah teori yang dikenalkan oleh Auguste Comte dalam bidang sosiologi. Teori ini menggambarkan tiga tahap perkembangan pemikiran manusia, yaitu tahap teologis, tahap metafisik, dan tahap positif. Pengaruh Hukum Tiga Tahap terhadap perkembangan sosiologi adalah sebagai berikut:

1. Membuat sosiologi menjadi ilmu yang mandiri, dalam tahap perkembangannya, sosiologi dapat dipisahkan dari ilmu-ilmu sosial lainnya seperti ekonomi dan sejarah. Banyak upaya, baik ilmiah maupun non-ilmiah, telah menjadikan sosiologi sebagai ilmu yang berdiri sendiri.
2. Mendorong pengembangan teori tentang perkembangan dan kemajuan masyarakat, hukum tiga tahap membagi kajian sosiologi menjadi dua bagian besar, yaitu Social statics dan Social dynamic. Social dynamik membahas teori tentang perkembangan dan kemajuan masyarakat.
3. Menemukan hukum-hukum aksi dan reaksi yang terjadi dalam sistem social, sosiologi bertugas untuk mempelajari serta menemukan hukum-hukum aksi dan reaksi yang terjadi dalam sistem sosial

Dengan demikian, Hukum Tiga Tahap memberikan kontribusi penting dalam perkembangan sosiologi sebagai ilmu yang mandiri dan dalam pengembangan teori tentang perkembangan dan kemajuan masyarakat.

H. Pengaruh Masyarakat Statis dan Dinamis Terhadap Perkembangan Sosiologi

Masyarakat statis dan dinamis memiliki pengaruh yang berbeda terhadap perkembangan sosiologi. Berikut adalah beberapa pengaruhnya:

1. Pengaruh Masyarakat Statis:
   Masyarakat statis cenderung mempertahankan tradisi dan nilai-nilai yang sudah ada, sehingga sulit untuk terjadi perubahan sosial yang signifikan. Karena perubahan sosial yang lambat, sosiologi cenderung lebih fokus pada deskripsi dan analisis masyarakat yang sudah ada, daripada pada perubahan sosial yang terjadi

2. Pengaruh Masyarakat Dinamis:
   Masyarakat dinamis cenderung mengalami perubahan sosial yang lebih cepat dan signifikan. Perubahan sosial yang cepat dan signifikan ini memunculkan berbagai masalah sosial yang baru, sehingga sosiologi perlu mengembangkan teori dan metode baru untuk mengatasi masalah-masalah tersebut

Sosiologi juga perlu memperhatikan perubahan sosial yang terjadi secara cepat dan signifikan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang muncul. Dalam perkembangan sosiologi, kedua jenis masyarakat ini memiliki peran yang penting. Masyarakat statis memberikan gambaran tentang masyarakat yang sudah ada, sedangkan masyarakat dinamis memberikan tantangan dan peluang untuk mengembangkan teori dan metode baru dalam sosiologi (Schwab, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

Adamson, Peter; Ganeri, Jonardon (2020). Classical Indian Philosophy: A History of Philosophy Without Any Gaps, Volume 5. Oxford University Press. pp. 101–109. ISBN 978-0-19-885176-9. Archived from the original on 29 June 2023. Retrieved 30 June 2023.

Bird, Alexander (2010). "The epistemology of science—a bird's-eye view". Synthese. 175 (S1): 5–16. doi:10.1007/s11229-010-9740-4.

Lippert-Rasmussen, Kasper; Brownlee, Kimberley; Coady, David, eds. (2017). A companion to applied philosophy. John Wiley & Sons. ISBN 9781118869116.

Maksum, A. (2015). Pengantar Filsafat Dari Masa Klasik Hingga Postmodernisme. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Nasution, T. A. (2016). Filsafat ilmu: Hakikat mencari pengetahuan. Yogyakarta: Deepublish.

Rapar, J. H. (2001). Pengantar Filsafat. Yogyakarta: Kanisius.

Rofiq, M. N. (2018). Peranan Filsafat Ilmu Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan. Falasifa, 9(1), 161–175. https://doi.org/10.36835/falasifa.v9i1.112.

Suaedi. (2016). Pengantar Filsafat Ilmu. Bandung: Alfabeta

Soyomukti, N. (2011). Pengantar Filsafat Umum. Yogyakarta: ArRuzz Media.

Wahana, P. (2016). Filsafat Ilmu Pengetahunaan. Yogyakarta: Pustaka Diamond.

Schwab, K. (2019). Revolusi Industri Keempat. In The Fourth Industrial Revolution. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Wilujeng, S. W. (2014). Ilmu dalam Perspektid Filsafat (Suatu Upaya Mengembalikan Ilmu pada Hakikatnya). Jurnal Humanika, 2(2), 93–102. https://doi.org/10.14710/humanika.20.2.93-102.

TENTANG PENULIS

Dr. Muhammad Aris, S.Pi, MP, lahir di Pacing (Kabupaten Bone) pada tanggal 10 Juni 1976. Penulis sudah menekuni dunia perikanan budidaya sejak masih dijenjang Pendidikan menengah selama tiga tahun di SUPM Negeri Bone, dengan system Pendidikan boarding (asrama) sejak tahun 1992 sampai tahun 1995. Menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) pada Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Muslim Indonesia (UMI) tahun 2000. Penulis menyelesaikan pendidikan Magister (S2) pada Program Studi Sistem-Sistem Pertanian konsentrasi Perikanan Budidaya, di Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin tahun 2002. Pendidikan Program Doktor selesai pada tahun 2011 di Program Studi Ilmu Akuakultur IPB melalui program Beasiswa Pendidikan Pasaca Sarjana (BPPS). Penulis bekerja sebagai tenaga pengajar di Program Studi Budidaya Perairan, FPIK Universitas Khairun sejak tahun 2003 sampai sekarang.

Penulis aktif mengikuti seminar, aktif mempublikasi artikel pada jurnal nasional dan internasional bereputasi. Penulis juga aktif sebagai dewan editor jurnal dan reviewer pada jurnal nasional dan internasional bereputasi. Penulis aktif menulis buku seputaran Akuatkultur, seperti buku : Budidaya Rumput Laut (Teori dan Aplikasi), Budidaya Udang Vaname dan Bioteknologi Kelautan. Penulis memiliki HAKI sederhana No EC002022115628 dengan judul produk " Jaring Kantong Budidaya Rumput Laut, dari hasil Dana Hibah Matching Fund KEDAIREKA Tahun 2022.

BAB 3

TEORI KONFLIK KARL MARX

Oleh : Arditya Prayogi

A. Pendahuluan

Kata konflik secara etimologis dapat ditelusuri dari kata kerja dalam bahasa latin yaitu "con" yang berarti bersama dan "fligere" yang berarti benturan/bertabrakan. Kedua kata ini jika digabungkan membentuk kata "configere" yang berarti saling memukul. Dalam bahasa Indonesia, kata konflik dapat diartikan sebagai percekcokan, pertentangan, maupun perselisihan. Jika dimaknai secara luas, konflik dapat dipahami sebagai pertentangan yang terjadi dalam kehidupan manusia.

Dalam kaitannya dengan posisi manusia sebagai makhluk sosial, terma "konflik" kemudian dipahami sebagai terma "konflik sosial" yang dimaknai sebagai pertentangan yang terjadi antar anggota masyarakat yang sifatnya menyeluruh – maupun sebagian dalam struktur kehidupan bermasyarakat. Dengan pemahaman ini maka konflik dapat dimaknai sebagai suatu upaya atau proses sosial antar dua atau lebih individu dimana salah satu pihak berupaya untuk menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau paling tidak membuatnya menjadi tidak berdaya (Lawang, 1985). Lebih jauh, konflik dapat dipahami sebagai (salah satu) cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan, tanpa mengindahkan berbagai norma dan nilai yang berlaku di tengah masyarakat (Soekanto, 1993).

Pemahaman akan konflik sosial kemudian berkembang menjadi suatu teori. Teori sendiri berarti seperangkat berbagai pernyataan secara sistematis yang berupa kumpulan konsep, definisi, maupun proposisi yang saling berkaitan dengan memaparkan tinjauan sistematis atas fenomena yang ada dengan menunjukkan hubungan khas diantara variabel dengan tujuan memberikan eksplorasi serta prediksi. Teori juga dapat dimaknai sebagai sekumpulan pernyataan yang memiliki kaitan logis, yang merupakan cermin atas kenyataan yang ada mengenai suatu peristiwa maupun benda. Di dalam teori, harus terdapat konsep, pernyataan, definisi konseptual dan praksis, serta kaitan logis antar konsep tersebut. Suatu teori dapat diterima jika memuliki dua persyaratan utama. Pertama ialah syarat ideal yang dapat diakui jika ia memenuhi persyaratan, serta kedua yaitu syarat pragmatis yang menyatakan bahwasanya ia memenuhi persyaratan jika memiliki paradigma maupun variabel lain yang saling terhubung. Dengan demikian, teori konflik sosial kemudian dapat dipahami sebagai sekumpulan teori/paradigma yang menjelaskan mengenai peranan konflik, utamanya yang berkaitan dengan berbagai kelompok maupun kelas dalam kehidupan sosial masyarakat (Jary & Jary, 1991).

Tulisan ini tidak bermaksud untuk mengurai secara panjang lebar terkait teori konflik (sosial). Alih-alih demikian, tulisan ini akan fokus pada teori konflik yang dikembangkan oleh salah seorang pemikir sosial yaitu Karl Marx. Nama Karl Marx sendiri sudah sangat mahsyur di kalangan para pengkaji ilmu-ilmu sosial-humaniora, selain dari nama besar lain seperti Max Weber maupun Emile Durkheim. Sebagai pemikir, pikiran Karl Marx telah sedemikian besar berpengaruh dalam perkembangan sejarah dunia yang masih dirasakan relevan hingga saat ini. Berbagai peristiwa revolusi besar yang pernah terjadi di dunia dianggap terjadi karena terinspirasi dengan berbagai diktum yang disampaikan oleh Karl Marx. Dus, tulisan ini dapat membantu dalam mengelaborasi lebih lanjut mengenai

teori konflik yang diintrodusir oleh Karl Marx untuk dapat dimaknai relevansinya dengan kehidupan masyarakat saat ini.

B. Biografi Intelektual Karl Marx

Secara intelektual, karya pemikiran Karl Marx masuk dalam kategori aliran pemikiran klasik bersama dengan berbagai intelektual sosial lain seperti Durkheim, Comte, Simmer dan yang lainnya. Karl Marx (selanjutnya disebut Marx) lahir di negara Prusia (saat ini menjadi negara Jerman) pada 5 Mei 1818. Latar belakang keluarga Marx merupakan golongan keluarga menengah, dimana ayahnya berprofesi sebgai seorang pengacara. Dalam aspek spiritualitas, keluarga Marx merupakan keluarga yang mengalami perpindahan keyakinan dari Yahudi ke Kristen Protestan. Hal ini sedikit banyak mempengaruhi pola pikir intelektual Marx nantinya (Ramly, 2019).

Perjalanan intelektual Marx dimulai pada 1835, pasca ia menyelesaikan sekolah menengahnya. Marx kemudian melanjutkan pendidikan tingginya ke Universitas Bonn dengan mengambil studi hukum. Pilihan ini sendiri lebih merupakan kehendak dari ayahnya. Namun demikian, pilihan ini tidak terlalu dinikmati oleh Marx, sehingga pada tahun berikutnya Marx memutuskan pindah ke Universitas Berlin dengan menekuni filsafat dan sejarah. Di kampus ini, bakat intelektual Marx tumbuh dengan pesat. Marx menekuni dunia filsafat tidak hanya secara formal, namun juga secara informal. Marx tergabunfgdalam kelompok Muda Hegelian, suatu kelompok diskusi yang tekun pada dunia filsafat Hegel. Marx pun memiliki berbagai teman diskusi yang semakin menguatkan bakat intelektualnya. Filsafat Hegel sendiri kala itu telah menjadi dogma penting yang bahkan diresmikan menjadi ideologi negara Jerman. Pada 1841, Marx mendapat gelar doktor filsafat pada usia 23 tahun dengan menyelesaikan disertasinya yang berjudul "Perbedaan antara Filsafat Alam Demokritus dan Filsafat Alam Epicurus" (Ramly, 2019).

Dengan menempuh pendidikan hingga tingkat doktoral, Marx awalnya berkeinginan untuk menjadi dosen. Namun, hal tersebut diurungkan karena dorongannya sebagai seorang filsuf lebih besar dari seorang intelektual-akademisi. Sebagai seorang filsuf, Marx meniscayakan untuk tidak terikat dengan institusi-institusi yang ada di sekitarannya. Atas dasar ini, Marx kemudian memutuskan untuk menjadi soeorang jurnalis pada media cetak (koran) yang juga mendukung gagasan kebebasannya. Pada rentang 1842, Marx kemudian menjadi pemimpin redaksi pada koran ini. Selama masa ini, Marx banyak menghasilkan tulisan-esai yang bernuansa liberal dengan diselimuti berbagai paradigma seperti humanisme, idealisme, serta demokrasi. Meski demikian, tak lama setelahnya, koran ini pun ditutup oleh pemerintah karena dianggap terlalu keras dalam mengkritik pemerintah (Anwar & Adang, 2017).

Marx kemudian mulai menjalani pengelanaan selama 2 tahun, karena seringnya berpindah-pindah antar negara, hingga pada 1844 Marx berkenalan dengan pemikir sosialis asal Inggris, Fredrich Engels. Selama interaksinya dengan Engels, tumbuh semangat aktivisme-revolusioner dalam diri Marx. Sebagai bentuk semangat ini, Marx dengan berkolaborasi dengan Engel kemudian melahirkan karya buku berjudul "Heilige Familie" yang berisi kritik (pedas) atas praktik kapitalisme yang marak di Eropa kala itu. Akibatnya, Marx kemudian menjadi "musuh negara". Karena sakit hati, Marx pun melepas status warga negara Jermannya dan pindah ke Brussel.

Di Brussel, Marx kemudian mendalami ilmu ekonomi dan semakin intens terlibat dengan berbagai organisasi buruh-pekerja yang ada. Meski telah menjadi aktivis, kerja intelektual Marx tidaklah berhenti. Ia tetap menulis berbagai karya terkait filsafat. Beberapa karya Marx semisal "Theses on Feuerbach", "Die Deutsche Ideologie", serta salah satu yang terpenting yaitu buku berbahasa Perancis yang berjudul "La Misere de la Philosophie". Buku terakhir ini selain berupa karya filsafat, - yang lagi-lagi, juga berisi kritik terhadap praktik kapitalisme.

Di Brussel, Marx semakin meneguhkan diri menjadi seorang radikalis-sosialis-komunis. Marx pun bergabung dalam organisasi revolusioner internasional dan liga komunis. Disini, Marx –dengan berkolaborasi dengan Engels, berhasil melahirkan karya fenomenal berupa buku Manifesto Komunis yang terbit pada 1848 (Anwar & Adang, 2017). Buku ini dapat dikatakan sebagai buku babon (pertama) yang menjadi pondasi utama berbagai teori sosial berupa teori konflik dan perubahan sosial. Terbitnya buku ini kemudian berimplikasi terjadinya beberapa kekacauan –atau revolusi di beberapa wilayah di Eropa. Sebagai dampaknya, pemerintah Brussel-Belgia kemudian mengusir Marx dari negara tersebut.

Pengalaman atas pengusiran dirinya, menjadikan Marx mencetuskan satu diktum bahwa kaum komunis tidak punya tanah air. Diktum ini sejatinya lebih merupakan refleksi atas apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Meski mengalami pengusiran, Marx tetap melanjutkan kerja-kerja aktivis-revolusioner dan intelektualnya. Paling tidak ketika Marx ada di London-Inggris –sebagai tempat pengasingannya pada rentang 1850-1880 an, Marx masih terus menulis, terutama sekali di bidang ekonomi. Tercatat di masa ini Marx banyak berkutat sebagai kontributor pada media massa cetak (koran dan majalah) di Eropa dan bahkan Amerika. Hingga akhir hayatnya, dinamika intelektual dan aktivisme yang dialami Marx terus membuatnya untuk melakukan kerja-kerja penulisan. Dari berbagai karya-karya penting Marx, terdapat satu karya satu karya utama –yang belum usai, namun telah dianggap sebagai karya utama Marx yang menjadi identifikasi atas Marx sendiri yaitu "Das Kapital".

C. Postulat Karl Marx Tentang Konflik Sosial

Gagasan/pemikiran Karl Marx tidaklah lahir dalam ruang kosong. Gagasan Marx lahir dengan latar belakang terjadinya revolusi Industri yang sangat berpengaruh besar dalam sistem kehidupan masyarakat saat itu. Dengan latar demikian, Marx melahirkan pemikirannya dengan memperhatikan pola kehidupan saat itu yang memunculkan

ketimpangan sosial begitu tajam. Marx berpandangan bahwasanya para pemilik modal memiliki dominasi yang sangat besar dalam sistem sosial ekonomi sehingga dengan dominasi tersebut, para pemilik modal ini dapat dengan mudah mengontrol –maupun menguasai, kelompok sosial lain. Dari pandangan inilah kemudian Marx mengenal terma kapitalisme.

Bagi Marx, kapitalisme meniscayakan negara untuk tidak lagi menjadi subjek utama dalam kehidupan bermasayarakat. Peran negara digantikan oleh kelas-kelas sosial tertentu yang bahkan dapat mempengaruhi sistem kehidupan sosial-ekonomi di tataran internasional. Dengan demikian, pihak yang mampu menghasilkan sejarah bukanlah masyarakat dalam sebuah negara melainkan berbasis pada individu-kelompok pemilik modal. Dengan kondisi demikian, Marx berpandangan bahwa akan terjadi persaingan ekonomi, dimana masing-masing individu akan berkompetisi untuk mendapatkan materi sebanyak-banyaknya secara eksploitatif agat mendapatkan kekuasaan di tengah masyarakat serta mengatasi keterasingan (alienasi) dirinya di tengah-tengah masyarakat. Dari pandangan demikianlah kemudian lahir postulat berupa "kelas sosial" dari Marx dimana Marx membagi kelas tersebut menjadi dua yaitu kelas "Borjuis" dan "Proletar."

Borjuis merupakan istilah yang merujuk pada kelas para pemilik (akses) modal. Sedangkan proletar, merujuk pada kelas pekerja yang tidak memiliki (akses) modal. Kedua kelas ini menjalin hubungan resiprokal, terutama kaum proletar yang memberikan tenaganya serta memiliki ketergantungan penuh kepada kaum borjuis. Kondisi demikian, dalam postulat Marx akan melahirkan sikap serta sifat eksploitatif yang dilakukan oleh kelas borjuis kepada kelas proletar. Marx mengamini bahwa akan terjadi perubahan yang revolusioner yang akan menggulingkan sistem kapitalis dan akan menciptakan sistem sosialis dimana prinsip kesetaraan –pun keseragaman, akan terwujud demi meningkatkan harkat dan martabat masyarakat di seluruh dunia. Lebih jauh, revolusi sosialisme ini, menurut

Marx akan menyatukan seluruh manusia dalam ikatan secara global (Hart, 1992).

Secara epitemologis, postulat Marx tentang kelas sosial ini beranjak pada satu realitas sosial yang kompleks secara kontekstual. Realitas sosial penting yang menjadi pijakan Marx dalam melahirkan postulatnya ialah realitas sistem politik serta ekonomi. Kedua hal ini merupakan realitas sosial yang sudah sangat kompleks pada zamannya yang juga merupakan lanjutan dalam diskursus berbagai pemikitan pada masa-masa sebelumnya. Secara historis, postulat Marx beranjak dari situasi negara Prusia (Jerman) yang saat itu telah menunjukkan adanya ketimpangan sosial yang begitu tajam, terutama dalam konteks stratifikasi sosial yang telah mengkategorisasikan masyarakat dalam kelompok bangsawan dan rakyat jelata. Dalam aspek politik dan ekonomi, kelompok sosial bangsawan memiliki dominasi kuat yang mampu melahirkan berbagai kebijakan politik-ekonomi yang lebih banyak didasarkan pada kepentingan-kepentingan menjaga dominasi kelas bangsawan. Lebih lanjut, postulat Marx lebih merupakan "jawaban" atas kritiknya terhadap pandangan Hegel yang melegitimasi peran bangsawan (menengah) dalam kancah sosial politik saat itu (Marx, 2000). Kontemplasi Marx atas realitas sosial pada masanya kemudian melahirkan suatu postulat yang membela hak-hak kaum tertindas. Untuk mewujudkannya, Marx kemudian melakukan tindakan-tindakan praktis –dengan terlibat pada kegiatan aktivisme, sebagai upaya membalikkan tradisi berpikir teoritis-idealis yang berkembang di Jerman saat itu.

Dalam kaitannya dengan berbagai pemikiran Marx, termasuk soal postulatnya, dalam titik tertentu, saat ini sering dijadikan sebagai suatu idealita. Dengan menjadi idealita, gagasan-gagasan Marx justru akan kehilangan sisi kritisnya. Marx –sebagai seorang filsuf, sejatinya mencoba membangun ulang suatu pandangan yang dapat menjadi jawaban atas kritik filosofis yang terlalu berat sebelah, baik dari sisi teoritis maupun praktis. Marx sejatinya ingin mengintegrasikan berbagai unsur

yang ada, baik dari sisi idealisme-teoritis serta rasionalisme-praktis, dengan terus mengupayakan untuk melengkapi berbagai kekurangannya (Larrain, 1996). Kritisisme Marx terhadap berbagai aliran pemikiran, dibangun melalui kesadaran untuk melampaui apa yang telah menjadi prestasi para filsuf sebelumnya. Melalui proses tautan antara teori dan praksis-lah, Marx menemukan pemahaman tentang dunia dan manusia, sebagaimana yang kita jumpai dalam berbagai karyanya.

D. Teori Konflik Karl Marx

Sebelum fokus pada ulasan teori konflik yang diintrodusir Karl Marx, perlu dipahami bahwasanya teori konflik merupakan salah satu teori sosial dasar yang memiliki basis dasar yang menjadi pondasi penting teori ini. *Pertama*, teori konflik adalah antitesa dari teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional memiliki premis utamanya yang menyatakan bahwasanya terdapat keteraturan di tengah masyarakat yang meniadakan adanya konflik. Teori konflik kemudian memberi kritik atas teori ini dengan menyatakan bahwa konflik atau pertentangan adalah sesuatu yang laten dan melekat dalam kehidupan masyarakat. Teori konflik menyatakan, tidak selamanya masyarakat ada dalam keteraturan. Hal ini dibuktikan bahwasanya dalam sejarah panjang umat manusia, manusia senantiasa mengalami berbagai konflik/pertentangan. *Kedua*, teori konflik melihat adanya aspek otoritas, kekuasaan, koersi, serta dominasi dalam masyarakat. Keempat aspek ini akan menghasilkan subordinasi dan superordinasi, sesuatu yang dinafikan dalam teori struktural fungsional. *Ketiga*, teori konflik merupakan basis dari perubahan sosial. Jika pada teori struktural fungsional perubahan sosial masyarakat (secara natural) dapat dan selalu dicapai pada titik ekuilibrium/keseimbangan dalam masyarakat, teori konflik menyatakan bahwa perubahan dapat dicapai lewat konsensus setelah sebelumnya mengalami dinamika konflik kepentingan (Prayogi, 2023). Teori konflik meniscayakan adanya negosiasi-

kompromi agar tercipta kesepakatan antar masyarakat. Kesepakatan atau konsensus ini, perlu dipahami, tidak terjadi secara natural, namun melalui pemaksaan. Maksudnya adalah, konsensus terjadi karena masyarakat terpaksa –atau dipaksa untuk melakukannya. Oleh karenanya, teori konflik sangat berkaitan erat dengan aspek otoritas, kekuasaan, koersi, serta dominasi.

Merujuk pada teori konflik Marx, Marx kemudian membangun basis teori konflik dengan berbasis pada postulat soal kelas sosial, Marx juga membangun teori konflik sosial dari berbagai asumsi, mengingat setiap teori yang lahir dari para ahli selalu memiliki asumsu dasar. Paling tidak terdapat lima asumsi yang dibangun Marx dalam menjelaskan teori konflik. *Pertama*, Marx berpandangan bahwasanya manusia tidaklah memiliki kodrat yang persis dan tetap. *Kedua*, setiap sikap, tindakan, serta keyakinan seorang manusia akan sangat tergantung pada hubungan sosialnya di tengah masyarakat. Hubungan sosial ini kemudian akan sangat tergantu pada situasi dimana individu tersebut terposisi, baik dalam kelas sosial maupun struktur politik-ekonomi di tengah masyarakat. *Ketiga*, karena manusia tidak memiliki kodrat yang tetap, maka ia dapat lepas-melepaskan diri dari apa yang telah didapatkan dari posisi sosialnya. *Keempat*, masyarakat mendasarkan interaksinya pada proses sebab akibat berbasis kekuatan produksi, yang berarti akan sangat terkait dengan apa yang (akan) dihasilkan dan bagaimana sesuatu dihasilkan. *Kelima*, karena berbasis kekuatan produksi, maka terdapat perbedaan bentuk struktur sosial masyarakat antara lain masyarakat primitif, perbudakan, feodalisme, kapitalisme, dan komunisme (Wirawan, 2012).

Berbagai asumsi tersebut kemudian membawa Marx dalam mengembangkan pemikiran terkait penjelasan mengenai penyebab terjadinya konflik sosial. Dalam hal ini, secara sederhana, Marx memaparkan bahwasanya konflik sosial sejatinya merupakan bentuk pertentangan kelas. Pertentangan kelas sendiri terjadi karena adanya pertentangan ekonomi, terutama dalam persaingan untuk mendapatkan sumber daya –

yang jumlahnya terbatas, sehingga berujung pada terjadinya konflik sosial. Paling tidak, teori konflik yang dikembangkan Marx akan terkait dengan berbagai konsep dasar, antara lain pertama, struktur kelas dalam masyarakat. Kedua, perbedanaan kepentingan ekonomi antar kelas. Ketiga, terdapat pengaruh besar kelas ekonomi terhadap gaya hidup individu, dan keempat, terdapat pengaruh konflik kelas terhadap perubahan struktur sosial. Kaitan antar empat konsep ini bermuara pada persaingan untuk menguasai dan mengungguli antar satu dengan lainnya yang dengannya kemudian memicu terjadinya koflik sosial (Wirawan, 2012).

Terkait dengan postulat kelas sosial, Marx mengembangkan teori konflik sosial dengan saling mengaitkan antar konsepsi-konsepsi selain kelas sosial, seperti konsepsi tentang perubahan sosial, kekuasaan, serta peran negara. Dalam hal ini, Marx berpandangan bahwasanya suatu negara memiliki suatu kepentingan. Kepentingan ini kemudian banyak dimanfaatkan oleh kelas sosial borjuis, dimana kelas borjuis memegang kendali atas alat-alat produksi yang dengannya dibutuhkan legalisasi serta legitimasi. Kedua aspek legal ini kemudian didapatkan melalui negara. Kelas sosial borjuis kemudian bersepakat untuk menetapkan apa-apa saja hal yang akan diproduksi dan (kemudian) didistribusi. Marx berpandangan, sampai pada titik ini, otoritas hukum dan negara telah jatuh dalam kendali kelas sosial borjuis. Sejalan dengan waktu, kelas sosial borjuis semakin memperluas pasar, kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dapat dikendalikan serta dikuasai kelas borjuis karena mereka semakin mengembangkan kekuasaannya pada alat-alat industri modern. Lebih jauh, kelas borjuis juga akan mengendalikan gerak pasar. Bahkan, mereka juga akan mengendalikan berbagai kebijakan politik yang menyangkut kepentingan modal ekonominya (Marx & Engels, 1964).

Keberadaan kelas borjuis ini, dalam pandangan Marx mengakibatkan munculnya "jarak" antar kelompok masyarakat, tidak hanya kepada mereka yang memiliki kapital, namun juga

kepada yang sama-sama memiliki modal, sehingga memunculkan stratifikasi sosial berupa kelas-kelas sosial. Para pemilik modal ini kemudian menjalin kontak dengan kelas sosial proletar –yang merupakan kelas mayoritas yang tidak memiliki modal. Kelas sosial proletar ini kemudian muncul sebagai kelas pekerja yang menuntut mereka untuk terlibat dengan kelas borjuis sebagai efek logis untuk mereka dapat bertahan hidup. Selain tuntutan bertahan hidup, kontak ini niscaya terjadi mengingat masih terbatasnya sarana produksi maupun alat-alat produksi (Johnson, 1986). Hubungan antar keduanya jelas merupakan hubungan dominasi sosial yang dilakukan oleh kelas sosial borjuis. Dengan demikian, timbul ketergantungan yang besar terhadap kelas borjuis.

Bagi kelas borjuis sendiri, kepentingan mereka ialah mengumpulkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang perlu ditekankan, Marx melihat motif pengumpulan kekayaan ini tidak semata-mata didorong rasa rakus/tamak kelas borjuis, namun karena mereka juga memiliki tuntutan untuk mendapatkan target keuntungan sebagai efek logis persaingan di pasar bebas. Dengan demikian, kelas borjuis ini kemudian dengan sengaja mengeksploitasi tenaga kerja kelas proletar sebagai efek logis tuntutan persaingan tadi. Tenaga kerja didapatkan dengan biaya seminimal mungkin untuk kemudian dieksplotasi semaksimal mungkin. Sebaliknya, kelas sosial proletar memiliki kepentingan untuk mendapatkan upah sebanyak mungkin untuk mengurangi waktu kerja serta menguasai kondisi pekerjaan mereka.

Selain itu, dalam konteks hubungan antar kelas ini, yang terjadi sesungguhnya ialah hubungan kekuasaan antara kelas atas dengan kelas bawah. Kekuasaan ini berarti kemampuan pemilik modal untuk menihilkan kesempatan kelas bawah untuk mendapatkan hak bekerja dan mendapatkan nafkah, yang kemudian dipakai untuk menindas keinginan kaum buruh agar kaum buruh –untuk selamanya, tetap bekerja bagi kepentingan para pemilik modal. Dalam hal ini Karl Marx memberikan pernyataan atas realitas sosial ini dengan gambaran bahwasanya

"masyarakat diibaratkan sebagai panggung yang didalamnya memiliki berbagai macam pertentangan dan negara dipandang sebagai salah satu pelaku yang aktif dalam pertentangan dan negara selalu berpihak kepada kekuatan yang dominan. Paksaan dalam wujud hukum utama untuk memelihara lembaga milik pribadi, perbudakan, dan kepunyaan kapital yang menimbulkan ketidaksamaan hak dan kesempatan". Pendek kata, adanya interaksi antar kelas ini dipandang sebagai kelompok-kelompok sosial yang mempunyai kepentingan yang saling bertentangan satu sama lain, sehingga konflik niscaya terjadi.

Sebagai kelas yang mengalami penindasan, kaum proletar menyadari perlu adanya perbaikan nasib. Kesadaraan ini kemudian semakin menggelinding sehingga memunculkan kesadaran kolektif. Namun demikian, kesadaran ini tidak serta merta muncul. Menurut Marx, kesedaran ini mesti diinisiasi oleh pemimpin-pemimpin tradisional dari golongan proletar untuk kemudian dikonsolidasikan kepada seluruh kelas proletar. Setelahnya, ditetapkan kebulatan sikap dan dimulailah konflik terhadap kelas borjuis. Bentuk konflik ini diwujudkan secara fisik dengan melakukan tindakan perusakan terhadap alat-alat maupun aset-aset produksi serta barang-barang impor. Tahapan konflik ini kemudia semakin terekskalasi secara liar seiring bertambahnya massa. Konflik pun berkembang menjadi kekacauan (*chaos*) hingga semakin meruncing menjadi suatu revolusi sosial (Marx & Engels, 1964).

Menguatknya perlawanan kelas proletar terhadap kelas borjuis, juga mengakibatkan pecahnya konsolidasi antar kaum borjuis, sehingga antar kaum borjuis pun terjadi konflik. Konflik antar kelas borjuis ini meniscayakan ada diantara mereka yang bergabung dengan kelas proletar. Namun demikian, bergabungnya sebagian kelas borjuis ke dalam kelas proletar ini dalam pandangan Marx tidaklah didasari karena kesamaan tujuan, namun hanya sebatas pada upaya menyelamatkan diri terhindar dari berbagai benturan dengan arus massa yang semakin menguat. Pada akhirnya, Marx mengandaikan

kemenangan kelas proletar dan kejatuhan kelas borjuis sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan dan pada puncaknya akan tercipta masyarakat komunis atau masyarakat tanpa kelas sosial (Marx, 2000). Secara sederhana, alur pikiran Karl Marx atas teori konflik (sosial) dapat dilihat dalam skema berikut:

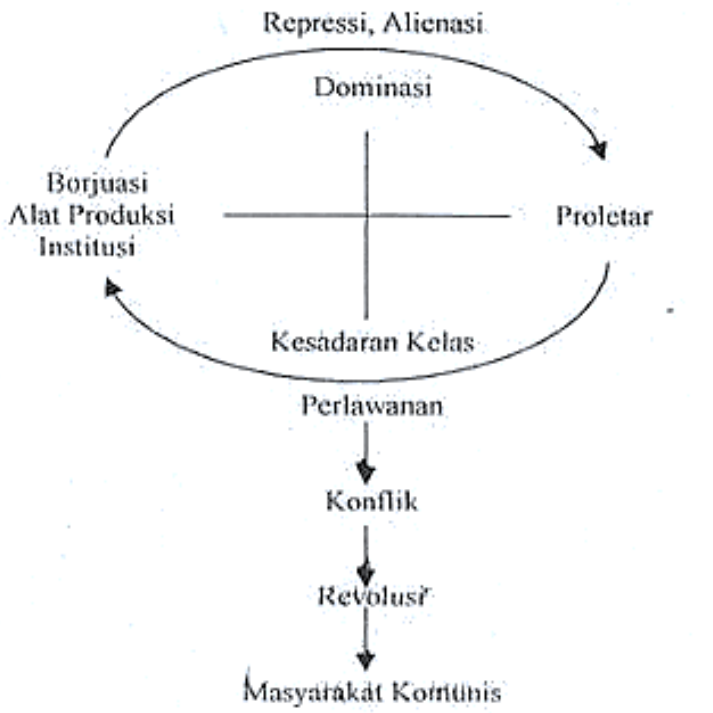

Sumber: (Syadzali, 2014)

Karl Marx menjadikan konflik kelas sebagai prasyarat utama dari suatu perubahan sosial. Marx berpendapat konflik kelas menjadi sentral di masyarakat. Dalam konteks pemeliharaan tatanan sosial, perspektif ini lebih menekankan pada peranan kekuasaan. Teori konflik ala Marx ini kemudian memunculkan apa yang dinamakan sebagai perspektif konflik. Perspektif konflik melihat masyarakat sebagai entitas yang senantiasa berdinamika/berubah, terutama sebagai akibat dari

dinamika pemilik modal yang terus berusaha menjaga, meningkatkan posisinya, serta mencapai tujuannya. Untuk mencapai suatu tujuan, suatu kelompok cenderung untuk menghalangi serta mengorbankan kelompok lainnya. Dengan demikian, konflik akan senantiasa terjadi, dan kelompok yang memiliki modal sosial yang kuat akan senantiasa berusaha mendapatkan tujuannya meski harus melakukan dominasi atas kelompok lain yang memiliki modal sosial yang lemah (atau bahkan tidak memiliki modal). Secara ringkas, teori konflik dan perubahan sosial seperti dua sisi mata uang. Perspektif ini meniscayakan potensi terciptanya perubahan dalam masyarakat secara terus-menerus dan masing-masing.

E. Penutup

Konsep teoritis mengenai konflik sosial dapat dipahami sedemikian luas. Konflik sosial secara luas dapat dipahami sebagai pertentangan maupun pertikaian di tengah kehidupan masyarakat. Dalam kondisi konflik, tiap-tiap kelompok akan berkompetisi dan menjatuhkan lawan agar dapat mencapai tujuannya. Konflik sosial sendiri merupakan gejala sosial yang laten serta melekat dalam kehidupan masyarakat yang timbul karena adanya perbedaan maupun pertentangan dari unsur-unsur sosial masyarakat.

Karena sedemikian luas, telaah mengenai konflik sosial sebagai teori sendiri saat ini masih selalu hangat untuk diperbincangkan. Telaah mengenai berbagai pemikiran para tokoh terkait konflik masih relevan untuk terus dikaji sebagai bagian dari upaya resolusi konflik itu sendiri. Sebagai suatu teori, konflik sosial bukanlah sebuah teori yang mutlak serta absolut terkait kebenarannya. Termasuk teori konflik yang diintrodusir oleh Karl Marx.

Teori konflik yang dikembangkan Marx sejatinya berkutat pada postulat Marx mengenai pertentangan antara kelas borjuis dan proletar. Dalam prosesnya, kedua kelas ini berdialektika, hingga berujung pada terjadinya konflik dan revolusi sosial. Marx mendasarkan analisisnya pada beberapa konsep-konsep

sosial lain seperti otoritas, kekuasaan, koersi, serta dominasi. Namun demikian sebagai sebuah teori, Marx hanya mencoba untuk menyampaikan analisisnya terkait realitas sosial berupa konflik yang terjadi di tengah masyarakat, meski dalam penyampaiannya mengandung berbagai kritik maupun kelemahan.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Y., & Adang. (2017). *Sosiologi untuk Universitas.* (A. Gunarsa, Ed.) Bandung: Refika Aditama.

Hart, M. H. (1992). *Seratus Tokoh Paling Berpengaruh Dalam Sejarah.* (M. Djunaedi, Trans.) Jakarta: Pustaka Jaya.

Jary, D., & Jary, J. (1991). *Sosiology Dictionary.* New York: HarperCollins.

Johnson, D. P. (1986). *Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspectives.* (R. M. Lawang, Trans.) Jakarta: Gramedia.

Larrain, J. (1996). *The Concept of Ideology.* (R. Gunawan, Trans.) Yogyakarta: LKPSM-NU.

Lawang, R. M. (1985). *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi.* Jakarta: Karunika, Universitas Terbuka.

Marx, K. (2000). *Revolution and Counter Revolution.* (F. Mu'in, P. J. Hiwono, & P. Sujarno, Trans.) Yogyakarta: Jendela.

Marx, K., & Engels, F. (1964). *Manifesto of The Communist Party.* (D. Aidit, Trans.) Jakarta: Jajasan Pembaharuan.

Prayogi, A. (2022). Perspektif Filosofis dalam Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh. *Jurnal Pendidikan Terbuka Dan Jarak Jauh*, *23*(2), 23-32.

Prayogi, A. (2023). Social Change in Conflict Theory: A Descriptive Study. *ARRUS Journal of Social Sciences and Humanities*, *3*(1), 37-42.

Prayogi, A. (2023). The Role of History as a Science in Sustainable Development. *West Science Interdisciplinary Studies*, *1*(01), 16-23.

Ramly, A. M. (2019). *Peta Pemikiran Karl Marx (Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis).* Yogyakarta: LkiS.

Soekanto, S. (1993). *Kamus Sosiologi.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syadzali, A. (2014). KONFLIK KELAS DAN FENOMENA KOMUNISME DALAM HUBUNGAN STRUKTURAL MENURUT PANDANGAN KARL MARX. *AL-BANJARI , 13* (1), 26-36.

Wirawan, I. B. (2012). *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial).* Jakarta: Kencana Prena Media.

TENTANG PENULIS

Arditya Prayogi. Penulis lahir di Palembang pada tanggal 18 September 1987. Penulis adalah tenaga teknis pada Perpustakaan UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menempuh pendidikan tinggi di bidang Ilmu Sejarah di salah satu PTN di Bandung. Saat ini penulis juga mendalami bidang tulis menulis sebagai bagian dari salah satu profesi yang ditekuni. Penulis dapat dihubungi lewat surel arditya.prayogi@uingusdur.ac.id

BAB 4

TEORI STRUKTURAL FUNGSIONAL TALCOTT PARSONS

Oleh : Hartini Amin

Talcott Parsons adalah seorang sosiolog Amerika yang memberikan kontribusi signifikan dalam bidang sosiologi. Ia terkenal karena teori tindakan sosial dan fungsionalisme strukturalnya. Parsons lahir pada tanggal 13 Desember 1902, di Colorado Springs, Colorado, dan meninggal pada tanggal 8 Mei 1979, di Munich, Jerman Barat. Ia memperoleh gelar PhD di bidang ekonomi dan bertugas di fakultas di Universitas Harvard dari tahun 1927 hingga 1973. Pada tahun 1930, ia termasuk profesor pertama di departemen sosiologi. Karya Parsons lebih berkaitan dengan sistem teoritis umum untuk analisis masyarakat dari pada studi empiris yang lebih sempit. Talcott Parsons merupakan seorang sosiolog yang berkontribusi pada sosiologi, ilmu politik, antropologi, dan psikologi. Ia mengembangkan teori fungsionalisme struktural, yang menggambarkan masyarakat sebagai suatu sistem bagian-bagian yang saling bergantung di mana lembaga-lembaga sosial ada karena menjalankan suatu fungsi. Parsons berpendapat bahwa struktur sosial memiliki fungsi yang berkontribusi terhadap stabilitas dan kelangsungan hidup masyarakat secara keseluruhan. Ia juga percaya bahwa struktur sosial dipertahankan melalui nilai dan norma Bersama (Britannica, 2023).

A. Teori Struktural Fungsional

Teori struktural fungsional merupakan sebuah teori sosiologi yang berfokus pada peran struktur sosial dalam menentukan dan mempertahankan kohesi atau tatanan sosial.

Teori ini berisi sudut pandang yang menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berkaitan. Cirinya adalah gagasan tentang kebutuhan masyarakat. Masyarakat sama dengan organisme biologis, karena mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar masyarakat dapat melangsungkan hidupnya dan berfungsi dengan baik. Teori Struktural Fungsional ini diciptakan oleh Emile Durkheim dan dipengaruhi oleh pemikiran Max Weber. Selain itu, teori ini juga dikembangkan oleh Talcott Parsons dan Robert King Merton. Teori Struktural Fungsional ini memiliki beberapa kelemahan, antara lain terlalu kaku terutama ketika melihat suatu perubahan terutama yang terjadi di luar sistem sosial dan terlalu memandang segala hal dari sudut pandang yang baik, sehingga konflik sosial dianggap sebagai hal yang remeh.

Teori struktural fungsional memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan bekerja untuk menciptakan tatanan dan stabilitas dalam masyarakat. Masyarakat dianggap sebagai sebuah struktur yang memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar masyarakat dapat melangsungkan hidupnya dan berfungsi dengan baik. Teori ini juga memandang bahwa masyarakat harus dianggap sebagai organisme biologis yang memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar masyarakat dapat melangsungkan hidupnya dan berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, Teori Struktural Fungsional menekankan pentingnya keseimbangan sosial dalam masyarakat dan bahwa setiap bagian dari masyarakat harus berfungsi dengan baik agar masyarakat dapat berjalan dengan lancer. Teori ini merupakan salah satu teori dalam sosiologi yang mengkaji tentang struktur sosial dan bagaimana struktur tersebut mempengaruhi masyarakat. Teori ini juga menekankan pentingnya integrasi sosial dalam masyarakat, yaitu bagaimana individu-individu dalam masyarakat saling terhubung dan saling bergantung satu sama lain. Dalam teori ini, masyarakat dianggap sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling terkait dan

saling mempengaruhi. Setiap bagian dari masyarakat memiliki peran dan fungsi tertentu yang harus dilaksanakan dengan baik agar masyarakat dapat berjalan dengan lancer (Haryanta & Sujatmiko, 2012).

Teori Struktural Fungsional juga menekankan pentingnya keseimbangan sosial dalam masyarakat. Keseimbangan sosial ini terjadi ketika setiap bagian dari masyarakat berfungsi dengan baik dan saling mendukung satu sama lain. Ketika terjadi ketidakseimbangan sosial, masyarakat dapat mengalami konflik dan ketidakstabilan. Integrasi sosial dan keseimbangan sosial merupakan dua hal yang sangat penting dalam menjaga stabilitas masyarakat. Integrasi sosial dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti melalui keluarga, agama, dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Keseimbangan sosial dapat terjaga apabila setiap bagian dari masyarakat berfungsi dengan baik dan saling mendukung satu sama lain. Fungsionalisme struktural adalah sebuah sudut pandang dalam sosiologi dan antropologi yang menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Teori ini berfokus pada peran struktur sosial dalam menentukan dan mempertahankan kohesi atau tatanan sosial. Struktur dianggap sebagai tubuh masyarakat, sementara itu fungsi merupakan peran institusi sosial dalam sebuah organ atau tubuh masyarakat. Fungsionalisme struktural memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terintegrasi secara fungsional ke dalam suatu bentuk ekuilibrium. Teori ini juga menganggap bahwa semua elemen dalam masyarakat, seperti norma, adat, tradisi, dan institusi, memiliki fungsi positif dalam menjaga keseimbangan social. Dalam paradigma fungsionalisme struktural, seluruh elemen masyarakat saling berhubungan dan membentuk suatu sistem. Artinya, jika salah satu elemen tidak berfungsi maka seluruh masyarakat akan terganggu. Saling ketergantungan dan kerjasama antara elemen-elemen ini menunjukkan bahwa masyarakat terintegrasi dan dapat bertahan seiring berjalannya waktu (Kinloch, 2009).

B. Konsep-Konsep Teori Struktural Fungsional Talcot Parson

Talcott Parsons adalah seorang sosiolog dan antropolog sosial yang dikenal dengan teori fungsionalisme strukturalnya. Berikut merupakan konsep-konsep teori struktural fungsional Talcott Parsons yaitu :

1. Teori fungsionalisme struktural memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang bekerja sama untuk mencapai ekuilibrium. Dalam teori ini biasanya masyarakat dipandang sebagai suatu konstruksi yang koheren, terikat, dan pada dasarnya bersifat relasional yang berfungsi seperti suatu organisme, dengan berbagai institusi sosialnya bekerja sama secara tidak sadar dan semi-otomatis untuk mencapai keseimbangan sosial secara keseluruhan. Fungsionalisme struktural menekankan tatanan formal bagian-bagian dan keterkaitan fungsionalnya sebagai kontribusi terhadap kebutuhan pemeliharaan masyarakat yang terstruktur. Menurut teori ini, perubahan sosial dianggap sebagai respon adaptif terhadap beberapa ketegangan dalam sistem sosial. Fungsionalisme struktural mengalami beberapa modifikasi ketika Talcott Parsons menyatakan "prasyarat fungsional" yang harus dipenuhi oleh sistem sosial mana pun agar dapat bertahan hidup. Prasyarat ini mencakup pengembangan pengaturan (struktur) antarpribadi yang rutin, penetapan hubungan dengan lingkungan eksternal, penetapan batasan, serta perekrutan dan pengendalian anggota. Bersama Robert K. Merton dan lainnya, Parsons mengklasifikasikan struktur tersebut berdasarkan fungsinya (Hallin, 2001).
2. Setiap struktur dalam sistem sosial pada masyarakat akan berfungsi pada suatu tujuan tertentu. Struktur sosial berfungsi sebagai kontrol sosial bagi masyarakat, yang dimaksudkan adalah dengan adanya struktur sosial yang jelas dan didalamnya terdapat norma maupun peraturan yang jelas guna mengatur setiap individunya dapat menghindarkan resiko adanya perselisihan maupun konflik. Selain itu, struktur sosial juga berfungsi sebagai pengawas sosial, sebagai penekan atau antisipasi adanya pelanggaran

terhadap norma-norma. Teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons beranggapan bahwa setiap struktur dalam sistem sosial pada masyarakat akan berfungsi pada tujuan tertentu. Secara umum, sistem sosial dapat diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan tindakan yang dibentuk dari berbagai interaksi sosial antara satu. Pengertian struktur sosial adalah tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat, yang didalamnya terkandung hubungan timbal balik (Ritzer. 2011).

3. Teori fungsionalisme struktural Ini mirip dengan tubuh manusia sebagai bagian dari sistem, di mana komponen berhubungan satu sama lain untuk melakukan fungsinya. Fungsionalisme struktural adalah teori sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem kompleks yang bagian-bagiannya bekerja sama untuk mendorong solidaritas dan stabilitas. Sering digambarkan dengan tubuh manusia, di mana setiap unsurnya terhubung satu sama lain untuk melakukan fungsinya. Teori ini menekankan pada hubungan antara berbagai institusi sosial yang membentuk masyarakat, seperti pemerintah, hukum, pendidikan, dan agama. Menurut teori ini, setiap lembaga memiliki tujuan dan sangat diperlukan untuk kelangsungan keberadaan lembaga lain dan masyarakat secara keseluruhan. Fungsionalisme juga menyatakan bahwa masyarakat ibarat suatu organisme, terdiri dari bagian-bagian berbeda yang bekerja sama. Namun, salah satu kritik terhadap teori ini adalah teori ini tidak dapat menjelaskan perubahan sosial secara memadai.

4. Individu dalam sistem sosial memainkan peran dan fungsi penting dalam struktur dengan menerapkan pola nilai dan norma. Sistem sosial adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur sosial yang saling berhubungan dan saling memengaruhi dalam mencapai tujuan bersama. Setiap unsur sosial dalam sistem sosial saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain. Tidak ada unsur sosial yang dapat

berfungsi dengan baik tanpa adanya unsur sosial lainnya. Sistem sosial memiliki karakteristik penyesuaian yang dinamis dan dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hubungan fungsional antar unsur sosial adalah dasar persatuan dalam sistem sosial. Untuk menjalankan peran dan fungsi di dalam struktur, pola nilai dan norma yang diterapkan dalam sistem sosial sangat penting. Sistem sosial hanya akan relevan jika ia mengubah dirinya sesuai dengan objek dan kebutuhan yang berubah.

5. Sistem sosial terdiri dari bagaimana aktor berinteraksi dengan lingkungannya. Sistem sosial adalah serangkaian sub atau bagian dalam sistem yang saling berhubungan, berinteraksi, dan bergantung demi mencapai tujuan bersama untuk mencapai ketentraman dan keselarasan dalam kehidupan social. Sistem sosial terdiri dari keragaman aktor individual yang berinteraksi satu sama lain dalam situasi sosial yang setidaknya berada dalam lingkungan atau ruang. Sistem sosial terdiri dari sejumlah aktor atau individual yang saling berinteraksi dalam situasi yang sekurang-kurangnya mempunyai aspek lingkungan. Dalam sistem sosial, paling tidak harus terdapat dua orang atau lebih, yang saling berinteraksi satu sama lain, mempunyai tujuan dari interaksi tersebut, mempunyai struktur, simbol dan tujuan Bersama. Sistem sosial adalah interaksi di antara sejumlah pelaku dalam suatu situasi yang sekurang-kurangnya memiliki satu aspek fisik atau lingkungan dimana para pelaku tersebut berinteraksi (Parsons T. (1951).
6. Teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons memandang lingkungan sosial terdiri dari lingkungan fisik, sistem budaya, tingkah laku, dan sistem kepribadian. Parsons berpendapat bahwa komunikasi tidak mungkin terjadi tanpa adanya kesesuaian dengan tradisi budaya. Ia percaya bahwa keluarga mempunyai dua fungsi penting dalam masyarakat modern: sosialisasi anak-anak dan pemantapan kepribadian orang dewasa. Ini adalah fungsi integratif dan laten. Parsons

menekankan bahwa kesehatan yang baik dan perawatan medis yang efektif sangat penting agar masyarakat dapat berfungsi (Adams et al, 2001).

7. Kelemahan teori struktur fungsional Talcott Parsons adalah terlalu memfokuskan pada keseimbangan sosial dalam masyarakat dan tidak mempersiapkan potensi terjadinya konflik social. Teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons dikritik karena terlalu fokus pada keseimbangan sosial dalam masyarakat dan tidak mempersiapkan potensi terjadinya konflik sosial. Parsons percaya bahwa masyarakat bertindak serupa dengan tubuh manusia, dimana lembaga-lembaga sosial berinteraksi seperti organ manusia, dan keduanya merupakan bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung yang berfungsi untuk kebaikan keseluruhan. Parsons bertujuan menggunakan fungsionalisme untuk menciptakan teori umum yang menjelaskan semua perilaku manusia dalam hubungannya dengan institusi. Namun, teorinya mendapat kritik karena meremehkan perjuangan politik dan moneter, dasar-dasar perubahan sosial, dan perilaku manipulatif yang umumnya tidak diatur oleh nilai dan standar. Kritikus juga menunjukkan bahwa mencapai keseimbangan "sempurna" bukanlah pertanyaan teoretis yang serius dalam analisis sistem sosial Parsons, dan masyarakat paling dinamis umumnya memiliki sistem budaya dengan ketegangan batin yang penting. Oleh karena itu, teori fungsionalisme struktural Parsons dikritik karena tidak memperhitungkan potensi terjadinya konflik social (Wallace and Alison, 1995).

C. Pengaruh Teori Struktural Fungsional Terhadap Perkembangan Sosiologi

Teori Struktural Fungsional merupakan salah satu teori sosiologi yang berfokus pada peran struktur sosial dalam menentukan dan mempertahankan kohesi sosial atau tatanan sosial. Teori ini dicetuskan oleh Emile Durkheim dan dikembangkan oleh Talcott Parsons dan Robert Merton. Teori ini

memiliki pengaruh besar pada perkembangan lebih lanjut dari pengetahuan sosiologis. Teori Struktural Fungsional memberikan sumbangan dalam menganalisis pola sosial dalam masyarakat karena ia menjelaskan adanya hubungan dari tubuh. Teori ini juga memberikan sumbangan terhadap sosiologi ekonomi. Teori Struktural Fungsional memiliki pengaruh besar pada perkembangan sosiologi. Berikut merupakan pengaruh yang mempengaruhi perkembangan sosiologi yaitu :

1. Memberikan sumbangan dalam menganalisis pola sosial dalam masyarakat karena ia menjelaskan adanya hubungan dari tubuh
2. Memberikan sumbangan terhadap sosiologi ekonomi
3. Memandang masyarakat sebagai sebuah struktur dengan tujuan untuk menafsirkan masyarakat secara luas
4. Menjelaskan peran struktur sosial dalam menentukan dan mempertahankan kohesi sosial atau tatanan social.

Teori Struktural Fungsional memiliki pengaruh besar pada pemikiran sosiolog lainnya, yaitu memberikan kontribusi dalam menganalisis pola sosial dalam masyarakat karena ia menjelaskan adanya hubungan dari tubuh, menjelaskan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan tujuan untuk menafsirkan masyarakat secara luas, memberikan sumbangan terhadap sosiologi ekonomi, menekankan pentingnya memahami peran struktur sosial dalam menentukan dan mempertahankan kohesi sosial atau tatanan sosial, mendorong sosiolog untuk memperhatikan fungsi dari struktur dan institusi dalam masyarakat, mendorong sosiolog untuk memperhatikan tingkat integrasi dalam masyarakat dan mendorong sosiolog untuk memperhatikan hubungan antara anomi dan penyimpangan (Morgan, 1975).

Teori Struktural Fungsional dapat diterapkan dalam studi tentang kelompok minoritas dalam masyarakat dengan beberapa cara, meskipun teori ini juga memiliki kritik terhadap pandangannya terhadap ketimpangan sosial dan kelompok minoritas. Berikut beberapa cara di mana teori ini dapat

diterapkan dalam studi tentang kelompok minoritas dalam masyarakat yaitu, menjelaskan peran struktur sosial dalam menentukan dan mempertahankan kohesi sosial atau tatanan sosial, termasuk dalam kelompok minoritas, mendorong sosiolog untuk memperhatikan tingkat integrasi dalam masyarakat, termasuk dalam kelompok minoritas, mendorong sosiolog untuk memperhatikan hubungan antara anomi dan penyimpangan, termasuk dalam kelompok minoritas, menjelaskan adanya hubungan dari tubuh, termasuk dalam kelompok minoritas. Namun, teori Struktural Fungsional juga memiliki kritik terhadap pandangannya terhadap ketimpangan sosial dan kelompok minoritas. Kritik ini menyatakan bahwa teori ini terlalu menekankan pada keseimbangan sosial dan diskriminasi lebih mudah muncul karena berasal dari kelompok minoritas. Oleh karena itu, sosiolog perlu mempertimbangkan kritik ini dan menggunakan teori Struktural Fungsional dengan hati-hati dalam studi tentang kelompok minoritas dalam masyarakat. Teori Struktural Fungsional dapat memberikan beberapa penjelasan tentang peran kelompok minoritas dalam masyarakat yaitu, kelompok minoritas dapat dilihat sebagai bagian dari struktur sosial dalam masyarakat, dan memiliki peran dalam menjaga kohesi sosial atau tatanan social, kelompok minoritas dapat mempengaruhi integrasi sosial dalam masyarakat, terutama jika kelompok tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dengan mayoritas, kelompok minoritas dapat mengalami anomi atau ketidakstabilan sosial jika mereka merasa tidak terintegrasikan dengan baik dalam masyarakat dan kelompok minoritas dapat mengalami diskriminasi atau ketidakadilan sosial karena posisi mereka yang lebih lemah dalam struktur social (Turner, 1991).

D. Analisis Parsons Tentang Keluarga

Dalam masyarakat tradisional, di mana keluarga menjadi basis organisasi sosial, sebagian besar fungsi kemasyarakatan (AGIL) dilaksanakan dalam keluarga atau dalam kelompok berbasis kekerabatan. Bahkan di abad pertengahan, hanya ada

sedikit perbedaan antara publik dan swasta, dan keluarga serta rumah tangga menjalankan fungsi sebagai produsen, konsumen, dan reproduksi. Seiring berkembangnya pembagian kerja di zaman modern, banyak fungsi yang sebelumnya dijalankan dalam keluarga mulai dilaksanakan di lembaga lain. Peran produsen pada umumnya menjadi bagian dari struktur ekonomi masyarakat dan terlepas dari rumah tangga. Belakangan, sebagian fungsi sosialisasi menjadi terlepas dari keluarga dan berpindah ke lembaga pendidikan – atau fungsi sosialisasi dan pendidikan menjadi terpisah. Meskipun beberapa analis memandang hal ini sebagai indikasi kemunduran keluarga, Parsons berpendapat bahwa evolusi dan perubahan sosial telah menyebabkan perubahan fungsi keluarga. Hal ini merupakan bagian dari pemisahan fungsi AGIL satu sama lain, sehingga struktur, lembaga, dan status yang terpisah menjadi bertanggung jawab untuk menjalankan keempat fungsi tersebut. Parsons memandang diferensiasi fungsional ini secara positif, dengan alasan bahwa peran yang terspesialisasi berarti bahwa fungsi dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Meskipun spesialisasi ini mungkin menimbulkan masalah integrasi, akan ada juga nilai, aturan, dan norma baru yang mengarah pada bentuk integrasi baru dalam masyarakat yang lebih kompleks dan produktif. Dalam keluarga, publik (pekerjaan) dan privat (rumah) telah menjadi terpisah, dengan "penemuan cinta romantis dan perkembangan pembagian kerja dalam keluarga berdasarkan jenis kelamin membantu pemisahan ini. Organisasi ekonomi harus mengembangkan sistem otoritas yang independen dari kekerabatan" (Knapp, 1994). Bagi Parsons, keluarga mempunyai dua fungsi penting dalam masyarakat modern, (a) sosialisasi anak-anak, dan (b) "stabilisasi kepribadian orang dewasa dari populasi masyarakat" (Morgan, 1975).

Parsons melihat sosialisasi dalam keluarga mempunyai dua aspek yang berbeda: (a) ini adalah cara di mana individu menginternalisasikan budaya suatu masyarakat atau kelompok, dan (b) itu adalah proses dimana individu belajar dan

mempersiapkan diri untuk mengambil peran. peran otonom. Parsons menaruh perhatian pada keseluruhan sistem sosial, dan berfungsinya sistem tersebut, pada saat yang sama ia juga menaruh perhatian pada keluarga dan proses sosialisasi. Orang dewasa harus siap untuk perannya dalam masyarakat jika masyarakat ingin terus berfungsi, dan proses sosialisasi dapat mencapai hal ini. Keluarga juga merupakan unit yang otonom dan terisolasi, dan proses sosialisasi mempersiapkan setiap anak untuk membentuk unit keluarga baru yang terisolasi. Morgan mencatat bahwa ini menggabungkan pandangan Freud (perkembangan kepribadian) dan Durkheim (internalisasi budaya). Masing-masing mengabaikan kontribusi yang lain, dan Parsons berupaya menggabungkannya. Sosialisasi dengan demikian bukan sekadar proses internalisasi nilai-nilai kemasyarakatan (sistem budaya) melainkan juga merupakan proses pengembangan kepribadian (personality system). Hasil dari proses sosialisasi adalah kepribadian menjadi cerminan dari sistem sosial yang dialami (Morgan, 1975).

Meskipun keluarga terisolasi dan otonom, keluarga juga terhubung dengan sistem yang lebih luas melalui peran instrumental ayah. Peran suami dan ayah adalah memiliki status dalam struktur pekerjaan (yaitu pekerjaan), dan dia akan mendapat penolakan sosial jika dia tidak memiliki pekerjaan. Status sosial keluarga secara keseluruhan didasarkan pada pekerjaan dan pendapatan suami. Peran instrumental ini memiliki fungsi ganda yaitu menghubungkan keluarga dengan dunia luar dan menjaga keluarga sebagai entitas yang dapat bertahan (fungsi adaptasi). Namun terdapat tekanan bagi suami dalam peran ini, karena (a) pekerjaan itu sendiri mungkin tidak memuaskan, (b) kecilnya peluang untuk menjalin hubungan sosial yang nyata di luar keluarga, dan (c) keluarga dan aktivitas di luar mungkin mempunyai tuntutan yang saling bertentangan.

Analisis Parsons tentang keluarga mendapat banyak kritik. Sifat peran yang tetap, sifat statis keluarga, pembagian yang kaku antara peran instrumental dan peran ekspresif, terlalu meremehkan tingkat kekuasaan (biasanya laki-laki), dan sifat

pendekatan ini yang pada dasarnya konservatif dan konsensus, semuanya telah tunduk pada kritik yang keras. Banyak keluarga saat ini mungkin dianggap disfungsional oleh Parsons, karena mereka tidak menjalankan fungsi yang dijelaskan oleh Parsons. Beberapa orang berpendapat bahwa kebingungan mengenai peran berdampak negatif pada keluarga dan sosialisasi, sehingga melemahkan seluruh masyarakat. Keluarga Parsons adalah keluarga kulit putih mapan di Amerika Utara pada tahun 1940-an dan 1950-an, biasanya berasal dari kelas menengah atau mungkin kelas pekerja dan berstatus. Keluarga berkulit hitam, imigran, miskin atau kelas pekerja, dan bahkan keluarga kelas atas, semuanya sangat berbeda dari tipe ideal yang dijelaskan oleh Parsons. Sulit untuk mengetahui bagaimana reaksi Parsons terhadap perubahan dalam struktur keluarga dan rumah tangga yang terjadi dalam 20-30 tahun terakhir – penurunan jumlah anak, usia menikah dan melahirkan anak yang lebih tua, perempuan yang memasuki angkatan kerja, orang tua tunggal keluarga, keluarga campuran, keluarga sesama jenis, dll. Dilihat dari kriteria AGIL, variabel pola, dan diferensiasi sosial, dapat dikatakan bahwa perubahan-perubahan terakhir dalam keluarga ini menjadi perlu sebagai akibat dari perubahan sosial lainnya, dan mungkin bersifat fungsional. untuk dan meningkatkan stabilitas dalam pengoperasian sistem sosial.

Parsons membawa diskusi tentang keluarga ke dalam arus utama sosiologi, dan mengembangkan analisis sistem sosial yang menjadikan keluarga sebagai bagian penting, membantu fungsi laten dan integratif. Ini adalah sesuatu yang tidak dianggap perlu oleh sosiolog klasik mana pun. Pengenalan peran instrumental dan ekspresif merupakan hal yang berguna, dan jika hal ini memungkinkan untuk digabungkan pada orang yang sama, dengan masing-masing individu melakukan kombinasi yang berbeda, konsep-konsep ini mungkin dianggap lebih dapat diterima. Johnson berpendapat bahwa Parsons mampu memisahkan kekuasaan sebagai sebuah konsep dari konsep instrumental-ekspresif, dan bahwa fungsionalisme multidimensi ini adalah pendekatan yang berguna. Dalam

pengertian ini, Parsons menggunakan pendekatan metodologi Weberian. Mungkin beberapa konsep dan pendekatan ini dapat digabungkan dengan pendekatan feminis atau pendekatan teoretis lainnya untuk menghasilkan model sistem sosial yang lebih lengkap (Morgan, 1975).

DAFTAR PUSTAKA

Britannica. (2023). History & Society Talcott Parsons. https://www.britannica.com/biography/Talcott-Parsons.

Kinloch G.C. (2009) Perkembangan dan Paradigma Utama Teori Sosiologi. Pustaka Setia. Bandung. hlm. 188.

Haryanta A.T & Sujatmiko E, (2012). Kamus sosiologi, Aksarra Sinergi Media. Surakarta.

Hallin D.C, (2001). Journalism. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Pages 7995-8000. doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/04339-4.

Adams, Bert N. and Sydie R. A. (2001). Sociological Theory, Thousand Oaks, Pine Forge,

Ritzer G. (2011). Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Parsons T. (1951). The Social System, New York, Free Press, HM51 P35.

Wallace R.A. and Alison W. (1995). Contemporary Sociological Theory: Continuing the Classical Tradition, fourth edition, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall.

Morgan D. H. J. (1975). Social Theory and the Family, London, Routledge and Kegan Paul. HQ728 M574.

Turner J.H. (1991). The Structure of Sociological Theory, fifth edition, Belmont, Ca., Wadsworth. HM24 T84.

Knapp, P. (1994). One World – Many Worlds: Contemporary Sociological Theory, New York, Harper-Collins.

TENTANG PENULIS

Hartini Amin, S.Sos, M.Si lahir di Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 20 April 1983. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo (UHO) tahun 2005, dan menyelesaikan pendidikan magister pada Program Studi Sosiologi Universitas Hasanuddin Tahun 2012. Penulis bekerja sebagai Dosen Tetap Pada Program Studi Sosiologi Fisip Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau sejak Tahun 2009 hingga saat ini. Beberapa posisi jabatan struktural telah di lalui Penulis yakni menjadi sekrprodi Sosiologi tahun 2012-2015, Kaprodi Sosiologi sejak tahun 2015-2023 . Penulis aktif mengikuti seminar sebagai pembicara, aktif mempublikasi artikel pada jurnal nasional dan prosiding seminar internasional. ***Konflik dan Resolusi Konflik potensi dan dinamikanya dalam relasi sosial*** merupakan salah satu buku yang telah diterbitkan penulis. Penulis juga aktif melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan pernah beberapa kali mendapatkan hibah penelitian dari kemenristekdikti. Email penulis hartiniamin@unidayan.ac.id dan hartiniaminunidayan@gmail.com

BAB 5

TEORI INTERAKSIONISME SIMBOLIK GEORGE HERBERT MEAD

Oleh : Andi Tenri

A. Pengantar

Tujuan utama ilmu-ilmu sosial dalam berteori adalah berupaya mengidentifikasi dan menganalisis realitas sosial. Walaupun realitas sosial berbeda-beda dari perspektif teori tertentu, setidaknya teori berguna sebagai alat komunikasi ilmiah guna memahami dan menerangkan realitas itu. Teori interaksionisme simbolik adalah varian teori sosial, khususnya dalam sosiologi, yang sudah didiskusikan secara meluas oleh para pemikir teori sosial kontemporer. Teori ini juga telah mendapat perhatian yang luas dari para pakar teori sosial (Ritzer & Goodman, 2011; Ritzer & Smart, 2011; Soekanto, 2009; Sunarto, 2004). Kontribusinya dalam mengeksplanasi realitas sosial sudah teruji secara empiris.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji teori tersebut. Segi-segi yang akan dikaji adalah sumber filsafatnya, konsep yang dibangun, asumsi dasarnya, metode yang digunakan, dan peluang aplikasi pada dunia empirik. Kajian secara terintegratif, dimaksudkan bahwa ketiga teori itu memiliki berbagai kesamaan perspektif, dan karena itu, pandangannya terhadap perilaku, manusia, dan masyarakat digolongkan dalam pendekatan interpretatif-humanistik atau paradigma definisi sosial. Teori ini mempunyai ide dasar bahwa manusia adalah aktor yang kreatif dari realitas sosialnya dan menekankan arti penting tindakan aktor yang penuh arti dan makna dalam mengkonstruksi realitas sosial.

B. Sumber Filsafat

Apabila interaksionisme dipersepsikan dari gagasan fundamentalnya akan kenyataan sosial sebagai hasil dari "proses berpikir" manusia, maka yang menjadi sumber filsafatnya sangatlah nyata terkait dengan filsafat fenomenologi sebagaimana telah diuraikan di atas. Sekedar mengulang secara singkat, fenomenologi melihat keterkaitan antara kesadaran dan realitas, tidak ada pemisah di antara keduanya; realitas tampak dalam kesadaran, begitu pula sebaliknya, kesadaran berhubungan dengan realitas. Kesadaran adalah proses berpikir manusia.

Namun kalangan ahli ilmu sosial cenderung membuat pertalian antara interaksionisme simbolik berhubungan dengan akar filsafat "pragmatisme" ataupun "Instrumental" Dewey serta "behaviorisme psikologis" Mead (Ritzer & Goodman, 2011; Johnson D. , 1992; Veeger, 1993), yang juga menekankan pada proses berpikir manusia. Filsafat pragmatisme menekankan interelasi nan kuat mulai dari knowledge dan tindakan atas masalah (problem-solving action). Hal ini sejalan dengan sifat orang Amerika yang tidak sabar dengan spkelulasi abstrak, yang tidak terkait langsung dengan masalah kehidupan sehari-hari (Johnson D. , 1992, p. 5). Menurut Veeger (1993, p. 221), filsafat instrumental ini bertolak dari prinsip dasar bahwa setiap pemisahan antara teori dengan praktek, berpikir dengan berbuat, ilmu pengetahuan (sains) dengan etik, putusan faktual (misalnya, "ini bunga mawar") dengan putusan evaluatif (misalnya, "ini tingkah laku yang tidak baik", harus ditolak.

Menurut Ritzer & Goodman (2011, p. 266), filsafat pragmatisme mempengaruhi orientasi sosiologi interaksionisme simbolik yang dikembangkan oleh Mead. Pertama, menurut pandangan pemikir pragmatism yang melihat realitas hakiki tidak berposisi "di luar" dari dunia yang nyata; di mana realitas tercipta baik secara aktif ketika kita melakukan tindakan di dalam maupun di dalam dunia yang riil. Kedua, manusia merekam dalam ingatan kognitifnya lalu menyandarkan hal

yang diketahuinya atas dunia nyata terhadap yang benar-benar membawa kegunaan kepadanya. Ketiga, manusia membuat batasan atas "objek" sosial dan fisik yang dihadapinya di dunia yang riil berdasar kemanfaatan baginya. Keempat, dalam proses memahami terhadap aktor, dibutuhkan pemafhuman hal tersebut terhadap kegiatan yang dikerjakan oleh actor di dunia yang nyata. Dengan demikian, terdapat tiga hal yang sangat vital penting terhadap interaksionisme simbolik: (1) memberikan pememusatan konsentrasi dengan titik tumpuan perhatian pada aktor serta dunia dunia yang nyata; (2) melihat kepada aktor dan juga kepada dunia yang riil merupakan bagian atas proses yang dinamis serta tidak menjadi struktur yang selalu berorientasi statis; dan (3) makna vital yang ditautkan terhadap melalui penguasaan aktor dalam memberikan tafsir atas kehidupan sosial.

Bagi Dewey, aspek ketiga itu yang terpenting. Dalam filsafat pragmatismenya, Dewey bukan membayangkan pikiran sebagai struktur, melainkan proses berpikir di mana meliputi serangkaian tahap, yakni proses berpikir melingkupi pendefinisian objek pada dunia (kehidupan) sosial, mengilustrasikan pilihan cara bertindak, membayangkan proyeksi sebagai imbas dari tindakan, menyingkirkan pilihan dengan tingkat reputasi yang rendah, serta membuat keputusan terhadap cara dalam bertindak dengan tingkat optimalisasi yang diharapkan. Sentralisasi konsentrasi kepada tahap berpikir memberi imbas terhadap pembangunan teori interaksionisme simbolik.

Pandangan Dewey tidak persis sama dengan Mead. Dewey dihubungkan dengan pragmatisme nominalis, sedangkan Mead sendiri kepada realisme filosofis. Perspektif dari kalangan nominalis memiliki anggapan sekalipun terdapat fenomena pada aras makro tetapi kondisi demikian tidaklah menjadi imbas sehingga menjadi pertimbangan utama atas perilaku individu maupun kepada kesadaran. Sebaliknya, pada perspektif realisme sosial di mana memberikan konsentrasi perhatian kepada masyarakat tentang teknik pembentukannya,

dan kemudian hal yang dilakukan olehnya dalam mengendalikan mekanisme mental yang bersifat individual. Blumer adalah tokoh kunci interaksionisme simbolik yang terpengaruh oleh pandangan nominalis, meskipun menyatakan dirinya penganut Meadian. Sedangkan Mead terpisah dan lebih jauh mengembangkan perspektif interaksionisme simbolik dalam konteks behaviorisme psikologis. Mead dan Blumer adalah dua tokoh utama interaksionisme simbolik, namun perspektif teorinya berbeda. Dapat juga dicatat bahwa teori ini melahirkan dua aliran utama, yaitu aliran Iowa yang lebih positivistik dan naturalis (diwakili oleh Kuhn) dan aliran Chicago yang humanistis dan interpretatif (diwakili oleh Mead dan Blumer).

C. Konsep-Konsep yang Dibangun

Menurut Ritzer (1992, p. 59), dari berbagai pemikiran ilmu-ilmu sosial, teori interaksionisme simbolik menjadi teori dengan tingkat kesulitan tertinggi untuk dapat mencapai kesimpulan. Teori ini sendiri bersumber dari bermacam asal namun banyak sumber yang berkontribusi membuat pernyataan jamak serta tersisa satu yang membuat pernyataan tunggal, berupa gagasan tentang konsep yang mendasari teori ini memiliki sifat kontradiktif dengan behaviorisme radikal dari J.B. Watson dengan pendirian di mana tingkah laku individu memiliki kesempatan untuk diobservasi dari luar melalui rangsangan serta umpan balik. Sebagaimana akan diuraikan, gagasan utama interaksionisme simbolik apakah itu yang diusung Mead ataupun Blumer adalah bermula dari pandangan kontradiktif ini serta selalu memberikan perhatian atas kemampuan manusia dalam berpikir.

Prinsip utama dalam interaksionime simbolik adalah bersumber dari gagasan Mead yakni: aksentuasi sosial, aksi, gestur, atribut-atribut signifikan, diri, masyarakat, pemikiran, manusia normal pada biasanya, dan ikut berperan serta. Juga yang bersumber atas gagasan Blumer berupa: konsep pandang atas diri pribadi, konsep bertingkah laku, konsep atas objek,

konsep kontak dan berkomunikasi, serta konsep perilaku yang dilihat dan dapat dipahami oleh banyak orang (lihat Veeger, 1993, pp. 222-227). Selain konsep tersebut, di dalam teori yang disuguhkan ini juga familiar gagasan berupa kapasitas dalam berpikir, berpikir serta melakukan interaksi, pembelajaran atas makna serta simbol, tindakan dan interaksi, dan terakhir tentang menentukan pilihan (lihat Ritzer & Goodman, 2011, pp. 289-294). Konsep ini tidak selalu dimengerti dapat berdiri secara tunggal tetapi ia saling berhubungan satu dengan lainnya dalam penyusunan propisisi ataupun asumsi atas tingkah laku, manusia, dan juga masyarakat. Keterhubungan konsep itu, secara garis besarnya, akan diuraikan berikut ini.

Menurut Ritzer & Goodman (2011, p. 271), pereferensi yang paling mendasar dari teori Mead sejatinya menempatkan kehidupan sosial sebagai prioritas, di mana individu melakukan proses berpikir dengan tidak adanya kemungkinan secara logis dengan tidak diawali kehadiran grup sosial. Pada studi pengalaman sosial ketika Mead menganalisis perilaku pada konteks perspektif behavior – stimulus – response – tetapi tidak dalam pengertian umpan balik dari manusia tanpa melalui proses pikir. Mead mengenali terdapat empat basis atau tahapan atas tindakan yang berhubungan satu sama lain, yakni (1) dorongan hati atau *impuls*; (2) persepsi atau *perception*; (3) manipulasi atau *manipulation*; serta (4) konsumsi atau *consummation*. Tindakan sosial yang mengikutsertakan dua orang ataupun lebih. Sebagaimana dikemukakan oleh Mead bahwa gerak ataupun isyarat merupakan sebuah mekanisme di dalam tindakan sosial; yang bertindak sebagai umpan demi menghasilkan tanggapan balik secara sosial; dan terdapat penggunaan simbol atau tanda secara nyata dan signifikan.

Simbol yang signifikan merupakan jenis gerakan sebagai isyarat yang kepemilikannya lekat kepada manusia, utamanya ketika dipakai dalam berkomunikasi di kehidupan bermsyarakat. Bahasa merupakan salah satu signifikan yang nyata dan menempati posisi paling penting di mana pemanfaatannya membuat pembedaan yang nyata antara

manusia dengan hewan. Sehingga, isyarat suara menjadi yang paling berkemungkinan mewujud simbol ialah bahasa. Hal demikianlah yang disampaikan dalam interaksi, isyarat, serta makna yang terkandung di dalamnya (simbol signifikan). Fungsi atasnya seperti mendatangkan pengaruh respon orang-orang yang berkomunikasi di dalam interaksi. Melalui hal tersebut menempatkan simbol signifikan memiliki peluang menjalin interaksi secara simbolik di mana orang akan mampu untuk melakukan interaksi satu sama lain lebih dari sekedar isyarat yang meluas melalui penggunaan simbol signifikan.

Berikutnya studi Mead terhadap *mind* atau pikiran di mana didefiniskannya sebagai proses bercakap manusia kepada dirinya sendiri. Pikiran merupakan fenomena secara sosial. Pikiran itu hadri lalu mengalami perkembangan di dalam proses secara sosial. Menurut Veeger (1993, p. 222), pikiran manusia menerjemahkan serta memaknai pengalaman yang dirasakannya serta benda-benda, menjelaskan asal serta usulnya, lalu kemudian membuar prakiraan untuk masa depan. Pikiran menembus luar dunia lalu mengidentifikasi di balik tampilannya. Ia menyeruak ke dalam diri sendiri serta menempatkan kehidupan pribadi sebagai sebuah objek identifikasi yang dikenal dengan sebutan "aku" atau sebutan "diri" . "Diri dan aku" memiliki tanda serta kedudukan, seperti, bila diselidiki asalnya siapa dia,sehingga akan mendapat jawab bahwa ia memiliki nama panggilan, berjenis kelamin laki-laki, status dalam rumah tangga sebagai suami, memiliki kewarganegaraan, umat yang beragama, berprofesi polisi, atau seorang politikus, atau pengajar di kampus sebagai dosen, atau sebagai mahasiswa pembelajar di perguruan tinggi, dan begitu seterusnya. Pikiran merupakan satu kesatuan dari tingkah laku manusia dan membangun hubungan dengan dunia luarnya. Sehingga pikiran dan diri berawal dari proses-proses interaksi.

"Berpikir" merupakan hasil interaksi antara "diri" pribadi orang yang melakukannya dengan orang yang lainnya di ruang situasi kehidupan sosial. Oleh karena kegiatan berpikir mudah dipahami sebagai bagian akhir dari pembatinan serta tahap

pembangunan hubungan bersama orang yang lainnya baik itu berupa perilaku yang dilakukan oleh diri sendiri hingga perilaku yang dilakukan oleh orang lain secara konsekuen disesuaikan – dipadu padankan dengan pemaknaan atas karakter tertentu. Pada posisi ini urgensi konsep kepemilikan peran. Sebelum individu menginisiasi perilaku, mereka mengalami proses mental di mana mereka menempatkan diri mereka dalam peran orang lain, berupaya memahami tuntutan sosial yang mungkin diharapkan dari orang tersebut. Hanya melalui harmonisasi atau sinkronisasi dengan ekspektasi sosial orang yang lainnya, interaksi sosial dapat memiliki kemungkinan untuk terjadi. Pada tahap dari akhir proses demikian, Mead mempergunakan konsep orang lain yang menjalani proses generalisasi untuk menggambarkan entitas sosial yang merepresentasikan pandangan umum masyarakat terkait nilai serta norma yang berlaku.

Berikutnya yakni gagasan konseptual yang diperkenalkan oleh Mead telah menginspirasi pengembangan lebih lanjut oleh Herbert Blumer. Seperti halnya Mead, Blumer juga menekankan pentingnya konsep diri, tindakan, dan interaksi sosial dalam analisisnya. Namun, salah satu konsep yang membedakan pandangan Blumer dari Mead adalah pengenalan konsep objek dan tindakan bersama (joint action). Menurut perspektif Herbert Blumer, manusia menghuni dunia yang dikelilingi oleh berbagai objek. Blumer mendefinisikan objek sebagai segala sesuatu yang menarik perhatian aktif manusia, baik itu berwujud fisik seperti kursi dan gedung, maupun konsep abstrak atau khayalan seperti kebebasan dan demokrasi. Bagi Blumer, esensi dari sebuah objek tidak terletak pada karakteristik intrinsiknya, melainkan ditentukan oleh minat individu serta makna atau simbol yang dipasang pada objek tersebut. Sebagai contoh, sebuah kursi bisa diinterpretasikan sebagai tempat untuk duduk, tetapi bagi seseorang yang tidak mengenal kursi, ia juga bisa diartikan sebagai alat untuk menghantam kepala.

Pentingnya konsep "joint action" (aksi bersama) dalam pandangan Blumer juga mencolok. Ia menggantikan istilah "social act" yang digunakan oleh Mead dan mengedepankan ide bahwa tindakan kolektif yang lahir melibatkan keseluruhan interaksi antara individu yang terlibat (peserta). Artinya, realitas sosial yang kita alami dibentuk melalui proses joint action ini, di mana perbuatan individu-individu yang berinteraksi dipadukan dan diselaraskan satu sama lain. Inilah yang menjadi objek utama dalam kajian sosiologi sesungguhnya menurut Blumer. (Veeger, 1993, p. 226).

D. Postulat Fundamental atas Individu dan Masyarakat

Menurut Ritzer & Goodman (2011, p. 289), Anda telah merangkum dengan baik prinsip dasar teori interaksionisme simbolik seperti yang dikembangkan oleh Blumer dan para penganutnya. Dalam rangkuman tersebut, terdapat tujuh poin utama yang menggambarkan esensi teori ini:

1. Kemampuan berpikir manusia, manusia memiliki kemampuan unik untuk berpikir, yang membedakan mereka dari binatang.
2. Pembentukan kemampuan berpikir melalui interaksi sosial: kemampuan berpikir manusia terbentuk atas hasil dari interaksi sosial yang dilakukan bersama orang lain.
3. Pentingnya arti dan simbol, di mana dalam proses interaksi sosial yang terbangun, manusia melakukan proses belajar demi memahami pengertian atas simbol maupun arti yang dapat ditelisik melalui kemampuan berpikirnya yang istimewa.
4. Arti serta simbol di dalam aksi dan juga interaksi, yang membuat kesempatan bagi manusia dalam menjaga konsistensi tindakannya secara khusus dalam melakukan interaksi sosial.
5. Fleksibilitas dalam mengarahkan makna dan simbol dari arti yang dipahami pada umumnya berhubungan dengan aksi dan hubungan atas pengertian kepada situasi.

6. Kemampuan menghasilkan keputusan serta perbedaan, di mana manusia mampu menghasilkan kebijakan beserta variasinya atas dan perubahan dalam tindakan mereka, sebagian disebabkan oleh kemahirannya dalam berkomunikasi dengan dirinya seorang diri, yang membuka mereka untuk mengevaluasi peluang berupa aksi dan kemudian melakukan pemilihan di antara mereka.
7. Pembentukan kelompok dan masyarakat, manusia membentuk bentuk tertentu atas aksi dan komunikasi dengan keterkaitan yang erat demi mewujudkan grup dan entitas sosial yang lebih berkembang.

Penjelasan ini memberikan gambaran tentang bagaimana teori interaksionisme simbolik menekankan pentingnya interaksi sosial, makna, dan simbol dalam membentuk pemahaman manusia tentang dirinya serta orang lain yang ada di sekeliling. Berdasar prinsip fundamental di atas, dapat disaksikan uraian aspek kunci dari interaksionisme simbolik berdasarkan prinsip dasar yang telah dijelaskan sebelumnya. Di mana terdapat poin-poin yang menyoroti sifat khas dari interaksi manusia dalam kerangka teori ini antara lain *pertama* menerjemahkan dan mendefinisikan tindakan di mana interaksionisme simbolik menekankan bahwa manusia saling menerjemahkan dan mendefinisikan tindakan yang dilakukan oleh mereka sendiri dan kepada orang lain. Hal ini dapat diartikan bahwa tindakan seseorang tidak memiliki makna baku atau tetap, melainkan mereka diberi arti dalam konteks interaksi sosial, *kedua* berupa penggunaan simbol dalam interaksi yang berlangsung antarindividu didasarkan pada penggunaan simbol-simbol. Simbol-simbol ini bisa berupa kata-kata, gestur, tanda-tanda, atau simbol lain yang digunakan dalam komunikasi. Mereka membantu dalam proses memahami dan menyampaikan makna. *Ketiga* yakni proses interpretasi yang terjadi dalam interaksi sosial, setiap individu terlibat dalam proses interpretasi, mereka mencoba untuk memahami dan mengartikan apa yang dimaksud oleh tindakan dan komunikasi

orang lain. Proses ini melibatkan kemampuan berpikir dan memahami maksud di balik tindakan tersebut. *Keempat* yakni kemampuan berpikir sebagai ciri khas manusia di mana kemampuan untuk berpikir dan proses interpretasi adalah ciri khas yang dimiliki manusia. Ini memungkinkan mereka untuk mengadopsi peran sosial yang berbeda, memahami norma sosial, dan menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan konteks yang berubah. Dengan demikian, interaksionisme simbolik mengakui bahwa interaksi antarmanusia adalah proses yang dinamis dan kompleks, di mana individu saling berusaha untuk memahami dan memberi makna kepada tindakan satu sama lain. Ini mencerminkan betapa pentingnya konsep makna, simbol, dan interpretasi dalam memahami interaksi sosial manusia. (Ritzer, 1992, p. 61). Proses interpretasi ini berfungsi sebagai penengah yang menghubungkan aktor manusia dengan simbol-simbol yang mereka hadapi dalam lingkungan sosial mereka. Hal ini menghasilkan pemahaman, penilaian, dan pemberian makna terhadap simbol-simbol tersebut. Dalam konteks ini, manusia dianggap layaknya aktor dengan tingkat kesadaran yang memiliki kemampuan reflektif. Mereka memiliki kemampuan untuk menghubungkan objek-objek dalam lingkungan mereka melalui konsep dari Herbert Blumer yang disebut indikasi diri. Indikasi diri merupakan proses berlangsungnya komunikasi secara internal ketika individu mengidentifikasi yang diketahuinya, mengevaluasinya, memberikan penafsiran, hingga akhirnya membuat keputusan dalam bertindak yang kesemuanya benar-benar berdasarkan makna yang diberikan pada objek atau situasi tersebut. Dengan demikian, *self indication* mencerminkan kemampuan manusia untuk tidak hanya merespons simbol-simbol eksternal, tetapi juga untuk menginternalisasi dan menginterpretasikannya dalam konteks kehidupan mereka sendiri. Ini menyoroti kompleksitas tingkat pemikiran dan refleksi yang menjadi bagian integral dari interaksi sosial dan proses pembentukan makna dalam teori interaksionisme simbolik (Poloma, 2004, p. 261).

Dalam interaksionisme simbolik, fakta sosial dan perilaku manusia dilekatkan kepada konteks simbolik atas proses interaksi sosial manusia. Hal demikian memiliki arti bahwa fakta sosial seperti norma, nilai, dan struktur sosial, tidak dianggap sebagai entitas yang eksis secara independen atau sebagai "barang sesuatu" yang mengatur aksi manusia. Sebaliknya fakta sosial diinterpretasikan sebagai hasil dari interaksi manusia yang memberikan makna pada simbol-simbol sosial ini. Bagi interaksionisme simbolik, fakta sosial adalah produk dari tindakan manusia yang bermakna melalui simbol-simbol, dan makna ini diberikan oleh individu dalam konteks situasi mereka.

Dalam hal ini, interaksionisme simbolik menekankan pentingnya individu dalam membentuk dan mengubah realitas sosial. Mereka memiliki kontradiksi pandangan atas fakta sosial serta perilaku sosial sebagai sesuatu yang ada di luar individu dan memaksa tindakan mereka. Sebaliknya, mereka melihat individu sebagai aktor yang aktif dalam proses sosial dan sebagai pemberi makna pada simbol-simbol sosial.

Fungsionalisme struktural, di sisi lain, cenderung melihat fakta sosial sebagai struktur sosial yang independen dan memandang masyarakat sebagai sistem yang memengaruhi tindakan individu. Dalam pandangan fungsionalisme, fakta sosial memiliki fungsi dan tujuan dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan dalam masyarakat. Jadi, perbedaan mendasar ini mencakup sudut pandang tentang peran individu dalam membentuk fakta sosial dan makna yang diberikan pada simbol-simbol sosial dalam konteks interaksi sosial.

Bagaimana proses kehidupan sosial atau masyarakat berlangsung sesuai dengan kerangka teori interaksionisme simbolik. Berikut adalah beberapa pandangan yang diutarakan. Menurut Ritzer & Goodman (2011, p. 287), Mead menggunakan terminologi "masyarakat" (society) demi merujuk kepada proses sosial yang terus berjalan, yang berada di luar pikiran dan perasaan individu. Dalam perspektif ini, masyarakat memiliki peran dalam membentuk pemikiran dan perasaan individu (proses berpikir). Di tingkat yang lebih dalam, masyarakat

dipandang sebagai kumpulan respons terorganisasi yang kemudian diinternalisasi oleh individu melalui konsep "aku". Dalam pandangan individu, masyarakat memiliki pengaruh pada mereka dan memberikan kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri melalui refleksi diri.

Pada tempat yang lain, Ritzer (1992, p. 62) secara sederhana meringkas pandangan interaksionisme simbolik tentang kehidupan sosial masyarakat, bahwa individu yang dapat diartikan sebagai unit tindakan adalah terdiri atas sekelompok orang dengan karakter tertentu yang saling membuat penyesuaian ataupun membangun keselarasan tindakan di antara mereka dengan mempergunakan proses pemaknaan. Ketika para aktor masih berada dalam formasi grup, maka perilaku yang diambil oleh grup tersebut sebagai hasil dari tindakan bersama atas individu yang menjadi bagian dari grup tersebut. Oleh karena itu, dalam teori interaksionisme simbolik, istilah pemaknaan atau interpretasi, interaksi, serta individual menjadi tiga konsep utama yang digunakan dalam menyelami kehidupan masyarakat sehari-hari.

Pendapat Veeger (1993, p. 228) juga mengulas bahwa Interaksionisme simbolik menggambarkan masyarakat dengan cara yang berbeda daripada memakai konsep seperti nilai-nilai sosial, dan norma-norma, pola budaya, struktur institusional, pelapisan sosial, peranan sosial, posisi status, struktur sosial, dan sistem. Sebaliknya, dalam kerangka ini, masyarakat digambarkan melalui istilah "aksi" atau "tindakan." Organisasi, masyarakat, ataupun kelompok terdiri atas dari individu yang diperhadapkan pada berbagai model situasi serta masalah dengan tingkat kerumitan yang beragam. Baik situasi maupun masalah ini memerlukan penanganan atau solusi. Oleh karena itu, tindakan bersama harus dirancang. Ini memmberikan proyeksi atas masyarakat secara dinamis, selalu menyesuaikan kepada zaman, serta berada dalam keragaman. Individu melakukan hubungan dan menyesuaikan perilaku mereka satu sama lain melalui interaksi timbal-balik, bukan hanya mengikuti

kebudayaan dan struktur sosial, tetapi hanya memberikan kondisi-kondisi bagi tindakan mereka, bukan menentukannya.

E. Metode dan Peluang Aplikasi

Interaksionisme simbolik tidak hanya suatu konstruksi teori sosial, tetapi juga sebuah strategi penelitian, terutama bagi penelitian yang bersifat fenomenologi maupun etnometodologi. Interaksionisme simbolik mengoperasikan asumsi bahwa hasil belajar manusia sangatlah ditentukan melalui usaha pemaknaan. Peristiwa, situasi, individu, objek tidak memiliki makna inheren atau bawaan dalam diri mereka sendiri; sebaliknya, makna diberikan kepada mereka melalui interpretasi manusia. Pengertian yang diberikan oleh individu terhadap pengalaman mereka, serta proses penafsiran itu sendiri, dianggap sebagai unsur esensial dan menentukan dalam membentuk pemahaman dan pengalaman manusia. Hal ini bukanlah kebetulan, tetapi merupakan bagian integral dari cara individu memandang dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka dalam kerangka interaksionisme simbolik.. Oleh karena itu, metode verstehen, yakni pengertian interpretaif terhadap pemahaman manusia (Moleong, 1995, p. 9), adalah penting untuk memahami perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

Penting sekali untuk memahami cara manusia mendefinisikan sesuatu dan proses definisinya agar kita dapat memahami perilaku mereka. Manusia aktif terlibat dalam penciptaan realitas mereka sendiri. Tindakan manusia dipengaruhi oleh cara mereka menafsirkan dunia melalui penggunaan simbol-simbol yang tersebar luas dalam kehidupan sosial. Karena itu, untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia, peneliti harus secara aktif terlibat dalam proses pendefinisian yang dilakukan oleh individu tersebut. Metode observasi dan wawancara mendalam dapat menjadi alat yang efektif dalam upaya ini.

Menurut Ritzer (1992, p. 74), Ada empat jenis pengamatan berperan yang dapat diterapkan dalam penelitian mengenai fenomena interaksi simbolik. Pertama, ada "participant observation," di mana peneliti berperan sebagai anggota kelompok yang diamati tanpa memberi tahu mereka tentang maksud atau kehadiran peneliti. Kedua, "participant as observer," di mana peneliti memberi tahu kelompok yang diamati tentang maksud dan kehadirannya sebagai peneliti. Ketiga, "observer as participant," di mana pengamatan hanya terjadi dalam satu kunjungan singkat dan perlu perencanaan sebelumnya. Terakhir, "complete observer," di mana peneliti tidak berpartisipasi dalam kelompok yang diamati dan tetap sebagai pengamat eksternal yang tidak dikenal oleh subjek yang diamati. Dalam penelitian interaksionisme simbolik, metode-metode ini digunakan untuk memahami makna dan interpretasi individu dalam konteks kehidupan sehari-hari dan biasanya melibatkan pendekatan kualitatif dalam penelitian.

F. Penutup

Teori interaksionisme simbolik merupakan kerangka kerja teoritis yang berfokus pada pemahaman tentang bagaimana individu membentuk identitas sosial mereka melalui interaksi dengan orang lain melalui bahasa dan simbol. Beberapa poin pembahasan penting di antaranya (1) pentingnya bahasa dan simbol dalam interaksi sosial. Ia berpendapat bahwa manusia menggunakan bahasa untuk memberi makna pada pengalaman mereka dan berkomunikasi dengan orang lain. Simbol-simbol ini menciptakan realitas sosial bersama, (2) memperkenalkan konsep diri (self-concept) sebagai bagian penting dalam teorinya. Ia menjelaskan bahwa proses interaksi dengan orang lain berperan penting dalam perkembangan konsep diri seseorang. Individu membentuk pandangan tentang diri mereka sendiri berdasarkan respons orang lain terhadap tindakan dan perilaku mereka, (3) menyatakan bahwa interaksi sosial melibatkan siklus tindakan dan respon. Individu bertindak, dan tindakan mereka direspon oleh orang lain. Proses

ini membantu membentuk perilaku dan identitas sosial individu, (4) penegasan vitalnya sosialisasi dalam membentuk individu. Melalui interaksi dengan orang lain, individu memahami norma, nilai, dan aturan sosial yang membentuk perilaku mereka, (5) identitas individu tidak tetap dan bisa berubah seiring waktu. Perubahan dalam interaksi sosial dan pengalaman individu dapat mempengaruhi bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri, (6) menyoroti peran masyarakat dalam membentuk individu. Masyarakat dan budaya memberikan konteks bagi interaksi sosial, dan individu memainkan peran dalam pengembangan dan pemeliharaan struktur sosial.

Dengan demikian, penutup dari teori interaksionisme simbolik George Herbert Mead adalah penekanan pada pentingnya interaksi sosial, bahasa, simbol, dan proses sosialisasi dalam membentuk identitas dan perilaku individu. Teori ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana manusia memahami diri mereka sendiri dan lingkungan sosial mereka melalui interaksi sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Johnson, D. (1992). *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern Jilid 2.* Jakarta (ID): Gramedia.

Moleong, L. (1995). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung (ID): Remaja Rosdakarya.

Poloma, M. (2004). *Sosiologi Kontemporer.* Jakarta (ID): Rajawali Pers.

Ritzer, G. (1992). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda.* Jakarta (ID): Rajawali Pers.

Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern.* Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar.

Ritzer, G., & Goodman, D. (2011). *Teori Sosiologi Modern.* Jakarta (ID): Kendana Prenada MEdia Group.

Ritzer, G., & Smart, B. (2011). *Handbook Teori Sosial.* Bandung (ID): Nusa Media.

Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar.* Jakarta (ID): Rajawali Pers.

Sunarto, K. (2004). *Pengantar Sosiologi.* Jakarta (ID): Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Veeger, K. (1993). *Realitas Sosial Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu - Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi.* Jakarta (ID): Gramedia.

TENTANG PENULIS

Andi Tenri. Lahir di Parepare 31 Desember 1965. Setelah lulus SMP di Sidrap 1982 dan SMA di Parepare 1985, kemudian menamatkan pendidikan S1 Pendidikan Sejarah di IKIP Ujung Pandang 1990, S2 Sosiologi-Antropologi di Universitas Padjadjaran 1998, dan S3 Sosiologi di Universitas Negeri Makassar 2011. Diangkat sebagai dosen LLDIKTI (sebelumnya Kopertis) Wilayah IX Sulawesi pada 1991 di Universitas Dayanu Ikhsanuddin (Unidayan) Baubau, kini berpangkat akademik Lektor Kepala, Pembina Utama Muda Golongan IV.c. Jabatan struktural sekarang adalah Direktur Program Pascasarjana Universitas Dayanu Ikhsanuddin (2023-sekarang).

Penulis telah banyak menerbitkan karya ilmiah berupa jurnal nasional dan internasional, buku, serta proseding paper seminar baik di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional. Publikasi karya ilniah buku antara lain: *Perlawanan terhadap Negara; Dramaturgi Sehari-hari di Balik Pengelolaan Hutan* (Orbit Publishing, Jakarta, 2012); *Dinamika Tanah Wolio; Sejarah, Kontinuitas, dan Perubahan* (Fahmis Pustaka, Makassar, 2014); *Kebudayaan Buton* (Bappeda Baubau-Optimal Nusa Engineering-Identitas Unhas, 2015); *Tradisi dan Ritual Etnik Buton* (Pena Indis, Makassar, 2018); *Pendidikan Karakter Antikorupsi dalam Kearifan Buton* (UHO Press, Kendari, 2020). *Sosiologi Lingkungan: Memaknai Entitas Manusia dan Lingkungan*. Penerbit Tahta Media Group, Surakarta, 2022); *Kearifan Lokal dan Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir di Buton.* (Nashir Al Kutub Indonesia, Lombok Barat, 2023). Penulis kini beralamat di Jalan Sapati Manjawari 09 Baubau 93724. Mobile/WA 081355351965, Email: anditenri@unidayan.ac.id

BAB 6

TEORI AGEN STRUKTUR ANTHONY GIDDENS

Oleh : Kuflia Muak Hara

A. Latar Belakang Intelektual Anthony Giddens

Dalam bab ini, kita akan menjelajahi konsep-konsep inti yang menjadi dasar dari Teori Agen Struktur yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Namun, untuk memahami esensi teori ini, penting bagi kita untuk memahami latar belakang Giddens yang membentuk pandangan dan kontribusinya dalam dunia sosiologi.

Lahir pada tahun 1938 di London, Inggris, dan menempuh Pendidikan di *University of Hull dan London School of Economics*. Disini pula, Giddens membekali pemahaman mendalam tentang pemikiran klasik sosiologi dan juga juga tumbuh dalam periode perubahan sosial yang signifikan sehingga mengilhami pemikiran kritisnya tentang masyarakat modern.

Beberapa peristiwa kompleksitas sosial politik tersebut antara lain, jatuhnya Komunisme di beberapa bagian dunia pada tahun 1989 mengakibatkan perubahan besar dalam tatanan geopolitik global, dan menciptakan ruang untuk perdebatan tentang arah yang akan diambil oleh masyarakat modern pasca-Perang Dingin. Runtuhnya Uni Soviet dan munculnya negara – negara kecil di sekitarnya, pemisahan Quebec dari Kanada, konflik di Timur Tengah mengajukan pertanyaan tentang nasionalisme baru dan stabilitas negara moderen, disaat yang sama belahan barat menunjukan solidaritas regionalisme Uni Eropa sehingga memantik Giddens pada pertanyaan peran negara dalam konteks global yang semakin berubah (Meštrović,

2005: p.14). Giddens juga merenungkan dampak globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang mempengaruhi cara manusia berinteraksi, merobek batas-batas ruang dan waktu sehingga memungkinkan membentuk struktur sosial yang lebih kompleks (Giddens, 1990: p.64). Semua peristiwa ini memainkan peran penting dalam membentuk perspektif Giddens tentang bagaimana masyarakat dan individu berinteraksi dalam era modern yang berubah dengan cepat.

Anthony Giddens dikenal atas kontribusinya terhadap teori strukturasi yang menekankan interaksi dinamis antara agen (individu) dan struktur (konteks sosial) dalam membentuk perilaku manusia dan masyarakat. Dalam pemikirannya, Giddens menekankan bahwa agen (individu) dan struktur (konteks sosial) saling terkait dan saling mempengaruhi. Individu tidak hanya dipengaruhi oleh struktur sosial, tetapi juga memiliki kemampuan untuk membentuk struktur tersebut melalui tindakan mereka. Pemikiran Giddens tentang Teori Strukturasi menjadi relevan dalam menggambarkan bagaimana individu dalam masyarakat modern dapat mempengaruhi dan membentuk struktur sosial, dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan dalam lingkungan yang cepat berubah.

Proyek teoritis sosial Giddens dimulai dari upaya pemeriksaan ulang teori – teori sosiologi moderen melalui buku pertamanya, "*Capitalism and Modern Social Theory*". Mengklaim bahwa teori-teori lama, merujuk pada pemikiran *Marx, Durkheim, dan Max Weber,* tidak cukup untuk menjelaskan masyarakat modern yang rumit (Giddens, 1971: p.Vii). Ada penemuan masalah mendasar dalam teorema sosiologi dalam kita memandang masyarakat, dimana sosiologi moderen awal terlalu fokus pada aktor individu dan tindakan mereka, sehingga gagal menjelaskan keberadaan institusi sosial. Di sisi lain, mengkritik teori – teori yang terlalu menekankan struktur sosial dan mengabaikan kemungkinan tindakan individu (Meštrović 2005: p. 18-19). Motif ekletisme yang dilakukan Giddens terhadap pendahulunya, tidak lain karena ingin menghindari determinasi dari masing – masing pandangan

fungsionalisme, strukturalisme, dan hermeneutika dalam kajian ilmu sosial. Misalnya, hermeneutika memberikan dominasi pada subjektivitas individu, sedangkan fungsionalisme dan strukturalisme memberikan dominasi pada struktur sosial. Giddens berusaha untuk menyatukan pandangan ini dengan mengembangkan konsep-konsep baru yang dapat menjembatani perbedaan antara individu dan sistem sosial masyarakat, serta memahami keterkaitan kompleks antara aksi individu dan struktur sosial dalam masyarakat modern.

Sekarang, mari kita perjelas pembahasan inti dalam teori ini. Teori Strukturasi melibatkan pemahaman mendalam tentang dua komponen penting yaitu agen dan struktur. Agen merujuk pada kemampuan individu untuk bertindak, membuat pilihan, dan berinteraksi dalam lingkungan sosial, bahkan dalam lingkungan yang memiliki faktor-faktor deterministik yang kuat (Appelbaum, 2013: p.10). Sedangkan struktur merujuk pada pola atau kerangka yang ada dalam masyarakat meliputi norma-norma, nilai-nilai, peran sosial, hierarki, kelas sosial, dan elemen-elemen lain yang membentuk dasar organisasi sosial (Giddens, 2005: p.119). Hubungan agen dan struktur adalah hubungan yang saling memengaruhi dimana Agen tidak hanya tunduk pada struktur sosial, tetapi juga memiliki peran dalam membentuknya. Konsep struktur ini menggambarkan bagaimana semua faktor ini bekerja bersama-sama untuk membentuk lingkungan sosial di mana individu berinteraksi dan menjalani hidupnya. Dengan kata lain, struktur menciptakan landasan atau pola di dalam masyarakat yang memengaruhi bagaimana orang hidup dan berinteraksi. Lebih jauh, Giddens melihat individu sebagai "agen-agen struktural" yang aktif dalam membentuk dan mempertahankan struktur sosial. Proses ini dijelaskan dalam konsep reflektivitas yaitu, kemampuan individu untuk merenungkan tindakan mereka dan memahami dampaknya pada struktur sosial. Dengan reflektivitas, individu dapat sadar memicu transformasi sosial yang diinginkan, mengubah norma dan institusi yang tidak lagi relevan atau bermanfaat.

Dalam rangkaian konsep ini, Teori Agen Struktur memberikan kerangka yang revolusioner dalam memahami hubungan antara agen dan struktur dalam masyarakat, dibandingkan pendahulunya. Bahwa Durkheim fokus pada peran struktur dalam membentuk perilaku, ekspresi budaya dan integrasi sosial (Schneider 2007: p.1-2); Weber mengimbangi pengaruh struktur sosial dengan mempertimbangkan motivasi individu dan pemahaman subjektif dalam menganalisis tindakan sosial (Martin, 2003: p.163); dan Marx menekankan determinasi struktur ekonomi terhadap seluruh aspek ideasional dan formasi masyarakat.

Melalui pemahaman ini, kita dapat membuka pintu menuju interpretasi yang lebih dinamis tentang interaksi manusia, perubahan sosial, dan evolusi masyarakat modern. Pada intinya, teori ini berfokus pada hubungan yang kompleks antara "agen" (individu dengan kemampuan bertindak) dan "struktur" (kerangka sosial seperti norma, nilai, dan institusi) yang tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan saling berinteraksi dan membentuk masyarakat secara bersamaan. Agen bertindak dalam kerangka struktur, sementara struktur juga dipengaruhi oleh tindakan agen. Singkatnya, teori Agen Struktur memiliki arti penting dalam memahami bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka dan bagaimana perubahan sosial terjadi dalam masyarakat.

B. Konsep Agen dan Struktur

Sebagaimana dalam pengertian sebelumnya, Agen merujuk pada kehendak otonom individu untuk bertindak, membuat keputusan, dan berperilaku secara aktif dan memberikan makna pada interaksi sosial. Struktur mengacu pada unsur-unsur yang membentuk kerangka atau aspek ideasional atau formasi masyarakat (norma, nilai-nilai, dan institusi sosial, menciptakan pola-pola yang mengatur interaksi). Agen memiliki kebebasan untuk bertindak, tetapi tindakan mereka selalu terkait dengan norma-norma dan institusi-institusi yang membentuk struktur sosial. Hubungan dinamis ini

membentuk dasar analisis sosiologis tentang bagaimana individu dan masyarakat berinteraksi dan berperan dalam membentuk dunia sosial mereka.

Bagaimana kemudian tindakan bebas Agen dalam ruang –ruang struktur sosial yang membatas?. Dasar konsep tentang Agensi, Giddens, ini menekankan bahwa tindakan agen tidak selalu terbatas oleh struktur sosial atau kondisi lingkungan, tetapi juga melibatkan pilihan dan tindakan yang sadar (Giddens, 1984:p.4).

Konsep tindakan Agen didasari oleh tiga konsep utama yaitu motivasi tindakan, rasionalisasi tindakan, dan pemantauan refleksi tindakan. Motivasi mendorong agen untuk bertindak, baik dalam mencapai tujuan pribadi maupun menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan. Ketika tindakan dilakukan, agen aktif terlibat dalam monitoring refleksif tindakan, mengkaji secara mendalam alasan di balik tindakan tersebut serta dampaknya dan lingkungan sekitar. Langkah berikutnya adalah rasionalisasi tindakan, di mana agen memberikan justifikasi yang masuk akal atas keputusan yang diambil, membantunya mengatasi ketidaksesuaian antara tindakan dan hasil yang muncul. Tidak hanya itu, motivasi terus memainkan peran penting dalam setiap tahapan, mendorong agen untuk memantau lebih teliti, merasionalisasikan dengan cerdas, dan tetap berpegang pada tujuan mereka. Melalui keterkaitan yang erat antara ketiga konsep ini, agen membentuk siklus yang memungkinkan mereka mengambil tindakan yang penuh kesadaran, mengerti dampaknya, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan nilai-nilai pribadi (Giddens, 1984: p.6-7).

Asumsi dasar yang membedakan gagasan hubungan struktur dan agen dari para pendahulu Giddens adalah dimensi dualitas, rekursivitas, dan kesadaran dan reflektivitas. Hubungan agen dan struktur bersifat dualitas yang menunjukkan adanya interdependensi di antara keduanya (Giddens, 2005: p.125). Struktur sosial membantu mengarahkan dan memberi batasan pada cara kita bertindak, sementara agen,

atau diri kita sendiri, juga ikut membentuk atau bahkan mempertahankan struktur melalui cara kita berperilaku dalam masyarakat. Ini melampaui pandangan tradisional yang memisahkan antara determinisme struktural dan kebebasan individu.

Ada pandangan yang menyatakan bahwa kehidupan seseorang sangat dipengaruhi oleh kondisi awalnya, seperti latar belakang keluarga, gender, ras, dan kelas sosial. Namun, ini tidak berarti individu benar-benar terjebak atau dikendalikan sepenuhnya oleh faktor-faktor ini.

Contohnya, seorang perempuan dari keluarga pekerja. Orang tuanya memiliki keyakinan bahwa anak mereka hanya bisa bekerja setelah lulus SMA, seperti yang mereka lakukan. Namun, perempuan tersebut memiliki impian untuk kuliah dan menjadi pengacara. Pandangan deterministik akan mengatakan bahwa kesempatan hidupnya terbatas oleh latar belakangnya. Namun, Perempuan tersebut, meskipun memiliki hambatan ini, memutuskan untuk tetap mendaftar kuliah. Tindakan ini menunjukkan bahwa meskipun pengaruh faktor-faktor sosial, individu memiliki kemampuan untuk membuat keputusan dan mengubah nasibnya.

Dalam hal ini, ada hubungan yang kompleks antara faktor-faktor struktural, seperti latar belakang sosial, dan kemampuan individu untuk mengambil tindakan. Faktor struktural dapat memberikan batasan, tetapi individu juga memiliki peran dalam menentukan arah hidupnya. Jadi, meskipun faktor latar belakang sosial mempengaruhi, individu masih memiliki pengaruh dalam membentuk masa depan mereka.

Kotak Ilustrasi : Disadur dari **(Appelbaum, 2013: p.9-10)**

Dalam ilustrasi tersebut merupakan contoh sederhana peran Perempuan sebagai agen atau aktor yang sedang melakukan proses rekursif (*recursive*). Konsep rekursivitas menggambarkan bagaimana praktik-praktik manusia secara terus-menerus membentuk kembali elemen-elemen struktural, dan bukan generatif (Giddens, 1987: p.163). Ini bermaksud untuk mengatakan bahwa tindakan individu tidak hanya dipandu oleh struktur, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan ulang struktur tersebut. Dalam hal ini, masyarakat bukanlah entitas statis, tetapi lebih merupakan hasil dari interaksi dinamis antara agen dan lingkungan sosial. Kemampuan agensi dalam proses rekursif ini berangkat dari kondisi ontologis manusia antara lain; kemampuan untuk merenungkan tindakan, memahami konsekuensi dari tindakan tersebut, dan motivasi. Ini menunjukkan bahwa agen tidak hanya bertindak mekanis, tetapi juga secara aktif terlibat dalam proses sosial.

Refleksif mengacu pada kemampuan agen untuk merenungkan tindakan mereka dan memahami dampaknya dari dan terhadap struktur sosial yang lebih luas. Rasionalisasi menghubungkan tindakan dengan pemahaman manusia tentang tujuan dan pilihan mereka, sementara motivasi tindakan memengaruhi bagaimana agen bertindak berdasarkan dorongan dan tujuan pribadi (Giddens, 1987: p.171).

Dualitas ini memungkinkan untuk memahami bagaimana tindakan individu dan pola perilaku sosial membentuk dan mempengaruhi satu sama lain. Struktur memberikan kerangka yang membantu memahami norma dan nilai dalam masyarakat, sementara agen membawa ke dalam interaksi sosialnya interpretasi dan makna yang unik. Ini berarti bahwa tindakan individu tidak hanya dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada, tetapi juga memiliki dampak pada bagaimana struktur tersebut berkembang. Sebaliknya, struktur memberikan batasan dan panduan bagi tindakan individu, tetapi juga bisa berubah sebagai respons terhadap tindakan kolektif dan individu.

Gagasan ini mencoba mengatasi pemisahan antara agen dan struktur, dalam teori sosial sebelumnya, yang dipandang sebagai dua entitas terpisah. Landasan epistemik pemisahan agen dan struktur dapat dilacak dalam kritik Giddens terhadap saintifikasi ilmu sosial yang memengaruhi model generalisasi. Sosiologi kemudian didekatkan dengan pendekatan ilmu alam, khususnya biologi, dalam upaya untuk membuatnya lebih ilmiah dan terukur, mengidentifikasi generalisasi atau hukum-hukum ilmiah. Pendekatan ini menggunakan analogi ilmu biologi, dimana tubuh memilik struktur organisime, dan mengidentifikasi patologis yang disebabkan adanya disfungsi dalam organisme mahkluk hidup (Bernstein, 1990: p.21). Ini kemudian di diterapkan pada pada struktur masyarakat, di mana ia mempertimbangkan norma-norma sosial dan institusi sebagai komponen yang bisa "sehat" atau "tidak sehat" sewaktu-waktu.

Ada resiko dari paradigma semacam itu, jika berangkat dari konsep strukturasi Giddens, yaitu pemisahan yang berlebihan antara struktur masyarakat dan agen-individu, mengabaikan kompleksitas hubungan erat antara tindakan individu dan struktur sosial yang saling mempengaruhi melalui interaksi sosial sehari-hari. Penekanan pada generalisasi dan hukum-hukum ilmiah dalam sosiologi mungkin dianggap kurang mampu memahami dinamika interaksi sosial yang kaya dan bagaimana tindakan individu membentuk serta dipengaruhi oleh konteks sosial yang lebih luas dan tidak statis.

Memahami interaksi antara keduanya memungkinkan kita untuk memiliki pandangan yang lebih komprehensif tentang dinamika sosial. Kontribusi Giddens dalam konsep ini adalah kita dapat memilah analisis pada hubungan struktur dan agen sebagai tingkal analisis makro dan mikro (Lamsal, 2012: p.116). Ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimana tindakan individu di tingkat mikro tidak hanya dipengaruhi oleh faktor struktural di tingkat makro, tetapi juga bagaimana tindakan individu tersebut dapat berkontribusi terhadap pembentukan dan transformasi struktur sosial. Misalnya, ketika

kita memahami hubungan antara negara dan masyarakat (tingkat makro), kita tidak hanya melihat kebijakan dan keputusan pemerintah, tetapi juga bagaimana partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik (agen) dapat membentuk dan memengaruhi struktur kebijakan.

Untuk menguraikan hubungan kompleks antara agensi dan struktur dalam konteks sosial, Giddens juga membuka diskursus tentang hubungan struktur institusi dan kekuasaan. Dia menggambarkan bagaimana kekuasaan hadir dalam hubungan sosial dan bagaimana sumber daya dan sistem kontrol dapat berperan dalam membentuk interaksi serta reproduksi sosial di dalam masyarakat.

Kerangka dasar strukturasi membawa pengertian kekuasaan sebagai bagian integral dari agensi. Kekuasaan tidak hanya berkaitan dengan niat atau kemauan individu, tetapi juga dengan kemampuan untuk memengaruhi atau mengubah situasi melalui tindakan. Kekuasaan dalam konteks ini merujuk pada kapasitas untuk melakukan perubahan atau intervensi dalam lingkungan (Giddens, 2005: p.125). Dengan struktur sosial yang ada, individu memanfaatkan sistem untuk pelaksanaan tujuan kekuasaan dengan membuat keputusan-keputusan yang sah. Konsep ini mengatasi pemahaman sempit tentang kekuasaan sebagai hanya niat atau pengaruh langsung.

Kekuasaan dalam konteks sosial juga tidak hanya dipahami sebagai struktur dominasi, tetapi melibatkan hubungan yang kompleks antara para aktor atau kolektivitas. Kekuasaan dalam hal ini adalah bagian dari proses interaksi sosial dan dilakukan melalui penggunaan sumber daya yang terstruktur dalam sistem sosial (Giddens 2005: p.126). Tindakan individu dan kekuasaan memiliki hubungan yang erat dalam membentuk dinamika sosial. Agensi individu memungkinkan untuk bertindak dan memengaruhi situasi, sementara kekuasaan berfungsi sebagai alat untuk mengubah atau mempengaruhi situasi tersebut.

C. Strukturasi dan Interaksi Sosial

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa struktur adalah pola-pola yang teratur dalam interaksi sosial, norma-norma, aturan, dan kerangka kerja yang membimbing cara individu dan kelompok berperilaku di dalam masyarakat. Kemudian Giddens, membagi jenis – jenis struktur dalam sistem sosial yaitu penandaan (signification), legitimasi (legitimation), dan dominasi (domination) (Lamsal, 2012: p.114). Giddens ingin menjelaskan bagaimana pola-pola, norma-norma, dan kekuasaan dalam struktur sosial memainkan peran penting dalam membentuk cara kita berinteraksi satu sama lain. Dengan mengidentifikasi tiga jenis struktur - penandaan, legitimasi, dan dominasi - Giddens berusaha menjelaskan bagaimana makna dibentuk dalam komunikasi, bagaimana norma-norma moral diciptakan dan dipertahankan, serta bagaimana kekuasaan dan kontrol atas sumber daya memengaruhi hubungan sosial.

Penandaan (signification) menekankan bahwa interaksi manusia tidak hanya melibatkan kata-kata, tetapi juga menciptakan makna khusus melalui komunikasi. Dalam proses ini, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana interpretasi dan pembentukan makna (Stones, 2005:p.21). Makna ini tidak terlepas dari norma-norma sosial yang ada, yang membentuk landasan dari konsep legitimasi (legitimation). Norma-norma ini membantu mengatur perilaku dalam interaksi dan menjadi tatanan moral yang diterima dalam masyarakat.

Legitimasi disini ketika orang-orang menganggap bahwa peraturan, nilai-nilai, dan tindakan-tindakan yang berlaku di masyarakat adalah benar dan pantas diikuti. Ini tidak hanya karena ada paksaan atau kontrol, tetapi juga karena orang merasa hal itu wajar berdasarkan pada tata cara hidup mereka sehari-hari (Stones, 2005:p.20). Dalam membentuk legitimasi, ada beberapa hal yang penting untuk dipahami. Pertama, tindakan-tindakan yang kita lakukan tidak hanya mengikuti peraturan saja, tetapi juga membantu menjaga tatanan sosial yang ada. Kedua, orang-orang atau kelompok dalam masyarakat

memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan atau transformasi. Ketika kita berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain, kita sebenarnya saling mengerti dan memahami apa yang dimaksud. Bahasa dan cara kita berkomunikasi adalah bagian dari aturan-aturan sosial yang membantu menjaga kesepakatan bersama tentang apa yang benar dan pantas dilakukan (Stones, 2005: p.19).

Singkatnya, legitimasi sebenarnya terbentuk melalui cara kita saling berinteraksi, berkomunikasi, dan memahami nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Ini adalah cara kita semua sepakat tentang apa yang dianggap baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari kita. Legitimasi tidak hanya tentang paksaan atau kekuasaan, tetapi juga tentang pengakuan dan penerimaan atas aturan-aturan dan tindakan-tindakan sebagai bagian yang penting dari cara kita hidup bersama.

Konsep dominasi (*domination*) mengacu pada penggunaan kekuasaan dan kontrol atas sumber daya. Giddens menunjukkan bahwa dominasi dan ketundukan hadir dalam hubungan kekuasaan yang rumit, dimana sumber daya menjadi sumber utama kekuatan. Namun, kekuasaan ini tidak hanya berhubungan dengan distribusi simetris sumber daya, melainkan juga dengan kapasitas transformasi dan kontrol atas objek dan individu (Giddens, 1984: p.32). Kapasitas transformasi ini selalu menuntut kemampuan individu atau kelompok untuk mengubah, memodifikasi, atau mengelola sumber daya dan objek secara efektif sehingga menciptakan perubahan yang diinginkan dalam situasi atau lingkungan tertentu. Ini berarti individu atau kelompok diharuskan memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kontrol untuk mengolah sumber daya atau objek sedemikian rupa sehingga menghasilkan dampak atau perubahan yang diharapkan. Kapasitas transformasi ini memungkinkan individu atau kelompok untuk membentuk ulang interaksi sosial, mengarahkan arah perubahan, dan mengelola hubungan kekuasaan dengan cara yang sesuai dengan tujuan mereka. Pentingnya makna dan norma dalam interaksi tidak dapat dipisahkan dari konsep ideologi.

Penandaan juga berperan dalam pembentukan ideologi, yang dapat digunakan untuk memanipulasi makna dan menghubungkannya dengan kepentingan kelompok tertentu (Giddens, 1984: p.33).

Dalam prakteknya, interaksi sosial terjadi dalam tindakan-tindakan sehari-hari, dimana makna, norma, dan kekuasaan termanifestasi. Konsep-konsep tersebut merangkum cara bagaimana bahasa digunakan untuk berkomunikasi dan memberikan makna pada tindakan, bagaimana norma-norma sosial mengatur interaksi dan perilaku, serta bagaimana kekuasaan dan kontrol atas sumber daya memengaruhi hubungan sosial. Interaksi ini membentuk pola-pola kompleks dalam masyarakat di mana strukturasi terjadi.

D. Reflektivitas dan Perubahan Sosial

Konsep reflektivitas merupakan konsep tentang bagaimana individu berinteraksi dalam masyarakat dan merespons serta memahami tindakan mereka, serta implikasi dari tindakan tersebut terhadap lingkungan sosial dan hubungan antar individu (Giddens, 1984: p.41). Gagasan ini adalah upaya intelektual Giddens untuk menunjukan bahwa Individu tidak hanya dipandang sebagai penerima pasif struktur sosial, tetapi juga memiliki peran aktif dalam membentuk tindakan mereka dan mengubah norma dan nilai yang membentuk masyarakat. Konsep reflektivitas menggambarkan bagaimana interaksi kompleks antara agen dan struktur sosial dapat membentuk dan mengubah masyarakat.

Dasar konsep reflektivitas ini mencakup beberapa aspek penting. Konsep ini berakar pada kesadaran akan tindakan individu, di mana individu memiliki kemampuan untuk memantau, merespons, dan merenung mengenai tindakan yang mereka lakukan serta dampaknya pada diri mereka sendiri dan orang lain. Kemampuan agen atau individu disini menunjukan bahwa adan proses internalisasi dari reflektivitas untuk memahami situasi sosial. Kemampuan ini disebut sebagai pengembangan konsep diri yang reflektif dimana individu

punya kemampuan kesadaran aktif terhadap perubahan dan beradaptasi berdasarkan refleksi pengalaman, sehingga individu dapat mengubah perilaku mereka di masa depan(Giddens, 1984: p.78).

Konsep refleksivitas merupakan elemen sentral dalam pemikiran Anthony Giddens mengenai strukturasi sosial dalam masyarakat modern. Giddens membedakan refleksivitas dalam dua pengertian yang berbeda. Pertama, "pemantauan refleksif terhadap perilaku," yang menggambarkan bagaimana individu secara sadar memantau dan merefleksikan tindakan-tindakan mereka sepanjang waktu (Giddens, 1987: p.171). Pendekatan ini memungkinkan manusia untuk mempertahankan koneksi dengan realitas di sekitar mereka. Kedua, refleksivitas "pengetahuan dan makna," dimana istilah-istilah yang digunakan untuk menggambarkan kehidupan sosial secara rutin memasuki dan mengubah dinamika sosial itu sendiri(Giddens, 1984: p.44). Konsep refleksivitas dalam pengertian pertama mendasari pemahaman dan pengontrolan tindakan, sementara dalam pengertian kedua, menyoroti peran pengetahuan dalam mentransformasi dan meredefinisikan makna dalam kehidupan sosial.

Pemahaman pertama tentang refleksivitas, merupakan fenomena yang umum dan terjadi dalam semua aspek kehidupan manusia. Bagi Giddens, refleksivitas merupakan metode dari kesadaran praktis dimana individu terus-menerus berinteraksi dengan dunia nyata di sekitar mereka dan sebagai alat reproduksi struktur dan sifat-sifat dasar dalam masyarakat (Giddens, 1984: p.50). Sebagai contoh, saat seseorang memantau dan merenungkan tindakannya, dia sebenarnya sedang menciptakan dan mewujudkan pola-pola sosial, bahkan jika pola-pola tersebut tidak selalu terlihat secara langsung. Analogi pemantauan refleksif terhadap perilaku seperti melihat cara kita dan orang lain berinteraksi dalam kelompok atau lingkungan. Ini mirip dengan cara kita belajar bahasa dengan memperhatikan kata dan aturan yang digunakan saat berbicara.

Dengan memantau interaksi, kita bisa menyadari pola-pola tertentu dan memengaruhi diri kita.

Pemahaman kedua tentang refleksivitas, yaitu "penggunaan informasi untuk mengubah definisi," lebih menekankan pada peran pengetahuan dalam meredefinisikan makna dan mengatur ulang aktivitas sosial (Giddens, 1984: p.90). Konsep ini menyoroti bagaimana pemahaman dan informasi yang diperoleh manusia dapat mengubah dinamika masyarakat dan merombak struktur sosial. Sebagai ilustrasi sederhana, perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap peran gender. Di masa lalu, masyarakat mungkin memiliki pandangan yang kaku tentang peran gender yang mengharuskan pria dan wanita memiliki peran yang terbatas dan terpisah. Namun, dengan adanya pengetahuan baru tentang kesetaraan gender dan pengertian yang lebih inklusif tentang peran gender, masyarakat dapat mengubah definisi tentang peran gender, merombak struktur sosial yang lebih fleksibel, dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin.

Giddens mengakui bahwa bentuk refleksivitas ini merupakan karakteristik utama dari masyarakat modern (Giddens, 1984: p.92). Dalam konteks ini, refleksivitas mengacu pada kemampuan manusia untuk secara aktif mengubah dan membentuk tatanan sosial mereka melalui penerapan pengetahuan dan makna yang berbeda. Namun, refleksivitas jenis ini juga memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana pengetahuan baru diintegrasikan dan diaplikasikan ke dalam konteks sehari-hari dan tatanan sistem, serta bagaimana perubahan ini dapat memberikan kontribusi terhadap terciptanya dunia sosial yang berbeda dari masa lalu.

DAFTAR PUSTAKA

Appelbaum, Deborah Carr; Anthony Giddens; Mitchell Duneier; Richard P. 2013. *Introduction to Sociology*. 11th ed. edited by S. Levitt. New York: W. W. Norton & Company.

Bernstein, Richard J. 1990. "Social Theories as A Critique." in *Social Theory of Modern Societies: Anthony Giddens and His Critics*. UK & USA: Cambridge University Press.

Giddens, Anthony. 1971. *Capitalism and Modern Social Theory*. Printed, 2. United Kingdom: Cambridge University Press.

Giddens, Anthony. 1984. *The Constitution of Society*. Vol. 35. UK: Polity Press, Cambridge, in association with Basil Blackwel, Oxford.

Giddens, Anthony. 1987. "Action, Subjectivity, and the Constitution of Meaning." Pp. 159–74 in *The Aims of Representation: Subject/Text/History*. Columbia University Press.

Giddens, Anthony. 1990. *The Consequences of Modernity*. 1st ed. United Kingdom: Blackwell.Publishers Ltd.

Giddens, Anthony. 2005. "The Constitution of Society, Outline of the Theory of Structuration: Elements of the Theory of Structuration." in *Practicing history: new directions in historical writing after the linguistic turn*, edited by G. M.Spiegel. New York & London: Psychology Press.

Lamsal, Mukunda. 2012. "The Structuration Approach of Anthony Giddens." *Himalayan Journal of Sociology & Anthropology* 5.

Martin, Wes W. Sharrock; John A. Hughes; Peter J. 2003. *Understanding Classical Sociology: Marx, Weber, Durkheim*. First. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications.

Meštrović, Stjepan G. 2005. *Anthony Giddens: The Last Modernist*. London & New York: Routledge, Taylor & Francis.

Schneider, Mark A. 2007. "Structuralism." *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*.

Stones, Rob. 2005. *Structuration Theory*. edited by I. C. and R. Stones and This. New York: Palgrave Macmillan.

TENTANG PENULIS

Kuflia Muak Hara, S.Sos., M.Si lahir di Baubau pada tanggal 14 November 1981. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana pada Program Studi Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya tahun 2005. Penulis menyelesaikan pendidikan magister pada Program Studi Sosiologi, Universitas Hasanuddin tahun 2013 melalui program Beasiswa Program Pasca Sarjana (PPS). Penulis bekerja sebagai Dosen di Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Dayanu Ikhsanuddin tahun 2005-sekarang.

Karya tulis berupa book chapter yaitu Buton Dalam Lintasan Sejarah, Warisan Budaya dan Perubahan Sosial dengan sub judul Nelayan Tuna di Buton: Strategi Mempertahankan Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Rumah Tangga pada Masa Pendemi Covid-19, ada pun jurnal yang pernah di tebitkan antara lain Dampak Sosial Ekonomi dan Lingkungan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kelurahan Lowulowu Kecaatan Lealea Kota Baubau yang terbit dalam Jurnal Sang Pencerah Volume 5 Issue 2, 2019 P-ISSN : 2528-360X, E-ISSN : 2621-6159

BAB 7

TEORI PUBLIC SPHERE JURGEN HABERMAS

Oleh : Kartika Sari

A. Pendahuluan

Jürgen Habermas merupakan seorang filsuf Jerman yang menciptakan istilah ruang publik. Ia mendefinisikan ruang publik sebagai yang terdiri dari orang-orang pribadi yang berkumpul sebagai wilayah kehidupan sosial kita di mana sesuatu yang mendekati opini publik dapat dibentuk. Semua warga negara berhak mendapatkan akses. Menurut Habermas, ruang publik membutuhkan sarana khusus untuk menyampaikan informasi dan mempengaruhi penerimanya. Ia melihat beberapa kondisi yang diperlukan agar ruang publik dapat berfungsi dengan cara yang dapat melayani sebagian besar masyarakat. Pertama, harus terbuka bagi seluruh warga negara, yang berkumpul secara bebas untuk menyampaikan pendapatnya dalam diskusi publik. Dalam hal ini, mereka tidak bertindak sebagai atau atas nama suatu bisnis atau kepentingan pribadi apa pun, melainkan sebagai individu yang menangani masalah-masalah umum yang menyangkut kepentingan umum. Upaya untuk mengklasifikasikan opini publik, legitimasi negara, dan demokrasi di Barat pascaperang dimulai dengan definisi Habermas tentang ruang public (Theoryculturesociety, 2023).

Filsuf Jerman Jürgen Habermas mendefinisikan ruang publik sebagai area di mana opini publik dapat dibentuk. Definisinya adalah pemicu pertama dan pendiri upaya klasifikasi pembentukan opini publik dan legitimasi negara dan

demokrasi dalam masyarakat Barat pascaperang. Habermas melihat beberapa kondisi yang diperlukan agar ruang publik dapat berfungsi dengan baik dan dapat melayani sebagian besar masyarakat. Pertama, harus terbuka bagi seluruh warga negara, yang berkumpul secara bebas untuk menyampaikan pendapatnya dalam diskusi publik. Dalam hal ini, mereka tidak bertindak sebagai atau atas nama suatu bisnis atau kepentingan pribadi apa pun, melainkan sebagai individu yang menangani masalah-masalah umum yang menyangkut kepentingan umum. Definisi Habermas mengenai ruang publik diterima secara luas sebagai standar kerja namun juga mendapat banyak tantangan seiring dengan berkembangnya konsep ruang public (Splichal,1999).

Teori ruang publik Jürgen Habermas adalah gagasan bahwa ada ruang dalam masyarakat di mana individu dapat berkumpul untuk secara bebas mendiskusikan dan mengidentifikasi masalah-masalah kemasyarakatan. Ruang ini terbuka bagi seluruh warga negara dan memungkinkan terbentuknya opini publik. Habermas berpendapat bahwa ruang publik memerlukan sarana khusus untuk menyebarkan informasi dan mempengaruhi mereka yang menerimanya, dan bahwa media mempunyai arti penting dalam membentuk dan memelihara ruang publik. Bukunya, "The Structural Transformation of the Public Sphere," merupakan karya mendasar mengenai topik ini dan diterima secara luas sebagai karya standar, meskipun buku ini juga mendapat banyak tantangan karena konsep ruang publik terus berkembang. Jürgen Habermas pertama kali mengemukakan idenya tentang "ruang publik" (Jerman: öffentlichkeit) dalam The Structural Transformation of the Public Sphere (1962, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1989). Habermas menciptakan ruang ideal konseptual di mana semua orang dapat berkumpul dan berbicara, menggambarkan öffentlichkeit sebagai "bidang kehidupan sosial kita di mana sesuatu yang mendekati opini publik dapat dibentuk" dan di mana "akses dijamin bagi semua warga negara." hal-hal yang relevan secara bersamaan karena

"cara yang tidak dibatasi" Meskipun secara teoritis tidak berbahaya, namun dalam praktiknya ruang seperti itu tidak pernah ada karena masyarakat yang benar-benar adil belum terbentuk (Habermas, 1991).

Habermas memperkirakan pembentukan istilah ruang publik dan opini publik dimulai pada abad ke-18. Sebelum bangkitnya kaum borjuis dan terciptanya ruang publik borjuis, pemahaman terhadap istilah 'publik' sangatlah berbeda. Sebelumnya, representasi otoritas melalui seorang penguasa disebut 'publik' yang mengacu pada representasi publik yang dipandang sebagai penguasa. Representasi publik ini sekedar menyatakan kewenangannya dihadapan rakyat dibandingkan dengan rakyat yang dipimpinnya. Meskipun konsep dasar perwakilan melalui pemerintahan atau kepala negara tetap ada, keterikatan pada aristokrasi mulai hilang seiring berjalannya waktu. Pada akhir abad ke-18, kekuatan feodal gereja dan kaum bangsawan berkurang dan membuka jalan bagi kebangkitan masyarakat borjuis di Eropa. Dengan demikian arti kata 'publik' pun berubah. 'Publik' tidak lagi menggambarkan pengadilan perwakilan seseorang dan kewenangannya. Hal ini berarti peraturan yang melegitimasi sistem kelembagaan yang memegang kekuasaan pemerintahan. Warga negara kini dimasukkan ke dalam negara yang membentuk masyarakat (Odugbemi, 2008)).

Model ruang publik liberal Habermas mempunyai klaim normatif. Artinya, ia menggambarkan banyak persoalan yang diidealkan, menunjuk pada bagaimana seharusnya ruang publik idealnya. Oleh karena itu, hal ini sebenarnya tidak ada di negara-negara demokrasi modern yang maju secara industri, yang merupakan negara kesejahteraan sosial dan di mana banyak orang seharusnya membentuk suatu masyarakat. Ini adalah model demokrasi idealis yang dibentuk melalui perubahan struktural masyarakat yang berakhir dengan transformasi pemahaman mengenai ruang publik. Habermas sendiri harus mengakui bahwa partisipasi perempuan dan inklusi kelompok minoritas tidak dijamin oleh modelnya yang mengandalkan

keadaan masyarakat borjuis pada awal abad ke-19. Dalam wawancara berikut Jürgen Habermas menjelaskan hasil terpenting dari penelitiannya selama bertahun-tahun serta keterbatasan tertentu (Habermas, 1991).

.

B. Konsep Ruang Publik Habermas

Jürgen Habermas mengatakan bahwa ruang publik adalah bagian dari kehidupan sosial di mana opini publik dapat dibentuk, dan bahwa setiap percakapan di mana orang berkumpul untuk membentuk publik adalah dasar dari ini. Media memainkan peran penting dalam membangun dan memelihara ruang publik, karena ruang publik membutuhkan sarana khusus untuk menyebarkan informasi dan mempengaruhi mereka yang menerimanya. Habermas melihat beberapa kondisi yang diperlukan agar ruang publik dapat berfungsi dengan baik dan dapat melayani sebagian besar masyarakat. Pertama, harus terbuka bagi seluruh warga negara artinya Menurut Jürgen Habermas, ruang publik perlu terbuka bagi seluruh warga negara yang berkumpul secara bebas untuk menyampaikan pendapatnya dalam diskusi publik. Dalam hal ini, mereka tidak bertindak sebagai atau atas nama suatu bisnis atau kepentingan pribadi apa pun, melainkan sebagai individu yang menangani masalah-masalah umum yang menyangkut kepentingan umum. Habermas melihat hal ini sebagai sebuah kondisi yang diperlukan agar ruang publik dapat berfungsi dengan cara yang mampu melayani sebagian besar masyarakat, yang berkumpul secara bebas untuk menyampaikan pendapatnya dalam diskusi publik. Dalam hal ini, mereka tidak bertindak sebagai atau atas nama bisnis atau kepentingan pribadi apa pun, melainkan sebagai individu yang menangani masalah-masalah umum yang menjadi kepentingan umum (Marx Ferree et al, 2002).

Ruang publik menurut konsep Habermas ialah ranah kehidupan sosial yang dibentuk oleh sesuatu yang mendekati opini publik di mana individu bertindak sebagai lembaga publik ketika berbicara dengan cara yang tidak dibatasi, termasuk

kebebasan untuk mengemukakan dan mengungkapkan pendapat mereka. Ruang publik adalah ruang privat yang terhubung dengan publik dan dianggap sebagai milik publik yang tidak diatur oleh negara. Definisi ini mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam bidang politik, ruang publik dipandang sebagai bagian dalam representasi politik. Habermas membagi ruang publik ke dalam dua jenis; (1) ruang publik politik, dan (2) ruang publik sastra. Ruang publik ini biasa disebut badan publik yang pemanfaatannya tunduk pada aturan konstitusi dan hukum. Ruang publik tidak hanya berbentuk bangunan fisik tetapi juga berupa media massa (cetak dan elektronik), seperti surat kabar, majalah, radio, televisi adalah media dari ruang publik. Ruang publik dapat digunakan untuk berkumpul, berdiskusi, dan berekspresi secara bebas dalam melayani kepentingan umum, termasuk untuk bisnis, birokrasi, politik, dsb (Ingram, 2010).

C. Elemen Konstitutif

Lima pilar membentuk ruang publik demokratis yang efektif yaitu :

1. Kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkumpul adalah kebebasan sipil yang dijamin secara konstitusional. Kebanyakan negara saat ini menerima kebebasan sipil dasar sebagaimana disepakati dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kebebasan sipil mempengaruhi kehidupan masyarakat dengan memberikan hak dan kebebasan individu untuk berekspresi, berpendapat, dan berkumpul. Kebebasan ini penting dalam membangun sebuah peradaban yang beradab dan bermartabat. Namun, kebebasan berekspresi dan berpendapat tidak boleh melanggar hak asasi dan kebebasan orang lain serta kepentingan publik. Kebebasan sipil juga dapat mempengaruhi norma dan prinsip masyarakat, terutama dalam era media sosial yang memungkinkan kebebasan berpendapat yang terbuka lebar. Namun, tantangan yang harus dijawab dan diprioritaskan adalah membangun ruang publik yang sehat, kebebasan

yang bermakna bagi sistem demokrasi yang berkualitas, terutama dalam membangun sebuah negara yang adil dan sejahtera

2. Sistem media sering dianggap sebagai lembaga publik utama karena bebas, plural, dan independen dan tidak dikontrol oleh negara. Oleh karena itu, sistem media hanya dapat menjamin akses dan suara yang setara bagi warga negara jika sistem tersebut independen dari pengaruh politik dan politik. kepentingan perusahaan. Media memainkan peran penting dalam politik sebagai sumber informasi, dan dalam demokrasi, media mempunyai kebebasan untuk mengkomunikasikan kebijakan dan kegiatan pemerintah kepada publik. Namun, kepemilikan media oleh individu atau perusahaan yang memiliki kepentingan politik dapat menyebabkan pemberitaan yang bias dan kurangnya independensi editorial. Oleh karena itu, penting untuk memiliki peraturan dan kebijakan untuk melindungi kebebasan media dan pluralism.

3. Akses terhadap informasi publik mencakup budaya transparansi dan keterbukaan serta undang-undang yang mengatur kebebasan informasi. Sejumlah besar negara telah mengadopsi undang-undang kebebasan informasi. Namun, undang-undang harus didukung oleh budaya yang mendukung keterbukaan dan penyelidikan. Keterbukaan informasi publik merupakan hak asasi setiap warga negara dan merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Undang-undang kebebasan informasi publik telah diadopsi oleh lebih dari 85 negara. Salah satu upaya untuk mendorong budaya transparansi adalah dengan mengadakan forum edukasi keterbukaan informasi publik. Selain itu, pemerintah perlu mencari cara untuk mengembangkan pendekatan "negara terbuka" yang akan mengesahkan kerja sama di

antara badan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan berbagai tingkat pemerintahan.

4. Masyarakat sipil yang selalu berubah mendukung keinginan warga untuk bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam urusan publik. Organisasi masyarakat sipil mengatur dan mempromosikan agenda warga. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kepentingan, dan tujuan untuk memperjuangkan hak-hak warga negara dan kepentingan masyarakat. OMS bersifat swasta, otonom, dan independen dari campur-tangan negara. OMS memiliki peran penting dalam partisipasi publik, yaitu sebagai advokasi, pemberdayaan masyarakat, dan kontrol sosial. OMS juga memiliki potensi penting bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Namun, OMS di Indonesia menghadapi tantangan besar terutama semakin terbatasnya ruang kebebasan dan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang membatasi ruang gerak OMS. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi keberlakuan dan penerapan UU Ormas beserta kebijakan dan peraturan perundang-undangan turunan lainnya yang berdampak pada menyempitnya ruang gerak organisasi masyarakat sipil, termasuk produk kebijakan yang dapat memperkuat partisipasi publik
5. Percakapan sehari-hari tentang urusan masyarakat: Percakapan sehari-hari adalah tempat orang berkumpul untuk berbicara tentang politik (seperti di tempat kerja, kopi, dan sekolah). Percakapan sehari-hari adalah faktor penting dalam pembentukan opini publik. Peran masyarakat sipil dalam proses demokrasi juga meliputi fungsi kontrol sosial, di mana masyarakat sipil bersama-sama media menjadi pengawas dan pengontrol jalannya proses demokrasi agar tidak menyimpang dari jalurnya. Oleh karena itu, peran masyarakat sipil dalam pembentukan opini publik sangat penting dan perlu diperkuat (Splichal, 2006).

D. Ruang Publik dan Masyarakat Sipil

Konsep ruang publik terkait erat dengan masyarakat sipil, meskipun keduanya tidak sama. Di lingkungan publik yang bebas dan terbuka, organisasi masyarakat sipil bertindak dan dapat memperoleh suara dan pengaruh sehingga dapat mempengaruhi otoritas resmi melalui opini publik. Gerakan sosial dapat memperoleh suara publik, memperjuangkan pengakuan, menegaskan diri mereka sendiri, berusaha membentuk opini publik, mempengaruhi para pemimpin dan pembuat kebijakan, dan membawa perubahan. Arus informasi yang bebas, kebebasan berbicara, dan kebebasan berekspresi adalah pilar tata kelola yang baik dan akuntabel. Ruang publik adalah suatu wilayah yang dapat diakses oleh semua orang, termasuk negara, dan merupakan arena publik yang bersifat otonom. Ruang publik juga merupakan media untuk mendiskusikan persoalan-persoalan publik. Masyarakat sipil, yang terdiri dari aktor non-negara dan publik, memiliki peran penting dalam tata kelola lingkungan dan dalam membangun bangsa menuju masyarakat merdeka. Masyarakat sipil juga berhubungan dengan prilaku dan budaya, serta terlibat dalam berbagai aktivitas di ruang publik. Ruang publik yang sehat dan memanfaatkan kebebasan tanpa mencederai hak orang lain merupakan salah satu ciri dari demokrasi yang berkualitas (Price, 2008).

Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam ruang publik yaitu mengartikulasikan kepentingannya, masyarakat sipil dapat mengeluarkan pendapat, melakukan kontak, unjuk rasa, dan berserikat untuk mengartikulasikan kepentingannya di ruang public. Mendiskusikan persoalan publik, ruang publik merupakan media untuk mendiskusikan persoalan-persoalan publik, dan masyarakat sipil dapat turut serta dalam diskusi tersebut. Membangun organisasi sosial dan politik, masyarakat sipil dapat membentuk berbagai macam organisasi sosial dan politik di ruang public. Mengembangkan diri, ruang publik merupakan tempat di mana warga negara dapat mengembangkan dirinya secara maksimal di berbagai aspek.

Menjadi pengawas, masyarakat sipil dapat menjadi pengawas dalam tata kelola lingkungan dan dalam membangun bangsa menuju masyarakat merdeka. Meningkatkan kualitas demokrasi, ruang publik yang sehat dan memanfaatkan kebebasan tanpa mencederai hak orang lain merupakan salah satu ciri dari demokrasi yang berkualitas, dan masyarakat sipil dapat turut serta dalam menciptakan ruang publik yang kondusif. Dalam ruang publik, masyarakat sipil dapat berperan sebagai penggerak perubahan dan pengawas bagi negara dan pemerintah. Dengan mengeluarkan pendapat, melakukan kontak, unjuk rasa, dan berserikat, masyarakat sipil dapat mengartikulasikan kepentingannya dan memperjuangkan hak-haknya. Selain itu, masyarakat sipil juga dapat turut serta dalam diskusi persoalan-persoalan publik dan membentuk organisasi sosial dan politik di ruang publik. Dengan demikian, masyarakat sipil dapat memainkan peran penting dalam membangun bangsa dan meningkatkan kualitas demokrasi (Agustino, 2008).

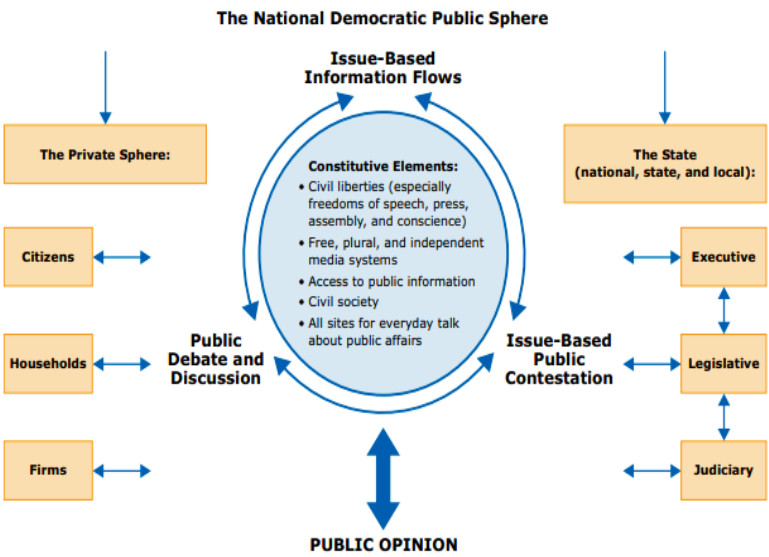

Gambar 7. 1. Ruang publik dan masyarakat sipil
(Sumber : Odugbemi, 2008)

E. Aktor di Ruang Publik

Ruang publik adalah ruang di mana beragam aktor dengan kepentingan yang berbeda bertemu dan berinteraksi. Aktor-aktor tersebut dapat mempengaruhi dan membangun ruang publik tersebut. Beberapa aktor yang dapat mempengaruhi ruang publik antara lain politik intermediari, aktor hegemonik, agen budaya, negara (pemerintah), pasar (swasta, pengusaha, pemilik modal), dan masyarakat sipil. Aktor-aktor tersebut dapat mempolitisasi ruang publik dan mempengaruhi perubahan dan kesinambungan nilai-nilai budaya politik lokal dalam proses demokratisasi.

1. Masyarakat

Menurut pemahaman tradisional, masyarakat adalah sekelompok orang akan terhubung oleh kepentingan bersama yang dalam satu dan beberapa masalah menarik perhatian pada publik. Anggota komunitas tidak harus tinggal di tempat yang sama. Istilah ini sering disamakan dalam ilmu sosial modern dengan kelompok warga relevan yang secara politik, seperti masyarakat sipil, pemilih dan khalayak media. Masyarakat sipil merupakan kelompok warga yang memiliki kepentingan bersama dalam isu-isu sosial, politik, dan ekonomi. Pada masyarakat sipil seringkali terlibat dalam gerakan sosial dan politik untuk memperjuangkan hak-hak mereka dan mempengaruhi kebijakan publik. Khalayak media massa adalah kelompok warga yang terhubung melalui konsumsi media massa seperti televisi, radio, dan surat kabar. Khalayak media massa dapat mempengaruhi opini publik dan menjadi kekuatan politik yang signifikan. Komunitas lokal adalah kelompok warga yang terhubung melalui lokasi geografis atau kepentingan bersama dalam isu-isu lokal. Komunitas lokal dapat mempengaruhi kebijakan publik dan memperjuangkan kepentingan mereka dalam isu-isu lingkungan, sosial, dan ekonomi

2. Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil dan masyarakat mempunyai hubungan yang erat, namun secara konseptual tak sama. Organisasi dan kegiatan yang tidak dimotivasi dengan keuntungan serta kekuasaan dan tidak memiliki tujuan politik atau komersial membentuk masyarakat sipil. Dalam situasi tertentu, mereka dapat dimasukkan ke dalam ruang publik. Pemahaman tradisional mengenai masyarakat mengacu pada sekelompok orang yang imajiner terhubung dengan kepentingan bersama pada beberapa isu yang telah menjadi perhatian oleh publik. Istilah ini sering disamakan dalam ilmu sosial modern dengan kelompok warga yang relevan secara politik, seperti masyarakat sipil, pemilih, komunitas lokal, dan media massa. Masyarakat sipil digunakan dalam konteks hubungan negara dan masyarakat (state and community), sifat hubungan adalah kekuasaan, konsepnya adalah politik. Masyarakat terlalu kompleks, tidak bisa dilihat dari satu segi saja (politik, ekonomi, sosial, budaya), analisanya penjelasannya harus konfiguratif (keterkaitan semua aspek tidak bisa parsial) contohnya sosial ekonomi, sosial politik. Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam proses demokratisasi, terutama dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan mempengaruhi kebijakan publik. Hubungan negara-masyarakat sipil di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konteks lokal (budaya masyarakat dan sejarah politik Indonesia). Organisasi-organisasi dalam masyarakat sipil mempunyai tujuan yang berbeda-beda seperti politik, ekonomi, olah raga, seni dan lain-lain

3. Pejabat Publik

Meskipun negara yang bukan bagian dari sebuah ruang publik, mereka dapat harus menjadi aktor. Dalam masyarakat demokratis, khalayak publik akan mendengarkan masyarakat, menentukan keinginan mereka, mengomunikasikan masalah mereka serta memberikan

informasi tentang keputusan serta tindakan yang akan harus diambil. Pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam perundang-undangan. Transparansi pelayanan publik sangat penting dalam menciptakan rasa kepercayaan dari masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik secara transparan dan memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat. Pejabat publik juga memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokratisasi. Komitmen pemerintah terutama pejabat publik menjadi penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Komitmen dimaksudkan dalam mewujudkan transparansi dengan adanya keterbukaan publik

4. Media

Media massa selalu memiliki arti penting dalam penciptaan struktur kelembagaan yang akan memungkinkan pengorganisasian pada kepentingan umum baik nasional maupun secara internasional. Selain itu, menyediakan saluran komunikasi, serta media massa juga harus memperkenalkan juga membentuk topik-topik pada diskusi publik. Media massa memiliki peran penting dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik. Media massa dapat menjadi wadah pers dan alat komunikasi massa yang dapat memperkuat hubungan antara negara dan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokratisasi. Media massa juga memiliki peran penting dalam mempromosikan gagasan, pemantauan, dan evaluasi gerakan masyarakat sipil. Media massa dapat memperkuat relasi antara komunitas media dan masyarakat sipil dalam rangka memperjuangkan hak-hak mereka. Media massa

dapat membentuk opini publik dan mempengaruhi kebijakan publik. Oleh karena itu, media massa harus memperhatikan etika jurnalistik dan memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada masyarakat

5. Aktor Swasta

Ketika individu atau organisasi telah memasuki sebuah ruang publik, biasanya mereka akan bertindak untuk suatu kepentingan. Dalam kasus terakhir, mereka akan menjadi bagian dari masyarakat. Konflik kepentingan dapat muncul ketika pejabat publik mempunyai kepentingan pribadi yang mempengaruhi atau terkesan mempengaruhi tugas publiknya yang obyektif dan tidak memihak. Dalam penanganan konflik kepentingan, prinsip dasarnya meliputi perbaikan nilai, sistem, individu, dan budaya. Pejabat publik harus mengutamakan kepentingan publik dan mengikuti hukum dan kebijakan yang berlaku tanpa mempertimbangkan keuntungan pribadi. Keterbukaan informasi publik dapat mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks pelayanan publik, keterlibatan dunia usaha (swasta) dan masyarakat dalam optimalisasi pelayanan publik sangat mendukung dalam pencapaian tujuan besar yaitu Good Governance. Aktor swasta dapat memainkan peran penting dalam pelayanan publik. Swasta dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan barang dan jasa publik serta memperkuat kemitraan dalam pelayanan publik. Swasta juga dapat mempengaruhi kebijakan publik melalui pengaruh ekonomi dan politiknya. Oleh karena itu, swasta harus memperhatikan tanggung jawab sosialnya dan memperkuat relasi antara swasta dan masyarakat sipil dalam rangka memperjuangkan hak-hak mereka. Swasta juga dapat memainkan peran penting dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses demokratisasi. Swasta dapat memberikan kontribusi dalam penyediaan informasi dan

akses ke media massa serta memperkuat kemitraan dalam pelayanan public (Windrum & Koch, 2008).

DAFTAR PUSTAKA

Theoryculturesociety. (2023). Jürgen Habermas & the Digital Transformation of the Political Public Sphere. https://www.theoryculturesociety.org/blog/jurgen-habermas-digital-transformation-of-the-political-public-sphere.

Habermas, J.(1991): "The public sphere" In Mukerji, C.; Schudson, M.(Ed.): Rethinking popular culture. Contemporary perspectives in cultural studies. Berkeley/Los Angeles: University of California Press. pp.398-404.

Splichal, S. (1999). Public opinion. Developments and controversies in the twentieth century. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

Odugbemi, A. (2008). Public opinion, the public sphere, and quality of governance: An exploration. In S. Odugbemi & T. Jacobson (Eds.), Governance reform under real-world conditions. Citizens, stakeholders, and voice (pp. 15–37). Washington, D.C.: The World Bank. (p. 17).

Marx Ferree, M., Gamson, W. A., Gerhards, J., & Rucht, D. (2002). Four models of the public sphere in modern democracies. Theory and society, 31(3), 289–324. (p. 299).

Ingram, D. (2010). Habermas: Introduction and Analysis. Ithaca: Cornell University Press.

Splichal, S. (2006). In search of a strong European public sphere: Some critical observations on conceptualizations of publicness and the (European) public sphere. Media, culture & society, 28(5), 695–7147. See also Habermas (1962/1995); Odugbemi (2008).

Price, V. (2008). The public and public opinion in political theories. In W. Donsbach & M. W. Traugott (Eds.), The Sage handbook of public opinion research (pp. 11–24). London: Sage.

Agustino, L. (2008). Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfabeta:Bandung.

Windrum P, and Koch P.M. (2008). Innovation in Public Sector Services: Entrepreneurship, Creativity and Management. 32(11), pp. 992–993. DOI:10.4337/9781848441545

TENTANG PENULIS

Kartika Sari. Kelahiran Nyelanding, Bangka Belitung, 18 November 1982. Menempuh pendidikan S1 dan S2 di Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Merupakan dosen tetap di Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung sejak tahun 2006 dan saat ini sedang dalam proses penyelesaian studi pada program Doktor Pengkajian Islam di Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan bantuan beasiswa 5000 Doktor Kementerian Agama Republik Indonesia. Alamat email yang bisa dihubungi: ti_3k@yahoo.com

BAB 8

TEORI KUASA PENGETAHUAN MICHEL FOUCAULT

Oleh : Tesaannisa

A. Kuasa sebagai Mekanisme yang Menyusup dalam Setiap Aspek Kehidupan

Michel Foucault (1926-1984) lahir di Portier, Perancis, merupakan seorang intelektual yang menempuh pendidikannya dengan jalur "tak biasa". Ia menempuh pendidikannya dibeberapa lembaga tersohor di Perancis termasuk Lycée Henri IV dan L'École Normale Supérieure, di mana ia meraih gelar dalam filsafat dan psikologi. Dorongan yang kuat dalam menggali ilmu pengetahuan membawanya berkeliling dunia dan menjabat berbagai posisi akademik di Swedia, Polandia, Jerman Barat, Tunisia, dan Amerika Serikat. Pada usia 40 tahun ia mendapatkan posisi terkemuka di Collège de France di Paris, salah satu peran akademis yang sangat dihormati di negaranya yaitu sebgai guru besar (professor). Kiprahnya di Collège de France memberikan sumbangsih luar biasa di bidang humaniora dan social. Ia memberikan berbagai perkuliahan filsafat dan teori social. Kiprahnya di Collège de France memberikan sumbangsih luar biasa di bidang humaniora dan sosial (Turkel, 1990).

Pada tahun 1970-an ia memberikan kuliah dengan topik *L'ordre du discours*. Dalam perkuliahan tersebut, Foucault (1971) mengemukakan pandangan barunya tentang proses serta penyebaran konstruksi wacana (formasi diskursif) dalam suatu era. Pada analisis sebelumnya, ia menganggap bahwa proses konstruksi wacana terjadi secara alamiah. Namun pada perkuliahan tersebut ia mengungkapkan bahwa pembentukan

dan penyebaran wacana tunduk pada batasan, seleksi dan kontrol.

Foucault mengungkapkan berbagai kekuatan dan kekuasaan menyusup luas dan menyebar dalam hubungan antar manusia maupun manusia dan lingkungannya. Dengan kata lain kuasa tidak terpusat pada institusi formal tertentu seperti pemerintah melainkan suatu jejaring yang terbentang di seluruh aspek kehidupan manusia. Jejaring ini mengatur tingkah polah, pengetahuan dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan sehari-hari.

Kuasa mempertahankan ketertiban dan kontrol melalui pengawasan, pengaturan dan disipilin untuk menginternalisasikan nilai yang berlaku kepada individu atau kelompok. Kuasa, tanpa terlihat, secara efektif membentuk identitas, perilaku hingga pandangan dunia manusia seperti yang disampaikan Foucault berikut ini:

> "*that in every society the production of discourse is at once controlled, selected, organized, and redistributed by a certain number of procedures whose role is to ward off its powers and dangers, to gain mastery over its chance events, to evade its ponderous, formidable materiality*" (Foucault, 2001)

Kutipan di atas mengungkapkan bahwa produksi wacana di dalam masyarakat diproduksi secara bersamaan melalui sejumlah prosedur. Dengan kata lain produksi wacana tidaklah terjadi secara acak melainkan melalui kontrol, seleksi, pengaturan dan redistribusi. Prosedur ini juga menjadi berfungsi untuk menghindari bahaya dari wacana tandingan yang dapat mengganggu stabilitas wacana yang telah menyusup ke dalam setiap aspek kehidupan masyarakat.

Foucault membahas cara penyebaran wacana ini dengan penelusuran arkeologis yang kemudian pada tahun1970-an berubah menjadi genealogi. Metode ini menggali bagaimana wacana dikonstruksi serta menjelaskan sejarah ilmu

pengetahuan yang berbeda pada setiap era. Penelusuran Foucault terhadap konsep kegilaan, seksualitas atau antara normal dan tidak bernomal selalu berbeda dari zaman ke zaman (Lubis, 2014).

B. Pengetahuan sebagai Alat Kuasa

Pengetahuan merupakan suatu alat pendisiplinan yang ampuh dalam mengatur masyarakat untuk menjadi taat dan patuh (Lubis, 2014). Foucault di dalam bukunya *The Archeology of Knowledge* (1976) mengemukakan dua istilah dalam memahami definisi pengetahuan yaitu *savoir* dan *connaissance*. *Savoir* mengacu kepada pengetahuan beserta institusi formal yang memberikan pengawasan terkait kegiatan ilmiah dan ide-ide filosofis. Sementara itu *connaissance* merupakan badan atau bagian dari pengetahuan formal yang lebih terkhusus sebagai contoh jurnal ilmiah, norma religious, teori filosofis atau lebih khusus lagi bidang spesifik tertentu seperti psikoanalisis, fisika nuklir dan sebagainya. Hubungan keduanya adalah *savoir* sebagai pengetahuan formal berikut institusi formal yang mengawasi kegiatan ilmiah merupakan kondisi-kondisi diskursif yang dibutuhkan untuk pengembangan *connaisance* sebagai pengetahuan formal yang lebih khusus dan spesifik.

Contoh dari hubungan savoir dan connaisance dianalisis oleh Foucault lewat kehadiran klinik yang membuka berbagai wacana medis. Klinik adalah *savoir* sebagai kondisi diskursif atau institusi formalnya sementara itu kehadiran klinik sebagai institusi formal tersebut berkontribusi terhadap perkembangan *connaisance* dalam hal ini yaitu berbagai wacana medis atau pengetahuan formal yang lebih spesifik. Pada abad pertengahan rasionalitas sangat dijunjung dengan tinggi dan gagasan ini menjadikan individu yang tidak rasional dianggap kehilangan akal sehat. Kemudian istilah "hilangnya akal sehat" berubah menjadi "gangguan jiwa" oleh wacana medis. Perkembangan wacana medis tersebut sekaligus berdampak pada berkembangnya rumah sakit jiwa berikut unsur lainnya seperti psikiatri dan psikiater. Berbagai pengetahuan yang lahir dari

wacana medis tersebut menciptakan bentuk baru pendisiplinan, pengaturan dan pengontrolan. Foucault tidak merujuk pemikirannya pada mana wacana yang benar atau yang salah, tetapi proses yang terjadi hingga suatu wacana baru dapat diterima dan mendominasi berbagai aspek kehidupan masyarakat (Lubis, 2014).

Menurut Foucault, tidak cukup hanya menganalisis pengetahuan semata-mata sebagai manifestasi kekuasaan atau semata-mata sebagai alat kekuasaan. Tentu saja, ada kebenaran dalam hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan: pengetahuan yang disampaikan melalui percakapan bergantung pada struktur-struktur kekuasaan yang memfasilitasi pengorganisasian, pencatatan, pengumpulan, dan komunikasi terorganisir. Namun, pemanfaatan kekuasaan dan pelaksanaan kekuasaan memerlukan pengembangan pengetahuan praktis. Kekuasaan dan pengetahuan memiliki keterkaitan yang erat, saling mempengaruhi, dan seringkali saling terkait hingga mencapai titik di mana mereka menjadi bersatu (Turkel, 1990)

C. Mekanisme Operasi Kuasa Pengetahuan

Dalam memahami mekanisme operasi kuasa pengetahuan, perlu diketahui bahwa Foucault (1977) menyampaikan tiga asumsi penting tentang analisis wacana. Pertama, wacana adalah pengetahuan yang mengonstruksi subjek kemudian menjadi objek penelitian. Kedua, wacana sebagai alat (teknologi tubuh) yang digunakan individu untuk mengubah dirinya sebagai subjek. Ketiga, wacana sebagai praktik yang berfungsi membedakan antara kondisi yang disebut "normal" dengan "tidak normal" dan sebagainya. Teknologi pengaturan yang berkembang di berbagai institusi seperti sekolah, rumah sakit dan penjara menghasilkan "*docile body*" atau tubuh yang patuh yang memudahkan dalam mengubah suatu wacana dominan di dalam masyarakat (Barker, 1998).

1. **Wacana dan Pengecualian (Ekslusi)**

Menurut Foucault, analisis transformasi pengetahuan dari waktu ke waktu secara kualitatif menunjukkan perbedaan antara pemikiran klasik dan modern. Pengetahuan dibangun melalui diskusi yang mendefinisikan dan mencakup elemen-elemen yang terkait dengan tubuh, pengalaman, dan gagasan-gagasan yang pada awalnya tidak dianggap masuk akal atau ilmiah. Ketika pengetahuan membentuk individu sebagai subjek yang menyelidiki dan sekaligus objek yang diselidiki, maka praktik diskursif yang menentukan aspek apa saja dari perilaku dan aktivitas manusia yang dianggap sebagai suatu perilaku menyimpang yang melanggar konvensi sosial dapat menjadi subjek penyelidikan. Praktik diskursif ini dikonseptualisasikan oleh Foucault sebagai prosedur dan suatu kondisi komunikasi (Turkel, 1990).

Pertama, 'procedures of exclusion", prosedur ini mengontrol dan membatasi wacana melalui hubungan-hubungan internal di dalam wacana tersebut. Hubungan internal ini berupa prosedur yang memarginalkan objek pengetahuan dan beberapa topik yang dianggap tidak dominan keluar dari pengetahuan dan topik yang dominan. Marginalisasi ini menyebabkan objek pengetahuan itu tidak diterima dalam masyarakat karena dianggap tidak relevan atau mempunyai kekuatan magis. Salah satu contoh dari objek pengetahuan yang termarginalisasikan ini adalah kegilaan. Objek yang termarginalisasikan ini dikecualikan dari standar yang menentukan antara benar dan salah yang pada awalnya terkait dengan niat pengetahuan. Namun, standar-standar ini berbeda dari konteks di mana mereka berasal dan dinamika kekuasaan di mana mereka tertanam. Mereka menjauh dari lingkungan di mana pengetahuan dihasilkan, dikomunikasikan, dan, yang paling penting, dicari. Setiap bidang pengetahuan yang berspesialisasi, seperti hukum, kriminologi, sosiologi, geografi, ekonomi,

dan lain-lain, berusaha untuk menetapkan kerangka logis dan rentang verifikasi empirisnya sendiri (Turkel, 1990).

Kedua, terdapat batasan dan kontrol dalam prosedur setiap wacana berupa praktik-praktik yang mengklasifikasikan, mengatur dan mendistribusikan wacana sekaligus membuatnya tidak dapat diprediksi. Pada awalnya, terdapat interpretasi terhadap teks-teks dasar, seperti konstitusi dan putusan utama pada pengadilan. Interpretasi ini membantu pembentukan wacana dengan memberikan beragam interpretasi terhadap hal-hal seperti undang-undang, konstitusi, dan keputusan pengadilan, sehingga membuatnya menjadi permasalahan yang problematik dan perlu didiskusikan lebih lanjut. Pada saat yang bersamaan, melalui pengulangan teks-teks dasar ini, interpretasi dari teks tersebut menetapkan batasan pada cakupan wacana hukum. Cara lain kontrol internal terkait dengan konsep penulis, bukan selalu terkait dengan individu, melainkan parameter keterpaduan dan pembatasan yang terbentuk melalui identitas. 'Penulis' membentuk wacana sebagai proses aktif yang berasal dari entitas dengan identitas yang berfungsi sebagai pusat dasar dan parsial bagi wacana, sehingga menetapkan batasan pada wacana tersebut. Demikian pula, identitas kolektif dari pengetahuan bertindak sebagai kerangka kerja aturan, teknik, dan alat yang anonim atau tidak memiliki identitas spesifik, yang berpotensi menghasilkan wacana baru dan membatasi cakupan penyelidikan yang diperbolehkan. Dengan kata lain, terdapat pembatasan topik berupa aturan atau norma untuk menentukan objek yang dianggap pantas atau dapat dijelajahi dalam lingkup tertentu pada suatu disiplin ilmu. Disiplin ilmu memecah dunia menjadi objek-objek yang yang dapat dipelajari melalui metodologi khusus. Pengetahuan layaknya dunia yang dikelompokkan menjadi bagian-bagian terpisah yang tidak terhubung satu sama lain ketika diinterpretasikan (Turkel, 1990)

Ketiga, wacana dikendalikan oleh situasi yang membatasi akses pada komunikasi dan membentuk proses komunikasi, membatasi wacana hanya kepada individu yang dianggap 'terkualifikasi' berdasarkan pendidikan formal dan kredensial profesional, pola berbahasa dan gestur yang menetapkan batasan wacana, komunikasi melalui bahasa dan jurnal tertentu, pembatasan penyebaran wacana tersebut pada kelompok tertentu yang dikehendaki. Aspek terkakhir berupa pembatasan sudah dibahas sebelumnya pada poin pertama dan kedua yang berkaitan dengan berapa lama wacana dan dimana wacana tersebut tersebar. Pada dasarnya, wacana berkembang sebagai suatu bentuk komunikasi dan interaksi yang sifatnya eksklusif. Wacana tersebut mengevaluasi bahasa, individu dan pola interaksi dari sudut pandang disiplin yang menggabungkan identitas penulis dengan upaya mencari kebenaran yang terpisah dari tujuan praktis. Menurut Foucault, dimensi-dimensi pengetahuan ini dapat diselesaikan melalui metode yang menganalisis wacana sebagai praktik 'pengeposan' pengetahuan pada objek. Praktik pengeposan atau impositon ini di mana suatu pengetahuan secara sepihak diberlakukan pada situasi tertentu dan individu tertentu tanpa mendapat persetujuan dari individu yang terdampak. Upaya 'murni' dalam pencarian pengetahuan dalam wacana berasal dari perbedaan yang wacana yang berlaku pada situasi dan objek penyelidikan, mengubahnya menjadi partisi-partisi kecil berupa bidang-bidang atau ilmu pengetahuan dengan pemahaman yang terbatas dan ditujukan pada suatu kelompok tertentu atau bahkan pengetahuan tersebut tidak ada sebelumnya. Pemaknaan yang diciptakan oleh wacana adalah hasil dari praktik diskursif yang sebaiknya dipelajari sebagai kejadian-kejadian yang terputus dan menyebar. Makna dan wacana berubah seiring dengan hubungan-hubungan yang mendefinisikan periode sejarah. Mereka harus dianalisis sebagai hubungan-hubungan materi yang membentuk individu (Turkel, 1990)

2. Konsep Bio-politik

Pandangan tentang normal dan tidak normal, bermoral dan tidak bermoral senantiasa berubah sesuai perkembangan social budaya masyarakat dan tidak lepas pula dari dimensi social-historis masyarakat. Foucault mengungkapkan bahwa pengaturan sistemik tentang tubuh dianggap penting pada era modern dengan alasan urbanisasi yang mendorong tingginya perpindahan penduduk yang memicu pertambahan jumlah penduduk sehingga dibentuklah wacana keluarga berencana. Selain itu pengaturan sistemik tubuh ini penting karena menjadi kebutuhan kapitalis industrial. (Lubis, 2014)

Keluarga berencana merupakan salah satu bentuk dari bio-politik. Berikut adalah definisi bio-politik menurut Foucault:

> *the attempt, starting from the eighteenth century, to rationalize the problems posed to governmental practice by phenomena characteristic of a set of living beings forming a population: health, hygiene, birthrate, life expectancy, race.* (Foucault, 2008)

Bagi Foucault konsep bio-politik adalah bentuk pengaturan tentang kesehatan dan keamanan. Pada konteks keluarga berencana, wacana pembatasan jumlah anak digaungkan dengan slogan 'Cukup dua saja!'. Langkah ini merupakan strategi yang diambil untuk mengendalikan jumlah penduduk namun disampaikan kepada masyarakat dengan alasan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga yang melaksanakannya (Lubis, 2014).

Pada subab wacana dan pengecualian pada poin ketiga sudah dibahas bahwasannya implementasi suatu wacana berupa "pengimposan" pengetahuan kepada objek. Begitupun dengan masyarakat yang mematuhi wacana

keluarga berencana. Mereka tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, dengan kata lain wacana tersebut dibuat tanpa persetujuan objek atau masyarakat yang terdampak wacana tersebut. Masyarakat mematuhi wacana tersebut tanpa mempertanyakannya. Prosedur yang digunakan dalam penetapan wacana ini tentu tersebar menjadi bagian-bagian kecil pengetahuan yang mengatur dan mendisiplinkan tubuh masyarakat tidak dengan cara terpusat. Melainkan dengan pendistribusian lewat media seperti iklan di televisi maupun media cetak berupa koran bahkan baliho-baliho yang terpasang pada tiap sudut jalan yang menjadi bacaan dan tontonan masyarakat sehari-hari. Pengetahuan ini disampaikan berulang dengan amanat bahwa kunci rumah tangga bahagia dan sejahtera adalah dengan memiliki dua anak saja. Amanat dan pengetahuan ini terserap secara perlahan tapi pasti pada pandangan dunia masyarakat tentang kesejahteraan keluarga. Wacana ini bukan sebagai perintah yang keras dan tanpa sanksi jika tidak melaksanakannya. Namun masyarakat tanpa paksaan menerima wacana tersebut dan melaksanakannya sebagai sesuatu yang sudah sepatutnya.

Jika dipandang dari perspektif tujuan wacana keluarga berencana itu dibuat, pada dasarnya adalah untuk menangkal pertumbuhan penduduk yang menkhawatirkan (Lubis, 2014). Dengan kata lain wacana tersebut telah mendisiplinkan tubuh individu terkait dengan system reproduksi.

Foucault mengungkapkan bahwa pada era modern muncul berbagai wacana ilmiah sebagai pembenaran kehidupan modern. Berbagai institusi dan intelektual yang terlibat di dalamnya seperti dokter, psikolog, ahli hukum, sosiolog bahkan kaum kapitalis membuat prosedur pembentukan wacana untuk kepentingan masyarakat modern dengan berbagai alasan untuk mendisiplinkan tubuh masyarakat. Pendisiplinan tubuh ini diimplementasikan lewat teori dan strategi pendidikan. Wacana ilmiah yang

terbentuk kemudian berperan dalam menentukan yang benar dan salah pada kehidupan masyarakat moderen (Lubis, 2014)

Pandangan kehidupan pada era modern ini ditentang oleh Foucault terutama kepada penentuan benar dan salah yang bersifat universal. Menurutnya kita mendapatkan informasi terkait apa yang benar dan salah hanya dari satu perspektif wacana dominan pada masa itu. Analisis genealogi Foucault mengemukakan bahwasannya perlu mengetahui episteme dari wacana ilmiah dominan yang mempengaruhi pola pikir ilmuawan pada masa itu. Untuk mengetahui sebab mengapa wacana tersebut dominan pada masanya perlu dilakukan penelusuran asal usul dan dasar pengetahuan tersebut agar kelemahan dari wacana dominan tersebut dapat diketahui (Lubis, 2014)

3. Genealogi Foucault

Foucault (1977) menyampaikan bahwa penjara merupakan salah satu institusi yang krusial sifatnya pada kuasa yang mengatur perkembangan masyarakat modern. Agar institusi tersebut berperan dengan baik, masyarakat didisiplinkan lewat ilmu pengetahuan yang merupakan media implementasi dari *power* (kuasa). Masing-masing institusi menggunakan ilmu pengetahuan yang terkhusus pada bidangnya untuk mengendalikan lingkungan tertentu. Artinya konsep kuasa pada Foucault tidak terpusat seperti perspektif marxisme yang menyatakan bahwa kuasa terpusat pada pemilik modal (kapitalis) melainkan menyebar di berbagai aspek kehidupan.

Foucault (1978) menawarkan konsep *biopower* untuk memahami bagaimana pengaturan diimplementasikan pada populasi masyarakat yang lebih luas. Institusi mengimplementasikan biopower lewat pelatihan dan pendidikan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Implementasi biopower ini disebut dengan "*power-knowledge*". Salah satu contohnya yaitu pada abad ke-19

digarap program-program yang bertujuan mendisiplinkan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat modern lewat perbaikan saluran sanitasi, penggusuran lingkungan kumuh, pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan penggalakkan kampanye anti rokok (Lubis, 2014).

Bagi Foucault cara kerja *power* (kuasa) bukanlah dari atas ke bawah, melainkan mulai dari bawah ke atas. Artinya kuasa muncul dari objek atau masyarakat itu sendiri berupa ide yang diterapkan dalam skala kecil yang menyebar dan kemudian diimplementasikan lewat keputusan dan tindakan besar (Lubis 2014). Oleh karena itu, perlu dilakukan penelusuran asal usul dari suatu wacana. Tujuan penelusuran ini bukan untuk menemukan identitas asli yang mengkonstruksi wacana tersebut sehingga hasil dari analisis genealogi ini akan terpisah dari metafisika. Sebab pada metafisika adanya satu pemahaman universal dan mutlak dari kehadiran suatu wacana. Dengan menerapkan genealogi, maka akan ditemukan berbagai kemungkinan lain asal usul dari fenomena yang ada dalam kehidupan misal ruang angkasa, rahasia DNA, atom dan sebagainya yang berbeda dari perspektif dan asumsi masyarakat sebelumnya.

Genealogi Foucault memberikan fokus khusus tentang tubuh dan sejarah. Relasi kuasa memberikan pengendalian yang massif terhadap tubuh yang terlihat di ranah politik. Tubuh dikendalikan oleh relasi kuasa dan diatur untuk melakukan berbagai tugas. Definisi tubuh yang produktif adalah tubuh yang patuh (*docile body*) dan memberikan manfaat sesuai dengan episteme (landasan pengetahuan) pada zaman tersebut (Lubis, 2014).

Menurut Foucault suatu wacana menjadi dominan daripada wacana lainnya bergantung pada kekuasaan. Dalam menganalisis sebabnya tidak hanya diperlukan analisis sejarah tetapi juga penggalian lebih dalam terkait atas dasar apa wacana tersebut dibuat dan apa saja cara yang ditempuh dalam pendistribusiannya (Lubis, 2014).

Foucault (2005) mengungkapkan hubungan antara wacana dan kekuasaan dan "*decentring subject*". Wacana dihasilkan dari suatu prosedur yang terstruktur dan diatur, dikontrol serta diredistribusi oleh kekuasaan. Lubis (2014) memberikan contoh pengontrolan wacana tentang korupsi oleh Partai Demokrat. Langkah yang diambil adalah dengan mengadukan Metro TV dan TV One kepada komisi penyiaran dengan tujuan mempertahankan kekuasaan serta melindungi kekuasaan dari ancaman yang melemahkannya.

Contoh lainnya adalah kasus perselingkuhan artis Syahnaz yang merupakan adik dari Raffi Ahmad dengan lawan mainnya di sinetron Rendy Kjaernett. Beberapa saat setelah perselingkuhan itu terungkap, Syahnaz dan suaminya Jeje mengunggah video klarifikasi yang isinya mereka sudah saling memaafkan dan bertekad mempertahankan rumah tangganya. Tidak berhenti sampai disitu, kakak Syahnaz yaitu Raffi Ahmad sebagai salah seorang publik figur yang terkenal mengunggah video di laman instagramnya sedang duduk bersama Jeje, suami adiknya untuk bicara dari hati ke hati tentang kasus yang menimpa Syahnaz. Video tersebut berisi ungkapan maaf Raffi serta kesedihan Jeje sang suami. Terlihat kedua lelaki itu menangis saat membahas kasus yang menimpa keluarga mereka tersebut. Kedua video tersebut adalah bentuk kontrol dari keluarga Syahnaz untuk mengendalikan persepsi masyarakat yang sudah terlanjur menghujat Syahnaz sekaligus mengendalikan ancaman yang mengganggu pencitraan baik keluarga besar mereka. Terlebih lagi tak lama setelah video Raffi Ahmad dan Jeje dilansir dari laman liputan6.com muncul kabar bahwa Jeje bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai caleg dari Dapil Jawa Barat II DPR RI (Prastiwi, 2023). Simpati yang dihujani masyarakat terhadap Jeje sebagai sosok suami yang sabar dan kuat tentu memiliki dampak positif terhadap rencana pencalonan tersebut. Strategi-strategi yang dijalankan

tersebut merupakan bagian dari prosedur pembentukan suatu wacana.

Foucault menyatakan bahwa ada empat ranah di mana wacana dianggap membahayakan yaitu politik, seksualitas, kegilaan dan terakhir apa yang dianggap benar atau salah (Lubis, 2014). Poin terakhir merupakan bentuk dari keinginan untuk mendominasi dan menentukan kebenaran. Analisis genealogi pada keinginan untuk berkuasa ini dititik beratkan kepada analisis prosedur yang ditempuh yang bertujuan membentuk kontrol pada wacana.

Foucault menyatakan lima tahapan dalam analisis prosedur yang mengkonstruksi suatu wacana yang dikutip dari Lubis (2014); (1) Memahami pernyataan berdasarkan situasi yang sangat khusus, (2) mengidentifikasi situasi di mana pernyataan tersebut ada, (3) menetapkan batasan-batasannya, (4) menghubungkannya dengan pernyataan lain yang mungkin memiliki keterkaitan (seperti hubungan antara wacana dan aspek politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya), (5) menggambarkan variasi lain dari pernyataan yang diungkapkan.

Genealogi Foucault merupakan salah satu metode dalam menemukan wacana yang terpinggirkan oleh wacana dominan yang berlaku. Tujuannya tentu untuk melawan wacana dominan tersebut. Hal yang diperhatikan adalah menghindari pembentukan metode teoritis baru yang justru dapat membuat bentuk pengetahuan yang terpinggirkan itu ingin mendominasi dengan mengikuti norma-norma pengetahuan dan kebenaran yang sudah ada. Salah satu bentuk pengetahuan dan epistemologi yang terpinggirkan, yaitu epistemologi feminis. Epistemologi ini menunjukkan bagaimana pandangan dunia kelompok tertentu bisa berusaha melebihi batas-batasnya dan menggantikan pengetahuan atau teori yang ingin digantikannya (Hewett, 2004)

Pemahaman terhadap genealogi Foucault mengungkapkan hubungan antara kuasa dan pengetahuan berikut prosedur yang melekat padanya. Genealogi memberikan harapan pada wacana yang terpinggirkan untuk muncul kepermukaan menyuarakan aspirasi kaum marginal. Selain itu, pemikiran Foucault memberikan kesadaran bahwa pengetahuan dan kebenaran adalah bagian tak terelakkan yang ada dalam kehidupan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Barker, P. (1998). Michel Foucault: An Introduction. Edinburgh University Press.

Foucault, M. (1971). Orders of discourse. Social Science Information, 10(2), 7–30. https://doi.org/10.1177/053901847101000201

Foucault, M. (1976). The archaeology of knowledge. Harper & Row.

Foucault, M. (1977). Dicipline and Punish:The Birth of Prison. Trans. Alan Sheridan). Billing & Sons.

Foucault, M. (1978). The history of sexuality. Pantheon Books.

Foucault, M. (2001). "From The Order of Discourse." The Rhetorical Tradition: Readings from Classical Times to the Present. Trans. Ian McLeod. (Patricia Bizzell &; Bruce Herzberg, Eds.; 2nd ed.). Bedford/St. Martin's.

Foucault, M. (2008). The birth of biopolitics. Palgrave Macmillan.

Foucault, Michel. (2005). "The Discourse on Language." In Truth: Engagements Across Philosophical Traditions, edited by José Medina and David Wood, 315–335. John Wiley & Sons, Ltd. doi:10.1002/9780470776407.ch20.

Hewett, Martin A., "Michel Foucault : power/knowledge and epistemological prescriptions" (2004). Honors Theses. Paper 534.

Lubis, Y. A. (2014). Posmodernisme: Teori dan Metode. Rajawali Pers.

Prastiwi, D. (2023). 5 Fakta Jeje Govinda Resmi Gabung PAN dan Maju Jadi Caleg di Pemilu 2024. Https://Www.Liputan6.Com/Pemilu/Read/5365055/5-Fakta-Jeje-Govinda-Resmi-Gabung-Pan-Dan-Maju-Jadi-Caleg-Di-Pemilu-2024.

Turkel, G. (1990). Michel Foucault: Law, Power, and Knowledge. In Journal of Law and Society (Vol. 17, Issue 2).

TENTANG PENULIS

Tesaannisa, M.Hum. lahir di Bukittinggi pada tanggal 26 Maret 1990. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana pada Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang (UNP) tahun 2014. Penulis menyelesaikan pendidikan magister pada Program Studi Ilmu Susastra, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2016. Penulis bekerja sebagai Dosen PNS di Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2020-sekarang. Penulis aktif mengikuti seminar, aktif mempublikasi artikel pada jurnal nasional dan internasional. Penulis juga aktif sebagai mitra bestari (reviewer) pada jurnal nasional bereputasi. Penulis memiliki ketertarikan pada kajian sastra, filsafat dan budaya.

BAB 9

TEORI HABITUS DAN RANAH PIERRE BOURDIEU

Oleh : La Ode Abdul Munafi

A. Siapakah Pierre Bourdieu

Pierre Bourdieu lahir di sebuah kota kecil pedesaan di Perancis Tenggara pada 1 Agustus 1930. Ia terlahir dari sebuah keluarga kelas menengah rendah. Ayahnya bekerja sebagai seorang petugas pos desa. Pada awal 1950-an, Bourdieu masuk *Ecole Normale Superieure*. Bersama Louis Althusser, ia belajar filsafat di perguruan tinggi bergengsi di Paris itu. Hal menarik dari sikapnya kala memasuki masa akhir studinya adalah ia menolak menulis tesis karena keberatan terhadap kualitas pendidikannya yang pas-pasan dan juga terhadap struktur sekolahnya yang otoriter (Wirawan, 2012).

Tamat dari *Ecole Normale Superieure*, maka sejak 1955, Bourdieu menjadi pengajar di sebuah sekolah provinsi di Moulins, hingga akhirnya ia menjalani "wajib militer", dan dikirim bersama pasukan Perancis di Aljazair. Di tempat penugasannya––Aljazair––pada 1958, Bourdieu menjadi pengajar di Universitas Aljazair. Selama dua tahun bertugas di Aljazair (1958-1960), Bourdieu juga melakukan riset etnografis terkait dengan benturan di masyarakat melalui studi yang dilakukannya pada masyarakat Kabyle yang merupakan suku dari Berbers. Penelitian dari Bourdieu ini kemudian menjadi landasan terhadap reputasinya pada bidang antropologi. Hasil penelitiannya ini kemudian menjadi buku pertamanya, *Sociologie de L'Algerie (The Algerians)*, yang kemudian meraih sukses di Perancis. Buku ini diterbitkan di Amerika pada 1962.

Setelah masa penugasannya di Aljazair berakhir, pada 1960, Bourdieu kembali ke Perancis. Di negeri asalnya itu, ia bekerja sebagai asisten sosiologi Raymond Aron di Universitas Paris. Di masa itu, ia juga sering menghadiri perkuliahan antropologi dari Levi Strauss di *College de France*. Pada 1968, Bourdieu memimpin *Centre de Sociologie Europenne,* sebuah pusat riset ilmu sosial yang didirikan Raymond Aron. Institusi ini dipimpinnya hingga wafat. Sejak 1981, Bourdieu juga menjabat sebagai ketua jurusan Sosiologi di *College de France* yang sebelumnya dijabat Raymond Aron. Sejak itu, Bourdieu telah menjadi pemikir yang terhormat (Martono, 2012).

Dalam tahun-tahun berikutnya, Bourdieu menjadi tokoh utama di lingkungan intelektual Perancis, dan akhirnya menjadi tokoh dunia. Bersama Luc Boltanski, ia meluncurkan jurnal interdisipliner, *Actes de la recherché en science sociales*, berdasarkan dengan jurnal tersebut, ia kemudian berusaha mentransformasi kanon-kanon produksi sosiologis yang sudah diterima yang kemudian dapat menopang kekakuan ilmiah sosiologi. Di tahun 1993, Bourdieu mendapatkan penghargaan *Medelaille d'or du Centre National de la Recherche Scientifique* (CNRS). Kemudian, pada tahun 1996, ia juga mendapatkan "Penghargaan Goffman" dari *University of California Barkley*, dan pada 2002 ia meraih Medali *Huxley* dari *Royal Anthropological Institute*. Selama masa berkarir, karya-karya dari Bourdieu telah memberikan dampak berbeda terhadap pada beberapa bidang keilmuan, termasuk pada bidang pendidikan, antropologi, dan juga sosiologi. Ia meninggal dunia pada 23 Januari 2002 dalam usia 71 tahun.

Pierre Boudieu, ilmuan sosial Perancis, mempunyai latar belakang pendidikan filsafat yang sangat kuat. Gagasan dasarnya dikembangkan, diulangi, dan dirumuskan kembali dalam lebih dari dua puluh lima buku karyanya. Gagasan tersebut terelaborasi dalam beberapa konsep utama yang diajukannya, di antaranya adalah *habitus* dan *ranah*. Gagasan pemikir sosial yang penuh diwarnai "pemberontakan" ini patut diperhitungkan karena upayanya menjembatani antara teori dan tindakan (Haryatmoko, 2003:5).

B. Menjembatani Dikotomi Paradigma

Habitus dan *ranah* yang didiskusikan dalam *essay* ini merupakan dua kerangka konseptual Bourdieu yang didedikasikan untuk menjembatani dikotomi paradigma dalam ilmu sosial––objektivisme vs subjektivisme––dalam menjelaskan dunia sosial, atau pertentangan yang ia sebut *absurd* antara individu dan masyarakat (Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2012). Dalam dikotomi paradigma tersebut, objektivisme dipandang mewakili bangunan pengetahuan yang berusaha menjelaskan dunia sosial dengan menempatkan pengalaman individual dan subjektivitas, dan serta memfokuskan diri pada kondisi yang objektif dengan menstrukturkan kebebasan praktis kesadaran manusia. Sebaliknya, subjektivisme dianggap sebagai bangunan pengetahuan menegai dunia sosial yang didasarkan pada pengalaman utama dan perspektif secara individualis (Johnson, 2012). Ia menempatkan pemikiran Durkheim tentang fakta sosial, strukturalisme Saussure, strukturalisme Levi Strauss, dan struktural Marxisian pada kutub paradigma objektivisme. Perspektif-perspektif tersebut dikritik Bourdieu karena hanya berfokus pada struktur-struktur objektiv dan mengabaikan proses konstruksi sosial yang merupakan sarana bagi aktor untuk merasakan, memikirkan, dan mengonstruksi struktur-struktur itu, dan kemudian melanjutkan bertindak di atas landasan itu. Menurut Bourdieu, penganut pandangan objektivis mengabaikan agensi dan agen, sementara ia lebih menyukai pandangan teoretisi strukturalis tanpa mengabaikan agen. Dengan kerangka berfikir seperti ini, Bourdieu ingin mengembalikan aktor ke kehidupan nyata yang menurutnya telah lenyap di tangan Levi Strauss dan para strukturalis lainnya, khususnya Althusser (Ritzer, 2012).

Kerangka berpikir di atas kemudian menggerakkan Bourdieu ke arah pendirian penganut paradigma subjektivisme, pendirian yang pada masa studinya didominasi oleh eksistensialisme Sartre. Selain itu, fenomenologi Schutz, interaksionisme simbolik Blumer, dan etnometodologi Garfinkel dianggapnya sebagai contoh subjektivisme, yang berfokus pada

cara agen memikirkan, menjelaskan, atau menggambarkan dunia sosial sambil mengabaikan struktur-struktur objektif dimana proses itu muncul. Bourdieu melihat para teoretisi yang berdiri di kutub paradigma subjektivisme hanya berkonsentrasi pada agensi (keagenan), dan mengabaikan struktur. Ia mengkritik cara pandangan penganut paradigma subjektivisme, yang menurutnya, telah melangkah sangat jauh serta memberikan sangat banyak kekuasaan kepada aktor. Selai itu, dalam prosesnya juga aktor banyak mengabaikan batasan-batasan secara struktural terhadap mereka (Wirawan, 2012).

Kedua kutub paradigma––objektivisme maupun subjektivisme––dalam pandangan Bourdieu, yang akhirnya ''gagal'' memahami apa yang ia sebut sebagai "objektivitas-subjektif" (*the objectivity of the subjective*). Argumen teoritis yang ia ajukan adalah paradigma objektivisme gagal mengenali realitas sosial di tataran tertentu yang dibentuk oleh konsepsi dan representasi yang dilakukan individu-individu terhadap dunia sosial, dan sebaliknya, pradigma subjektivisme gagal memahami landasan sosial yang membentuk kesadaran.

Dalam kritiknya terhadap paradigma objektivisme, Bourdieu menulis dalam sebuah *essay*nya, berjudul *Distinction*. Distinction adalah sebuah buku karya Pierre Bourdieu yang memberikan kritik sosial terhadap penilaian selera dalam budaya Prancis. Buku ini didasarkan pada penelitian empiris Bourdieu dari tahun 1963 hingga 1968. Dalam Distinction, Bourdieu berpendapat mereka yang memiliki modal sosial dan budaya tinggi, atau status, adalah penengah selera dan selera khusus seseorang berasal dari lingkungan dan kelas sosial di mana seseorang hidup, yang merupakan bidang seseorang. Kesimpulan Bourdieu adalah bahwa selera ditentukan oleh asumsi sosial orang yang berubah, ditentukan oleh tempat, periode, dan kelas sosial. Sebuah kelas misalnya, akan ditentukan oleh bagaimana ia dipersepsi, dan bagaimana pula dia mempersepsi, oleh apa yang dikonsumsinya, yang tidak selalu harus terlihat simbolis, maupun oleh posisinya di dalam relasi-relasi produksi. Namun, pandangannya tentang

objektivisme, yang lebih populer daripada subjektivisme, membuatnya menjadi dasar analisis sosial. Pandangan ini malah mendorong adopsi teori kehendak bebas, yang dapat mengonstruksi makna, di mana tindakan dan karya (seni) direduksi menjadi intensi-intensi sadar pengarangnya. Dia percaya bahwa kondisi material eksistensi dan aspek simbolis kehidupan sosial sangat terkait satu sama lain. Dia percaya bahwa satu aspek tidak dapat direduksi ke yang lain (Johnson, dalam Boudieu, 2012).

Bagi Bourdieu, tujuan sosiologi adalah untuk membongkar struktur-struktur berbeda dunia sosial yang terkubur di dalam semesta sosial. Pembongkaran dilakukan dengan cara mencari hubungan yang tidak terlihat dibelakang agen seperti yang dikerjakan pendekatan objektivisme, dan sekaligus menyelidiki persepsi-persepsi akal sehat dan tindakan agen, persoalan yang terus menyibukkan pendekatan subjektivisme. Dua paradigma––objektivisme dan subjektivisme––dalam pandangan Bourdieu, sesungguhnya berada dalam hubungan dialektis ketika menjelaskan realitas sosial. Sebab, mustahil melepaskan pandangan dari tatanan dunia idealisme-objektivis, tanpa dipaksa melepaskan aspek-aspek aktivitas pengertian akan dunia dengan mereduksi kesadaran hanya sebagai catatan belaka. Karena itu, sosiologi dalam pandangan Bourdieu, harus membaca realitas sosial dengan cara pandang, yang seolah "antinomi", strukturalis dan konstruktivis. Dengan strukturalis berarti sosiologi berusaha mencari proses pola relasi yang bekerja dibelakang agen. Sementara, dengan konstruktivis, berarti sosiologi menyelidiki persepsi *commonsense* dan tindakan individu. Dengan demikian, membaca individu atau kelompok sosial harus bolak-balik antara struktur objektif dan subjektif. Bourdieu menggambarkan realitas sosial sebagai proses dialektika dari internalisasi atas eksternalitas dan eksternalisasi atas internalitas. Struktur objektif dan pengertian subjektif bertemu dalam interaksi dialektis antara agen dan struktur. Konferensi itulah yang Bourdieu sebut sebagai *praktik* (Mutahar, 2011). Konsep tentang

praktik kemudian melandasi argumen teoretis Bourdieu untuk mengelakkan dikotomi dua paradigma––objektivisme vs subjektivisme––dalam menjelaskan realitas sosial (Ritzer, 2012). Menurutnya, praktik sosial dihasilkan oleh hubungan dialektika antara struktur dan agen. Praktik tidak ditentukan secara objektif, dan juga bukan hasil kemauan bebas agen.

Untuk menggambarkan perhatiannya terhadap hubungan dialektika antara struktur dan cara individu membangun realitas sosial, Bourdieu memberi label orientasi teorinya dengan sebutan strukturalisme-konstruktivis, konstruktivisme-strukturalis, atau strukturalisme genetis. Istilah strukturalisme yang digunakan Bourdieu sama sekali berbeda dengan yang berlaku dalam tradisi Saussurean maupun Levi Straussian. Melalui strukturalisme atau strukturalis, Bourdieu ingin menunjukkan bahwa di dalam dunia sosial sendiri, dan bukan hanya dalam sistem simbol (bahasa, mitos, dan sebagainya) terdapat struktur-struktur objektif yang independen dari kesadaran dan kehendak agen, yang mampu mengarahkan dan menghambat praktik, atau representasi mereka. Pada sisi lain, melalui konstruktivisme, Bourdieu ingin menunjukkan bahwa ada asal-usul sosial bercabang dua, yakni disatu sisi, asal-sul berupa skema persepsi, pikiran, dan tindakan yang membentuk apa yang disebutnya sebagai *habitus*, dan di sisi lain, asal-usul berupa struktur sosial, khususnya apa yang ia sebut sebagai *ranah*, dan berupa kelompok, terutama yang biasa disebut kelas sosial (Bourdieu, 2011). Argumen teoretis Bourdieu tentang strukturalisme-konstruktivis, konstruktivisme-strukturalis, atau yang ia ringkas melalui sebutan strukturalisme genetis dapat dilihat dari penggalan uraiannya berikut ini:

Analisis struktur objektif tidak dapat dipisahkan dari analisis asal-usul struktur mental individual yang hingga taraf tertentu merupakan produk penggabungan struktur sosial; juga tidak dapat dipisahkan dari analisis asal-usul struktur sosial itu sendiri; ruang sosial dan kelompok yang menempatinya adalah produk dari perjuangan historis (di mana agen berpartisipasi sesuai dengan posisi mereka di dalam ruang sosial, dan sesuai

dengan struktur mental yang menyebabkan agen dapat memahami ruang sosial tersebut) (Bourdieu, *dalam* Ritzer & Douglas J. Goodman, 2012).

Dari argumen teoretis yang dibangunnya nampak bahwa Bourdieu berupaya menjembatani dua kutub paradigma––strukturalisme vs objektivisme––dalam menjelaskan realitas sosial, dan hingga taraf tertentu berhasil. Namun, di dalam karyanya ada bias ke arah strukturalisme. Karena alasan itulah, Bourdieu bersama Foucault, dan yang lainnya, dianggap sebagai seorang *post-strukturalis.* Di dalam karyanya ada kontinuitas dengan strukturalisme yang lebih banyak ketimbang konstruktivisme. Namun, tidak seperti pendekatan dari kebayakan teoretisi lain––fenomenologis dan interaksionis simbolik––menurutnya, cara agen merasa berdasarkan posisinya di dalam ruang sosial dan membangun kehidupan sosial adalah penting sebagai kajian sosiologi. Namun, persepsi dan konstruksi yang terjadi dalam kehidupan sosial itu digerakkan dan dikendalikan oleh struktur. Pemikiran ini tercermin dalam perspektif teoretisnya, bahwa:

> Analisis atas struktur-struktur objektiv tidak terpisahkan dari analisis asal-usul genesis, di dalam para individu biologis (struktur mental aktor individual), struktur-struktur mental yang pada tingkat tertentu merupakan produk penggabungan struktur-struktur sosial; juga tidak terpisahkan dari analisis genesis atau struktur-struktur sosial itu sendiri (Bourdieu, *dalam* Ritzer, 2012).

Pada akhirnya dapat dijelaskan bahwa inti argumen teoretis yang dibangun Bourdieu dalam upayanya menjembatani dikotomi dua kutub paradigma dalam ilmu sosial––objektivisme vs subjektivisme––terletak pada konsepnya tentang *habitus* dan *ranah*, serta hubungan dialektika keduanya yang membentuk realitas sosial. Menurutnya, *habitus* terdapat di dalam pemikiran aktor, sedangkan *ranah* berada di luar pikirannya. Kedua konsep dasar ini dibahas lebih lanjut dalam dua sub bab berikut.

C. Habitus

Kata *habitus* berasal dari bahasa Latin yang artinya mengacu pada kondisi, penampakan, atau situasi yang tipikal, atau *habitual*, khususnya pada tubuh (Jenkisn, 2013). Konsep dari *habitus* bukanlah konsep yang diciptakan Bourdieu. Ia hanya memperluas kembali konsep *habitus* yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebelumnya seperti Marcel Mauss. Konsep tersebut juga ada pada karya Aristoteles, Max Weber, Norbert Elias, Hegel, Durkheim, dan Edmund Husserl. Meskipun menggunakan istilah yang beda, akan tetapi memiliki arti sama. Pada mulanya, istilah *habitus* ini menggunakan istilah *hexis*, kemudian oleh Thomas Aquinas menerjemahkannya menggunakan bahasa Latin sehingga lahir istilah *habitus* (Martono, 2012).

Dalam pemahaman Bourdieu, *habitus* dapat dijelaskan dari beberapa aspek, yaitu:

1. Merupakan seperangkat pengetahuan tentang bagaimana kemudian agen dapat memahami dunia, kepercayaan dan nilai-nilai di kehidupan sehari-hari yang hanya sebatas tersimpan dalam ingatan secara pasif.
2. Milik agen yang artinya agen oleh tindakan, nilai, atau cara bertindak dipengaruhi oleh kondisi budaya yang objektif. Hal ini juga berlaku untuk agen dalam kehidupan sehari-hari.
3. Habitus selalu dibentuk dalam momen praktik; ini berarti bahwa habitus dipengaruhi dan dibentuk oleh agen saat menghadapi masalah dalam kehidupan, membuat keputusan, atau konteks di mana habitus berlangsung. Oleh karena itu, habitus terlibat dalam kehidupan sehari-hari.
4. Bertindak dengan kesadaran. Ini disebabkan oleh kebiasaan yang dianut oleh agen, yang dapat dilihat dari tindakan tubuh mereka, seperti cara mereka berjalan, meludah, makan, dan berbicara. Oleh karena itu, habitus berfungsi sangat baik dengan sistem, struktur, hukum, aturan, dan juga kategori pemaknaan di kehidupan sehari-hari, serta persepsi dari agen. Jadi, habitus dapat berfungsi ketika agen tidak

mempertimbangkan konteks dari sosial-kultural dan bagaimana keberadaan itu dibentuk (Mutahir, 2011).

Habitus juga dapat dipandang sebagai hasil dari proses yang sangat panjang dari pencangkokan individu (*procces of incultation*). Hal ini dimulai sejak di masa kanak-kanak yang kemudian akan menjadi seperti "penginderaan kedua" (*secon sense*), atau hakikat alamiah kedua (*secon nature*). Dalam pandangan Bourdieu, disposisi-disposisi yang direpresentasikan *habitus* bersifat:

1. Bertahan lama, artinya kehidupan seorang agen mampu tahan pada rentang waktu tertentu.
2. Dapat dialih pindahkan, dalam artian agen mampu menghasilkan praktik-praktik diberbagai arena dengan ragam aktivitas.
3. Merupakan struktur yang distrukturkan. Dengan mengikutsertakan kondisi-kondisi secara sosial-objektif di dalam proses-proses pembentukannya. Hal ini yang menjadi penyebab dari munculnya kesamaan dari *habitus* pada diri agen-agen yang bersumber dari kelas sosial yang sama, kemudian menjadi justifikasi bagi pembicaraan tentang *habitus* di sebuah kelas. Conohnya pada *Distinction*, Bourdieu menggambarkan secara statistik bagaimana *habitus* kelas dari pekerja melahirkan preferensi-preferensi yang hampir semuanya analog di sejumlah besar dari praktik kultur mereka. Di kota atau wilayah manapun mereka tinggal, setiap kelas dapat memiliki *habitus* yang berbeda-beda. *Habitus* ini juga kemudian dilaksanakan oleh kelas dominan kepada kelas terdominasi. Kelas dominan ini akan selalu memaksakan *habitus*nya di berbagai mekanisme kekuasaan.

4. Karena mereka adalah struktur-struktur yang menstrukturkan, mereka memiliki kemampuan untuk mengembangkan praktik-praktik yang dapat sesuai dengan situasi tertentu (Johnson, 2012).

Habitus setidaknya memiliki tiga pemakanaan, yaitu:
1. *Habitus* adalah nalar yang sederhana; hanya berlaku selama habitus ada dalam pemikiran aktor.
2. Gaya hanya ada di dalam dan disebabkan oleh praktik aktor dan interaksi mereka dengan lingkungannya, seperti bicara dan bergerak. Habitus bukan ide idealis dan abstrak; itu bukan hanya manifestasi dari perilaku, tetapi merpakan komponen penting dari perilaku.
3. Tubuh adalah rumah bagi takxonomi praktik dan skema generativ habitus. Dalam penalaran dan pengalaman sensorik, segala sesuatu yang dapat diakses panca indra digambarkan dalam cara agen berhadapan dengan realitasnya. Setiap hal diwakili oleh simbol, seperti laki-laki/perempuan, depan/belakang, atas/bawah, panas/dingin, siang/malam, dll (Mutahir, 2011).

Dalam argumen teoretis Bourdieu, *habitus* dipahami sebagai struktur mental (kognitif) yang digunakan oleh aktor untuk berinteraksi dengan kehidupan sosial (Wirawan, 2012). Aktor menerima set skema atau pola yang diinternalisasikan yang mereka gunakan untuk merasakan, memahami, menyadari, dan menilai dunia sosial. Pola-pola ini membentuk tindakan dan penilaian aktor. Habitus adalah hasil internalisasi struktur dunia sosial atau struktur sosial yang diinternalisasikan, menurut dialektika (Bourdieu, dalam Ritzer dan Dauglas J. Goodman, 2012).

Habitus merupakan produk dari internalisasi struktur yang ada dunia sosial, dan itu tercermin pada pembagian yang objektif di struktur kelas, seperti usia, kelas, kelompok sosial, dan jenis kelamin. Ini adalah kombinasi dari habitus individu dan struktur objektif lapangan, yang merupakan ruang sosial

tempat individu dan kelompok berinteraksi. Habitus juga dipengaruhi oleh jenis modal yang dimiliki individu, seperti modal ekonomi, budaya, dan social. *Habitus* adalah hasil dari lamanya posisi aktor dalam kehidupan sosial. Jadi, habitus akan berbeda-beda tergantung pada posisi sosial seseorang. Tidak setiap orang memiliki kebiasaan yang sama. Individu dengan posisi sosial yang sama cenderung memiliki kebiasaan yang sama. Dengan demikian, habitus juga dapat dianggap sebagai fenomena kelompok. Orang dapat melihat dunia sosial melalui habitus mereka, tetapi banyak habitus berarti kehidupan sosial dan strukturnya tidak dapat dipaksakan seragam untuk semua aktor.

Habitus yang ada pada waktu tertentu merupakan hasil dari ciptaan kehidupan kolektif yang berlangsung selama masa atau periode historis yang berkepanjangan. *Habitus* yang merupakan produk historis menciptakan tindakan individu dan kolektif, dan karenanya sesuai dengan pola yang ditimbulkan oleh sejarah (Bourdieu *dalam* Ritzer dan Dauglas J. Goodman, 2012). Kebiasaan dari individu tertentu di dapatkan melalui pengalaman hidup dan memiliki fungsi tertentu di dalam sejarah dunia sosial, dimana kebiasaan itu dapat terjadi. Selain dapat bertahan lama, *habitus* dapat pula berubah-ubah. Artinya, dapat dialihkan dari satu bidang ke bidang yang lainnya. Akan tetapi, dapat dimungkinkan bahwa bagi seseorang dapat memiliki *habitus* yang tak pantas, dan bisa saja menderita. Hal ini oleh Bourdieu menybutnya sebagai *hysteresis*.

Dengan demikian, *habitus* diciptakan dan pula dihasilkan dari kehidupan social seseorang. Di satu sisi, *habitus* merupakan struktur yang terstruktur, atau distrukturisasi oleh dunia sosial. Di sisi lain, habitus adalah struktur yang terstruktur. Dengan kata lain, *habitus* adalah dialektika hasil internalisasi dari eksternalitas, dan juga eksternalisasi dari internalitas. Dalam proses interaksi dialektis terbut, maka struktur objektif dan pengertian-pengertian subjek, struktur, dan agen bertemu. Pertemuan tersebut yang disebut dengan *praktik. Praktik* menurut (Bourdieu *dalam* Mutahir, 2011) terdiri atas dua

karakteristik, yaitu: (a) terdapat dalam ruang dan waktu, mengingat interaksi sosial memakan waktu, dan berlangsung dalam suatu ruang tertentu, dan (b) diatur dan digerakkan secara tidak sadar atau tidak sepenuhnya sadar. Dalam hal ini, tindakan sosial merupakan hasil proses improvisasi agen dan kemampuan untuk berperan dalam interaksi sosial. Agen bukan hanya berhadapan dengan dunia sosialnya tetapi sekaligus menjadi bagian integral dunia sosial. Di dalamnya, agen tumbuh, belajar, dan mendapatkan serangkaian kompetensi *praktik* kultural, termasuk peran dan identitas sosial. Hal itu menyertai agen dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dipersepsikan agen cenderung tentang bagaimana keberadaan dirinya sesuai dengan dunia sosial. Pengetahuan agen diarahkan bagaimana menjaga kebiasaan yang telah ada. Pada titik inilah, struktur sosial dan pengetahuan agen akan struktur sosial tersebut menghasilkan kebiasaan sosial. Agen bergerak atau bertindak dalam kebiasaan. Kebiasaan menjadikan agen dalam bertindak merasa ada di dalam dunia sosialnya.

Meskipun *habitus* merupakan sebuah struktur yang diinternalisasikan, yang mengendalikan pikiran dan pilihan tindakan, namun *habitus* tidak menentukannya. Kurangnya determinisme ini merupakan salah satu hal utama yang membedakan pendirian Bourdieu dari pendapat teoretisi strukturalis dominan. Namun, menurut Bourdieu, *habitus* semata-mata mengusulkan apa yang sebaiknya dipikirkan orang, dan apa yang sebaiknya mereka pilih untuk dilakukan (Ritzer dan Dauglas J. Goodman, 2012). Dalam menentukan pilihannya, aktor mempertimbangkan secara mendalam dengan berdasarkan pada kesadaran, meskipun pada proses pengambilan dari keputusan tercermin adanya peran *habitus.* Oleh *habitus* menyiapkan prinsip-prinsip, dimana dengan prinsip tersebut, aktor membuat pilihan dan menentukan strategi yang dapat digunakan dalam kehidupan sosialnya. Melalui argumen teoretisnya tentang penggunaan konsep *habitus*, Bourdieu dapat menghindari keharusan memilih antara sosio-kultural objektivisme dan subjektivisme, menghindari

pemikran filsafat tentang subjek tanpa melepaskan diri dari pemikiran tentang agen, atau menghindarkan diri dari filsafat tentang struktur, tetapi tak lupa memperhatikan pengaruhnya terhadap, dan melalui agen.

D. Ranah

Dalam kehidupan sosial, agen tidak bertindak dalam ruang hampa, melainkan di dalam situasi-situasi sosial konkrit yang diatur oleh seperangkat relasi sosial yang objektiv. Agar bisa memahami sebuah siatuasi atau suatu konteks tanpa kembali jatuh ke dalam determinisme analisis objektivistik inilah, Bourdieu mengembangkan konsep *ranah*, yang menurutnya lebih bersifat relasional ketimbang struktural (Johnson *dalam* Bourdieu, 2012). Dalam argumen teoretisnya, Bourdieu berpandangan bahwa pembentukan sosial apapun distrukturkan melalui serangkaian ranah yang terorganisasi secara hirarkis (ranah ekonomi, ranah pendidikan, ranah politik, ranah kultural, dan sebagainya). Ranah-ranah didefisinikan sebagai ruang yang terstruktur dengan kaidah-kaidah keberfungsiannya sendiri, dengan relasi-relasi kekuasaannya sendiri yang terlepas dari kaidah politik dan kaidah ekonomi, kecuali dalam kasus ranah ekonomi dan ranah politik itu sendiri. Kendati setiap ranah relatif otonom, namun secara struktural tetap *homolog* satu sama lain. Strukturnya, di momen apapun, ditentukan oleh relasi-relasi di antara posisi-posisi yang ditempati agen-agen di ranah tersebut. Ranah, dengan demikian, merupakan suatu konsep dinamis di mana perubahan posisi-posisi agen mau tak mau menyebabkan perubahan struktur ranah.

Ranah menurut Bourdieu juga merupakan arena kekuatan (Mutahir, 2012). Di dalamnya terdapat usaha perjuangan perebutan sumber daya (modal), dan juga upaya memperebutkan akses terhadap kekuasaan. Perebutan tersebut dalam rangka untuk memperoleh posisi dalam ranah. Posisi agen dalam ranah tergantung dari jumlah kepemilikan (volume) modal yang dimiliki, komposisi modal, dan perubahan volume

dan komposisinya adalam waktu. Dalam ranah terjadi reproduksi dan atau transformasi. Modal menurut Bourdieu adalah hubungan sosial. Modal merupakan suatu energi sosial yang hanya ada dan membuahkan hasil-hasil dalam ranah perjuangan di mana modal memproduksi dan mereproduksi. Bourdieu menyebutkan sejumlah jenis modal yang menjadi pertaruhan dalam ranah, meliputi: (a) modal ekonomi, misalnya alat-alat produksi (mesin, tanah, tenaga kerja), materi (pendapatan dan benda-benda), dan uang, (b) modal sosial, termanifestasikan melalui hubungan-hubungan dan jaringan hubungan-hubungan yang merupakan sumber daya yang berguna dalam penentuan dan reproduksi kedudukan-kedudukan sosial, (c) modal kultural, yaitu keseluruhan dari kualifikasi secara intelektual yang diproduksi secara formal maupun warisan yang diperoleh dari keluarga. Tercakup dalam modal ini seperti, ijazah, pengetahuan yang sudah diperoleh, kode-kode budaya, cara berbicara, cara pembawaan, kemampuan menulis, tatakrama atau sopan santun, cara bergaul, dan sebagainya, yang berperan dalam penentuan dan reproduksi kedudukan-kedudukan sosial, dan (d) modal simbolis, yang dipahami tidak lepas dari kekuasaan simbolis, yakni kekuasaan yang memungkinkan untuk mendapatkan setara dengan apa yang diperoleh melalui kekuasaan fisik dan ekonomi, berkat akibat khusus suatu mobilisasi. Modal-modal tersebut dipertaruhkan dan diperebutkan di dalam arena.

Selanjutnya, struktur ranah membimbing dan memberikan strategi bagi agen yang memiliki posisi, individu atau kelompok, melindungi atau meningkatkan posisi mereka untuk memaksakan prinsip penjenjangan sosial yang menguntungkan bagi mereka. Terkait hal ini, Bourdieu membedakan antara pengertian strategi dengan pertarungan. Strategi dipakai agen sebagai sesuatu yang biasa. Tujuan strategi adalah untuk akumulasi modal simbolis. Sasaran strategi adalah untuk mobilitas dan diperolehnya kekayaan, kekuasaan, dan status. Strategi mengandaikan konteks sosial-kultural yang sudah ada dan statis. Sedangkan pertarungan berlangsung

antara kolektivitas, sebagai dukungan heterodoksi melawan ortodoksi, dan membawah pada perubahan sosial-kultural. Strategi-strategi agen tergantung pada posisi yang ditempati dan modal yang dimiliki di dalam ranah. Kekuatan dan bentuk strategi tergantung pada posisi yang ditempati agen dalam hubungan kekuasaan (*rapport de force*). Mereka yang berada di posisi dominan cenderung mencari strategi untuk mempertahankan posisinya, sedangkan mereka yang didominasi akan mencari strategi untuk memperbaiki posisinya. Strategi digunakan agen dalam ranah perjuangan, baik untuk mempertahankan posisi, memperbaiki posisi, membedakan diri, atau memperoleh posisi-posisi baru. Strategi merupakan hasil yang terus berlanjut dari interaksi antara disposisi habitus dan kendala serta segala kemungkinannya. Strategi merupakan orientasi spesifik dari praktik. Strategi bukanlah semata hasil dari suatu perencanaan yang sadar dan terarah secara mekanistik. Bourdieu menguraikan dua tipe strategi, yaitu: (a) strategi reproduksi (*reproduction strategies*), yang dirancang oleh agen yang bertujuan untuk meningkatkan atau mempertahankan modal menuju ke arah masa depan. Stratagei ini merupakan sekumpulan praktik. Jumlah dan komposisi modal serta kondisi sarana produksi menjadi patokan utama dalam strategi ini, (b) strategi penukaran kembali (*reconvertion strategies*), yang berkenaan dengan pergerakan-pergerakan agen dalam ruang sosial. Ruang sosial sebagai tempat pergerakan agen, terstruktur di dalam dua dimensi kehidupan, yaitu keseluruhan dari jumlah modal secara terstruktur dan juga membentuk jenis modal secara dominan dan juga terdominasi (Mutahir, 2011).

Selain dua tipe strategi di atas, Bourdieu juga mengemukakan beberapa jenis strategi lain, yaitu: (1) strategi investasi biologis, yang berfokus pada pelestarian keturunan dan menjamin pewarisan modal bagi generasi berikutnya untuk meningkatkan kualitas hidup generasi berikutnya; (2) strategi pewarisan, yang berfungsi untuk menjamin kekayaan, terutama kekayaan material, karena kekuatan relatif lebih dominan

daripada modal ekonomi; (3) pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk memastikan bahwa agen memiliki kemampuan yang diperlukan dalam struktur sosial, menerima warisan kelompok, atau bahkan memperbaiki posisi sosial mereka; (4) Tujuan dari pendekatan investasi ekonomi adalah untuk mengembangkan atau mempertahankan berbagai jenis modal. Investasi adalah modal sosial dan ekonomi yang membangun hubungan sosial dalam jangka panjang dan jangka pendek; dan (5) strategi investasi simbolis yang bertujuan untuk mempertahankan atau meningkatkan pengakuan sosial. Strategi ini bertujuan memproduksi persepsi dan penilaian yang mendukung kekhasan, misalnya pewarisan nama, yang selain mendorong upaya untuk dihargai, juga merupakan tindakan pelestarian *capital* simbolik (Mutahir, 2011). Penggunaan strategi yang digunakan oleh agen merupakan Upaya untuk mempertahankan posisi, perbaikan pada posisi, membedakan diri, atau untuk memperoleh posisi-posisi terbaru di dalam ranah.

Berdasarkan uraian di atas, maka praktik sosial merupakan integrasi antara habitus dikalikan modal, dan ditambahkan ranah (Mutahir, 2011). Secara ringkas Bourdieu menyatakan rumus generatif untuk menerangkan praktik sosial dengan persamaan: (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik. Dengan demikian, konsep habitus dan ranah (di dalamnya termasuk modal dan strategi) terkait amat erat. Karena, untuk bisa berhasil dalam salah satu ranah, agen perlu mempunyai habitus, modal, dan strategi yang tepat di dalam ranah bersangkutan

E. Tinjauan Akhir

Kontribusi terbesar Bourdieu dalam menganalisis masyarakat dan kebudayaan adalah penggunaan konsep *habitus* yang dianggap berhasil mengatasi masalah dikotomi objektivisme *vs* subjektivisme, mikro *vs* makro, individu *vs* masyarakat, agen *vs* struktur sosial, *nature vs history*, kebebasan *vs* determinisme, material *vs* simbolis, kesadaran *vs*

ketidaksadaran, dalam menjelaskan realitas sosial. Selain itu, konstribusi Bourdieu lainnya adalah pemembongkarannya terhadap mekanisme dan strategi dominasi. Dalam perspektif ini, dominasi tidak lagi melulu diamati dari akibat-akibat luar tetapi juga melalui akibat yang dibatinkan (*habitus*). Dengan menyingkap mekanisme tersebut kepada para pelaku sosial (agen), Bourdieu memberi argumen yang dapat menggerakkan praktik (tindakan sosial). Selain konsep *habitus,* ia juga menguraikan penjelasannya tentang konsep ranah (*field)*, modal (*capital)*, dan strategi aktor. Melalui penjelasan konsep-konsep tersebut, relasi antara agen dan struktur terjalin secara dialektik, saling memengaruhi dan memperantarai (bermediasi), tidak saling menafikan, tetapi saling bertaut dalam sebuah praktik sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Bourdieu, Pierre (2011). *Choses Dites; Uraian dan Pemikiran Pierre Bourdieu,* terjemahan Ninik. R. Sjams.Yogyakarta. Kreasi Wacana.

Haryamoko (2003). *Menyingkap Kepalsuan Budaya Penguasa*, dalam Majalah Basis Nomor 11-12, Tahun ke-52, November-Desember 2003, hal.5-23

Johnson, Randal (2012). *Pengantar Pierre Bourdieu tentang Seni, Sastra, dan Budaya*, dalam Pierre Bourdieu, "Arena Produksi Kultural: Sebuah Kajian Sosiologi Budaya", terjemahanYudi Santoso.Yogyakarta. Kreasi Wacana, hal. vii-xvii.

Jenkins, Richard (2013). *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta. Kreasi Wacana.

Mutahir, Arizal (2011). *Intelektual Kolektif Pierre Bourdieu; Sebuah Gerakan untuk Melawan Dominasi*.Yogyakarta. Kreasi Wacana.

Martono, Nanang (2012). *Kekerasan Simbolik di Sekolah; Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman (2012). *Teori Sosiologi Moderen Edisi ke-Enam*. Jakarta. Penerbit Kencana.

Ritzer, George (2012). *Teori Sosiologi; Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Wirawan, I.B. (2012). *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma; Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial*. Jakarta. Kecana Prenada Media Group.

TENTANG PENULIS

La Ode Abdul Munafi, lahir di Keraton–Buton pada 8 Desember 1969, adalah staf pengajar pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Dayanu Ikhsanuddin (UNIDAYAN) Baubau. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unidayan (1994), S2 Sosiologi-Antropologi pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran (2001), dan S3 Antropologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (2016).

Karya tulis berupa buku yang dihasilkannya antara lain: (i) *Upacara Siklus Hidup (life Cycle) Manusia dalam Kebudayaan Wolio (Buton) (2003)*; (ii) *Dinamika Tanah Wolio: Sejarah, Kontinuitas, dan Perubahan (2014)*; (iii) *Kebudayaan Buton (2015)*; (iv) *Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Antikorupsi dalam Kearifan Buton (2020)*; (v) *Mengenal Kawasan Cagar Budaya Benteng Wolio: Benteng Keraton Kesultanan Buton (2022)*; (vi) penulis dan editor buku berjudul: *Buton dalam Lintasan Sejarah, Warisan Budaya, dan Perubahan Sosial (2022)*; (vii) tim penulis buku berjudul: *Kearifan Lokal dan Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisirdi Buton* (2023). Sejumlah karya tulisnya juga terpublikasi melalui jurnal ilmiah, nasional maupun internasional, serta *book chapter*. Penulis juga aktif menjadi narasumber bidang kebudayaan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan sejumlah pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penulis dapat dihubungan melalui E-mail: laodeabdulmunafi@gmail.com

BAB 10

TEORI DRAMATURGI ERVING GOFFMAN

Oleh : Wa Ode Rohmiati Mandati

A. Teori

Teori Dramaturgi yang dicetuskan oleh Erving Goffman (Goffman, 2005; 2002; Turner, 2014; Wallace & Wolf, 1995) mendapat banyak ulasan ilmiah dari pakar Sosiologi (Appelrouth & Edles, 2021; Dillon, 2014; Hastuti, Ali, Demmallino, & Rahmadanih, 2018; Johnson D. P., 2008; Stolley, 2005; Sudikin & Suharso, 2015; Sunarto, 2004; Susanto, et al., 2020; Turner, 2013). Teori dramaturgi dibangun atas dasar asumsi (Supardan, 2011) menempatkan pusat perhatian kepada interaksi tatap muka atau dengan kata lain kehadiran antara pihak yang melakukan interaksi secara langsung. Interaksi tatap muka dikenal sebagai individu yang saling memberikan pengaruh satu sama lain di mana masing-masing mempengaruhi tindakannya dengan jarak fisik yang saling berdekatan. Berikut uraian asumsi yang melndasi teori dramaturgi (Widodo, 2010):

1. Pusat dari hubungan interaksi merupakan sentral pengetahuan maupun ilustrasi antar muka,
2. Ketika interaksi terjadi, para pelaku dalam peristiwa yang terjadi menghadirkan arus yang mempengaruhi satu sama lain melalui metode tertentu,
3. Setiap orang menghadirkan perilaku di depan panggung yang diartikan menjadi tindakan personal yang ajeg serta diperlihatkan menjadi rutinitas yang general dan spesial, di mana tindakan di panggung depan mendapat dukungan dari panggung belakang yang ada,

4. Aksi yang diperlihatkan di panggung depan terlembaga, terbatas pada peran yang telah direncanakan dengan sebaik-baiknya,
5. Adanya tindakan dalam mendramatisasi serta idealisasi atas pelakon pada panggung depan,
6. Tingkah laku menjadi satu kesatuan atas peran yang memiliki hubungan dengan orang lain. Sementara pelakon saling membangun hubungan lalu membuat sebuah kelompok individu yang saling bergotong royong melalui rutinitas lakon,

Teori dramaturgi sangat dipengaruhi oleh Cooley (Ritzer, Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern, 2012) yang berisi tiga aspek yakni mengembangkan bagaimana untuk melakoni sebagai orang lain, selanjutnya membayangkan seperti apa penilaian orang lain atas lakon yang ditampilkan, dan terakhir memperlihatkan perasaan atas diri meliputi bangga, malu, dan lainnya yang merupakan interpretasi orang lain.

Goffman melihat kehidupan sosial, interaksi sosial yang terbangun layaknya lakon di atas panggung teater yang dimainkan oleh para pemeran (Mulyana, 2010). Atas suguhan lakon kemudian pemirsa mendapatkan ilustrasi atas kehidupan pelakon serta menelusuri plot yang diberikan atas drama yang dipentaskan (Macionis, 2006), yang mana dalam mendahului sebuah pementasan diberikan perhatian kepada penentuan lokus (Goffman, 2002) sebagai kawasan yang dilingkupi oleh persepsi yang tercipta. Panggung yang menjadi pusat pertunjukan menempati tahap yang riskan dan vital di mana keberhasilan sebuah dramaturgi dihasilkan salah satunya karena lokasi yang dikreasikan menciptakan momen dan suasana di dalam pentas teatrikal (Medlin, 2008).

Di dalam teori Dramaturgi terdapat tiga hal yang vital, antara lain:

1. Pemeran dan penonton, pertunjukan dramaturgi yang dilakoni oleh orang yang menjalaninya memerlukan

penghayatan dan peresapan peran sehingga mampu melakoni dengan baik. Ia pula perlu menyesuaikan diri dengan pelakon di atas pentas, bila kondisi tersebut berlangsung sukses maka mendatangkan respon yang diharapkan dari pemirsa.

2. Ekspresi dan impresi, suatu keterangan yang disampaikan para pelakon di mana keterangan itu diberikan di atas panggung guna dimengerti oleh pemirsa guna menciptakan kesan dikenal dengan impresi. Berlangsungya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pengaruh atas kesan sehingga hasilnya sejalan dengan yang diharapkan atas kendali kesan. Kesan atas penampilan melalui pakaian kostum, perkakas yang digunakan saat pementasan, lantunan intonasi suara, gaya dan gestur tubuh (Macionis, 2006) yang kesemuanya dikolaborasi demi menghadirkan nilai.
3. *Setting* atau panggung, Goffman sendiri membagi panggung atas tiga model berupa panggung depan, panggung belakang, serta di luar panggung (Ritzer, Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern, 2012; Macionis, 2006; Rinawati, 2006).
    a. Panggung depan, mengarah kepada kejadian yang menempatkan seorang pelakon memperlihatkan peran yang dimilikinya secara totalitas seperti ia menjalankannya di atas pentas (Rinawati, 2006), aspek yang tampilkan dan tidak disamarkan oleh pelakon ialah *personal front*, yang mengarah pada kemampuan dalam memperlihatkan ekspresi sehingga menciptakan kesan kepada pemirsa dalam mengidentifikasinya memerankan lakon tertentu melalui kostum dan berbagai atribut (Ritzer, Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern, 2012), serta bahasa (Rinawati, 2006). Hal ini juga mengarah atas penampilan berupa keharusan dan pencapaian tertinggi diri, perilaku atau pembawaan yang diperlihatkan pelakon kepada pemirsa yang dapat terlihat melalui tata keramahan,

sopan santun, dan etiket lainnya (Mulyana, 2010). Adapun fase ini terbagi atas penampakan berupa aspek yang bernarasi atas kedudukan sosial pelakon dan tindakan yang diperlihatkan, serta lakon yang dipertunjukan dalam sebuah pementasan (Ritzer, Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern, 2012). Aspek lainnya berupa kelengkapan material ataupun situasi panggung yang wajib diciptakan kepada pelakon dalam menjalankan drama (Widodo, 2010), ketiadaan pelakon maka dramaturgi tidak akan dapat terlaksana (Ritzer, Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern, 2012). Aspek selanjutnya yang tidak kalah pentingnya ialah pelakon seringkali berjuang mengirimkan kesan bila ia memiliki kedekatan yang unik kepada para pemirsa disbanding spasi dalam dunia nyata. Di dalam realitasnya orang menjadi kurang menujukan minat terhadap lakon itu sementara ia menjalaninya dengan nyaman, kondisi demikian tidak dimaksudkan demi menghilangkan perannya dalam masyarakat namun memberi kelebihan seperti identitas maupun perasaan yang dimaknai secara sosial. Goffman sendiri memberikan perhatian kepada individu serta kelompok yang menjadi bagian di dalam pementasan dramaturgi (Widodo, 2010).

b. Panggung belakang, merupakan daerah yang tidak menampilkan hal-hal yang ditampilkan di panggung depan di mana dipertunjukan dengan terbuka (Medlin, 2008). Panggung belakang merupakan lokasi pelakon dalam beristrahat, mempersiapkan diri, berlatih kecil demi menghadapi sesi yang akan dijalaninya di panggung depan. Panggung belakang bersisian dengan panggung depan (Ritzer, Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern, 2012) yang tidak terlihat oleh penglihatan kebanyakan orang demi menyimpan rahasia drama pementasan (Rinawati, 2006).

c. Di luar panggung, merupakan kawasan yang menempatkan seorang pelakon secara seutuhnya menjalani kehidupan sebagai dirinya. Ruang ini sangat pribadi yang tidak akan diperlihatkan di panggung depan maupun panggung belakang, di mana bila dipertunjukan dapat mengakibatkan degradasi kesan yang telah dibangun.

Pendekatan dramaturgi yang diklaim vital ialah para pelakon memiliki kehendak untuk menampilkan diri dalam kondisi yang diharapkan, sehingga pelakon seringkali harus menyimpan sebagian dari dirinya yang asli versi belakang panggung ketika menghadapi pemirsa di atas panggung (Ritzer, Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern, 2012; Mulyana, 2010), di mana pelakon memiliki orientasi menyimpan pengalaman positifnya pada masa sebelumnya yang tidak bersesuaian dengan apa yang ia tampilkan di atas panggung, menyimpan hal yang dianggap tidak benar sesaat saat sesi lakon drama, mengkamuflasekan proses kerja lakon dan berorientasi menampilkan akhir yang diinginkan, menutupi hal-hal yang tidak ingin diperlihatkan ketika usaha menghadirkan tujuan dramaturgi, dan sengaja melepaskan standar tidak diterapkan sebagaimana seharusnya.

Proposisi teori dramaturgi (Widodo, 2010) terdiri atas:

1. Segala interaksi yang diperlihatkan pada panggung depan memiliki kesamaan dengan pentas panggung teater. Pelakon yang hadir di depan pentas maupun di kehidupan selayaknya manusia normal memiliki kesamaan yakni menjadi pusat perhatian utamanya karena pengenaan pakaian serta atribut yang telah oleh masyarakat luas telah mafhum atas penggunaannya.
2. Kegiatan pementasan hingga kehidupan sehari-hari memiliki panggung belakang sebagai tempat yang memberi peluang kepada pelakon dalam menyiapkan segala sesuatu sehingga maksimal pada pementasan dramatikal selanjutnya. Pelakon dapat memainkan peran yang ia inginkan baik dirinya

sendiri maupun peran oran lain, baik di depan maupun di belakang panggung.

3. Mengulas pementasan, pelakon mampu menghadirkan sebuah pertunjukan bagi orang lain namun demikian kesan terhadap pelakon dapat bervariasi.
4. Terdapat panggung belakang dan panggung depan, di mana panggung depan yang mempertunjukan seseorang dengan keteraturan yang disepakati guna memperlihatkan fungsinya secara genera, dengan memberikan pemahaman akan situasi dengan melihat penampilan yang dihadirkan, ikut serta dalam penampilan tersebut berupa latar serta kepribadian pelakon di depan panggung yang terbagi antara pertunjukan atau *impression* serta gaya atau *manner*.

B. Deskripsi Sosok

Erving Goffman lahir pada 11 Juni 1922 (Susanto, et al., 2020; Sudikin & Suharso, 2015; Hastuti, Ali, Demmallino, & Rahmadanih, 2018), di daerah Mannville pada wilayah Alberta di Kanada. Goffman sendiri merupakan keturunan Yahudi Ukraina yang bermigrasi ke Kanada di penghujung abad ke-18. Goffman memiliki seorang kakak yang berprofesi sebagai aktris, ia bernama Frances Bay. Keluarga Goffman tinggal di Dauphin-Manitoba, di mana ayah Goffman membuka usaha sebagai tukang jahit. Goffman mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi Teknik St John – Winnipeg tahun 1937, lalu ia mendaftar sebagai mahasiswa jurusan kimia pada tahun 1939 di Universitas Manitoba.

Goffman kemudian pindah ke Ottawa dan melakukan pekerjaan dalam dunia film tepatnya pada Dewan Film Nasional Negara Kanada. Goffman membuat perkembangan terhadap minatnya pada sosiologi dan semakin meningkat ketika berinteraksi dengan sosiolog Amerika Utara yang bernama Dennis. Intensitas tersebut mengarahkannya pindah studi dari kampus di Manittoba ke University of Toronto Kanada sebagai bimbingan dari CWM Hart serta Ray Birdwhistell hingga ia meluluskan studinya pada 1945 pada gelar BA dalam ilmu

Sosiologi serta Antropologi. Minatnya tidak surut tetapi semakin deras hingga mengantarnya sampai pada University of Chicago di mana membuatnya mendapatkan gelar MA pada tahun 1949 dan gelar Ph.D pada tahun 1953 dalam ilmu Sosiologi. Merampungkan karya doktornya dilakukan di pulau Unst di Kepulauan Shetland guna mengkoleksi data etnografi dengan rentang antara Desember 1949 hingga Mei 1951.

Pernikahan Goffman dilangsungkan bersama Angelica Choate di tahun 1953 hingga memperoleh anak yang bernama Thomas. Rumah tangga Goffman berakhir 11 tahun kemudian karena Angelica meninggal dunia karena menderita sakit mental dan memutuskan bunuh diri di tahun 1964. Goffman memiliki minat eksentrik di pasar saham, judi, ia bahkan berposisi sebagai bos pit pada sebuah kasino di Las Vegas.

Selepas meninggalnya Angelica Choate, Goffman menikah dengan Gillian Sankoff di tahun 1981 dan mendapat anugrah seorang putri yang bernama Akice. Goffman menutup usia di Philadelphia Pennsylvania pada 19 November 1982 dengan menanggung sakit kanker di lambungnya. Teori dramaturgi yang dipopulerkannya menguraikan interaksi sosial yang dimaknai melalui pertunjukan teatrikal oleh para pelakonnya di atas panggung, ketika manusia menyajikan karakter personalnya dengan tujuan terhadap orang lain dengan mempertunjukan drama yang dilakoninya, di mana identitas yang memainkan karakter di atas panggung dapat saja berubah dengan dipengaruhi oleh hasil interaksi yang terbangun dengan pihak lain, di mana identitas pelakonnya mendapat asumsi labih sebagai hasil dari penilaian.

C. Konteks Sosial

Tahun 1958 Goffman memperoleh gelar Profesor (Sudikin & Suharso, 2015), lalu tahun 1970 diangkat sebagai *Committee for Study of Incarceration.* Tahun 1977 ia mendapat penghargaan Guggenheim. Goffman wafat tahun 1982 diawali oleh kondisi sakit, paska menduduki posisi Presiden atas Asosiasi Sosiologi Amerika sejak tahun 1981 sampai tahun 1982. Ia merupakan

sosiolog yang konsen berada dalam arus interaksionisme simbolik. Goffman mengawali karir di Barkeley hingga ke Pennsylvania University, secara intelektual ia berminat kepada peningkatan kerangka secara teoritik dalam membuat analisa atas interaksi sosial dengan berpedoman atas hasil-hasil kajian pada jalannya interaksi yang terbangun dalam kehidupan sosial. Goffman sangaf mudah diketahui dari teori dramaturgi yang diungkapkannya sebagai jerih payahnya atas gagasan interasi sosial. Gagasan ini muncul sebagai penerapan terhadap pemikiran individualistis yang terkemuka merespon berbagai kejadian atas evolusi sosial pada masyarakat masa dengan kondisi terkini.

Teori dramaturgi menjadi penggalian terhadap gagasan interaksi sosial yang menjadi imbas dari berbagai kejadian yang tersaji di akhir abad ke-19 di Amerika. Ketika itu kaum intelektual Amerika memberikan respon dari tingginya konflik, imbas industrialisasi dan kondisi birokrasi tertentu. Ia merupakan salah satu sosiolog yang pemikirannya banyak digunakan dalam berbagai studi ilmu sosial, di mana hal tersebut terjadi ketika ia menjadi guru besar di University of California hingga didapuk sebagai salah satu cendekiawan terkemuka di sana. Goffman memberikan catatan sosiologis terhadap individu menjadi sebuah analisis dalam lingkup tertentu terhadap interaksi secara bertatap muka ((Sudikin & Suharso, 2015).

Goffman (2015) memiliki hasil intelektual yang tidak kalah terkenalnya dari bukunya yang berjudul *Presentation of Self in Everyday Life*, antara lain:

1. Karya yang berjudul *Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates* (1961) yang berisi tentang pengamatan yang dilakukannya pada sebuah RSJ di Washington dalam kurun waktu 4 tahun, di mana ia melakukan studi atas kehidupan sosial dari mereka yang tinggal dan berinteraksi di sana.

2. Karya yang berjudul *Ecounters: Two studies in the Sociology of interaction* (1972), di mana Goffman melakukan studi lanjutan atas interaksi antar individu di mana mengemukakan *ecounters* sebagai pembelajaran dalam melakukan kendali atas kesan pada grup yang memiliki masa waktu yang singkat. Di sini Goffman tetap konsisten dengan dramaturgi melalui individu dengan keahlian dalam menjalankan lakon yang disepakati serta sebagai respon atas masalah-masalah yang muncul pada aspek struktural.
3. Karya yang berjudul *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity* (1986), di mana dalamnya memaparkan tentang konsep diri yang memiliki masalah seperti stigma yang merujuk kepada individu dengan kondisi fisik tidak sempurna, dengan kondisi tersebut menempatkannya dalam situasi yang sulit untuk diterima secara sosial, ataupun kaum yang tidak memiliki akses terhadap penglihatan matanya, di mana kalangan tersebut sebagai entitas sosial yang ditempatkan dalam posisi rendah.

D. Jenis Realita Sosial

Teori Dramaturgi menerawang konstruksi realitas hadir atas pengaturan serta imbas yang dihasilkan dari kontak dan komunikasi sosial. Dramaturgi layaknya pelakonan, di mana pelakon hadir melakukan peran di atas panggung, kontak dan komunikasi yang terjalin disengaja memainkan aksi yang telah direncanakan secara matang. Apabila jalannya teatrikal di luar scenario maka demi tetap terlaksananya pertunjukan peran biasanya dijalankan property tertentu demi penyelamatan. Pada teori Dramaturgi (Goffman, 2005), memandang seseorang sebagai actor yang berupaya menyatukan diri pribadi dan misi kepada orang lainnya. Teori ini menjelaskan orang sebagai individu dan merupakan bagian dari entitas sosial. Selain itu pula menempatkan manusia sebagai makhluk yang sangat berbeda dengan makhluk kebanyakan karena memiliki kemampuan dan akal, belajar, menafsirkan makna dan tanda, serta melakukan aksi hingga membangun komunikasi.

Dalam pandangan dramaturgi (Sudikin & Suharso, 2015), kehidupan manusia bagaikan teater, komunikasi dan kontak yang terjalin layaknya drama yang memainkan tugas memerankan sosok tertentu. Di kehidupan teater, pelakon menjalankan peran menggunakan bahasa non verbal juga bahasa verbal, tidak lupa dilengkapi dengan properti yang kental dengan identitas pertunjukan. Adapun kehidupan dramaturgi selain hadir dalam panggung depan di mana pelakon menjalankan aksinya dengan peran yang sudah direncanakan, juga eksis di panggung belakang sebagai tempat persiapan memainkan peran selanjutnya yang akan dipertunjukan di panggung depan.

Acuan pelakonan dramaturgi Goffman (Goffman, 1972; 2005) dimaksudkan guna memberi makna yang tentu saja terkesan baik demi mencapai misi. Demi mencapai apa yang telah direncanakan sehingga dibutuhkan adanya penyampaian informasi dan ketercapaian tujuan penyampaian informasi. Interaksi secara umum yang dilakukan oleh manusia meliputi memfungsikan indera yang dimiliki dalam aspek non verbal maupun verbal, demi menggapai misi akhir sehingga lawan komunikasi dapat memahami hingga mengikuti informasi yang disampaikan. Keadaan demikian membuat dramaturgi menempatkan konsep secara komprehensif seperti bagaimana cara memahami lakon yang diperlihatkan dan kemudian mampu menghadirkan umpan balik seirama dengan yang diinginkan oleh penampil peran.

E. Lingkup Realitas Sosial

Lingkup realitas sosial yang dipahami dalam mempelajari dramaturgi ialah berada dalam lingkungan skala kecil, di mana oleh pencetus teori itu sendiri Goffman menyebutkan sebagai pembentukan sosial (Sudikin & Suharso, 2015) yang menjadi sebuah sistem yang tidak menerima perubahan dengan mempertimbangkan teatrikal yang dipertunjukan saat tersebut, mengenyampingkan makna vital yang dijalankan oleh lembaga.

Goffman (Goffman, 1972; 2005) menguraikan bahwa seorang pelakon menempatkan aksi, keadaan yang sebenarnya, juga niat yang tidak sesuai dengan kesan yang ingin dibentuk pada diri pribadi serta hasil kerja yang sesuai harapan maupun hasil yang benar-benar diimpikan oleh kebanyakan orang. Penampakan lakon yang baru merupakan hal urgen bila dibandingkan dengan performa yang diperlihatkan secara berkala. Dramaturgi memberikan ruang pembahasan tentang hubungan antar manusia dengan adanya perjanjian atas tingkah laku yang telah dimafhumkan satu sama lainnya, di mana dapat membawa kepada pencapaian impian atas apa yang disepakati dari hubungan yang terjalin. Melakoni peran juga berfungsi sebagai instrument yang berpedoman kepada penccapaian kesepahaman.

F. Pemikiran dan Teori yang Mempengaruhinya

Kalangan sosiolog berkeyakinan bahwa Dramaturgi yang dikemukakan oleh Goffman menempati wilayah abu-abu yakni di antara fenomenologi dengan interasi simbolik. Hal demikian sebagaimana diungkapkan oleh Collins (Sudikin & Suharso, 2015) bahwa antopologi sosial memberikan pengaruh besar atas perspektif Goffman bila dibandingkan ranah interasionisme simbolik yang menempatkan dramaturgi ke dalam kawasannya. Pendidikan yang dijalani Goffman di Toronto telah memberikan kesempatan kepadanya dalam bersinggungan pengetahuan dari antropolog di sana, lebih-lebih ketika berada di Chicago menjadi saat yang lebih menentukan yakni saat berinteraksi dengan W.L. Wamer seorang antropolog. Sebagaimana usaha Collins (Sudikin & Suharso, 2015) dalam menelusuri pengutipan di dalam karya-karya Goffman memperlihatkan tulisan karya intelektual Goffman memiliki warna antropologi sosial serta memberikan porsi yang lebih sedikit terhadap interasionisme simbolik yang bahkan hanya untuk sekedar meluapkan rasa tidak puasnya melalui kritik.

Dengan keberadaan dramaturgi di antara fenomenologi dan interasionisme simbolik (Sudikin & Suharso, 2015), di mana pengertian terhadap interasi sosial yang disampaikan oleh Blumer (Ritzer, Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern, 2012) bahwa interaksi berkitar tentang usaha dalam menafsirkan arti yang terjadi pada individu serta grup. Selain itu pula masyarakat ditempatkan pada konsep satu sistem atas pemberian makna kepada pesan.

Kaum intelektual dari interasionisme simbolik (Sudikin & Suharso, 2015) menyatakan bahwa:

1. Manusia memiliki persamaan yang sangat sedikit bila dibandingkan dengan hewan, sementara manusia didukung oleh akal,
2. Akal dalam mencerna terbentuk sebagai hasil dari interaksi di kehidupan sosial,
3. Kegiatan interasi sosial yang berlangsung memungkinkan seseorang mendapatkan pengetahuan terhadap arti serta tanda-tanda khusus di mana dapat dipahami melalui akal pikirannya,
4. Arti dan tanda memberi peluang kepada seseorang untuk melakukan aksi serta berkomunikasi dengan gaya komunikasi manusia pada umumnya.

Bilia diperhatikan dari alirannya maka diketahui bila interasionisme simbolik menjadi sumber inspirasi atas terbaginya teori Dramaturgi Goffman (Goffman, 2005) menjadi dua perspektif (Sudikin & Suharso, 2015) yakni aliran Chicago School yang dikomandoi oleh Blumer sebagai pelanjut Mead. Perspektif selanjutnya yakni Iowa School yang diusung oleh Kuhn dan Couch (Kuhn & Couch, 1995), yang mana meyakini konseptualisasi interasi mampu dijalankan. Meskipun demikian Kuhn juga menerima hadirnya proses pada perilaku manusia dengan memberikan persetujuan terhadap perspektif structural secara objektif dan mengkategorikan metode non adekuat yang digunakan Blumer.

Interaksionisme simbolik memiliki kandungan vital dari pemikiran general atas interaksi dan masyarakat. Mans & Meltzer (Manis & Meltzer, 1967) menseparasi tujuh aspek fundamental yang berkarakter teoritik serta yang berwarna metodologi atas interasionisme simbolik, yakni:

1. Orang memahami pelbagai pengetahuan sebagai hasil dari belajar atas pengalaman, kesan seseorang memiliki kecenderungan untuk dikonversi menjadi tanda,
2. Bermacam makna diselidiki dengan berlandas pada kontak dan komunikasi yang ada pada orang-orang yang saling berhubungan. Makna tercipta dengan pertukaran tanda di dalam grup sosial,
3. Keseluruhan struktur serta organisasi sosial dibuat sebagai hasil kontak dan komunikasi yang terjalin di antara orang-orang yang terlibat.
4. Perilaku manusia menjadi tidak selalu ditentukan melalui peristiwa di masa lalu, juga terjadi melalui perencanaan.
5. Ide yang merupakan gabungan antara dialog dalam diri sebagai cerminan komunikasi yang terjalin di antara satu individu kepada individu lainnya,
6. Perilaku terbangun melalui interaksi di dalam grup sosial.

Di antara beberapa teoretisi interasionisme simbolik, tercatat usaha saintis yang dikerjakan oleh Mead (Mead, 1972) dalam kurun waktu 1920 hingga 1930 dan kemudian dilanjutkan oleh Blumer (Blumer, 1986) pada tahun 1937 di mana ia menjadi mahasiswa Mead, yang memakai penyebutan interaksi simbolis. Inti dari interaksi simbolis ialah sebuah kegiatan dengan personifikasi lekat terhadap manusia berupa interaksi ataupun kegiatan saling memberi tanda yang kemudian ditafsirkan. Goffman (2002) dalam mendedikasikan dramaturgi adalah melalui penggunaan berbagai perspektif seperti interaksi simbolis, formalism Simmel, analisis semiotika, fenomenologi Schutz, juga fungsionalisme Durkheim. Pusat dari pandangan Goffman ialah diri dengan penjelasan yang istimewa dan menawan yakni teori tentang diri versi Goffman. Perspektif

Goffman mendapat sentuhan yang besar dari studi deskriprif yang diproduksi selama di Chicago di mana menghasilkan studi interaksi dengan studi antropologi sosial sehingga menghadirkan perspektif yang benar-benar baru.

Melalui drama, Goffman (Goffman, 2002) memberi perhatian tentang teknik masyarakat menempatkan secara paksa seseorang untuk menghadirkan kesan yang telah disepakati tentang diri di mana masyarakat menghadirkan ketentuan yang secara tegas mengharuskan semua anggotanya mengikuti, termasuk tuntutan atas lakon yang tidak sederhana sehingga menjadikan orang yang ikut di dalamnya enggan untuk lugas, tidak memprioritaskan kepatuhan, serta kurang dalam penghargaan. Karya Goffman sangatlah berwarna Mead (Goffman, 2002; 2005) yang mana sama-sama memiliki terminologi pembahasan serta menaruh minat terhadap studi tentang diri, yang mana ketika Goffman menempatkan hal tersebut, oleh Mead menampilkan I dan me sebagai sesuatu yang tidak sejalan di antara diri sebagai manusia serta diri yang terbentuk dari proses sosialisasi di dalam lingkungan masyarakat. Hadirnya keragaman sikap antara diri pribadi dengan yang ditunjukan oleh orang lain sebagaimana yang dikemukakan oleh Goffman (2002). Keterhubungan antara konsep the Self dari Mead (Mead, 1972) kemudian Goffman (2005; 1972) menghadirkan teori peran yang bertindak layaknya penopang dari pandangannya atas dramaturgi. Goffman memberi perumpamaan pada kehidupan manusia di atas panggung drama yang dipentaskan, dilengkapi dengan pengaturan teatrikal, sandiwara yang diperankan oleh aktris menjalani adegan yang telah ditentukan (Santoro & dkk, 2012).

Pemikiran Cooley (Cooley, 2010) memberikan pengaruh signifikan kepada Goffman atas Dramaturginya melalui Teori *The Looking Glass Self*. Teori Cooley sendiri terdiri atas proposisi menempatkan pengembangan diri untuk tampil kepada orang lain, menempatkan bayangan diri untuk mendapat penilaian dari orang lain, menempatkan pengembangan yang sama atas perasaan diri misalnya rasa malu, bangga yang menjadi dampak

dari terkaan atas penilaian yang diberikan orang lain terhadap diri kita. Menurut Cooley (Cooley, 2010) sikap yang dipertunjukan orang lain merupakan cermin sikap diri kita sendiri, yang mana memiliki kegunaan dalam memberi penilaian terhadap lingkungan sosial dengan segala objek yang ada di dalamnya. Selain oleh Mead (Mead, 1972) dan Cooley (Cooley, 2010), Goffman menerima pengaruh dari Blumer (Blumer, 1986) tentang konsep gambaran diri yang dihasilkan dari sebuah proses, di mana diri bukanlah termasuk ke dalam kategori benda, yang mendukung manusia lebih dari sekedar menghasilkan tanggapan dari reaksi yang berasal dari luar diri manusia.

G. Penutup

Perjalanan manusia berinteraksi dengan sesamanya di kehidupan masyarakat selalu melibatkan peran, entah bersifat baik, jahat, tersakiti, figuran, dan lainnya semuanya terlihat nyata bagai melakonkan pementasan di atas panggung. Masyarakat dengan model demikian dengan gamblang dianalisa oleh Goffman melalui teori Dramaturginya yang masuk dalam kawasan teori interaksi sosial dengan mengedepankan interaksi antar muka. Di dalam dramaturgi, seorang pelakon dapat berada pada panggung depan, panggung belakang, maupun areal di luar panggung. Peran yang dijalankan oleh pelakon di atas panggung depan, panggung belakang, maupun di luar panggung akan sangat-sangat berbeda satu sama lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Appelrouth, S., & Edles, L. D. (2021). *Classical and Contemporary Sociological Theory 4th Edition.* California (US): SAGE Publication, Inc.

Blumer, H. (1986). *Symbolic Interactionism: Perspective and Method.* California (US): University of California Press.

Cooley, C. H. (2010). *Human Nature and the Social Order.* Charleston (US): Nabu Press.

Dillon, M. (2014). *Introduction to Sociological Theory, Theorists, Concepts, and Their Applicability to the Twenty - First Century.* Pondicherry (IN): Wiley Blackwell.

Goffman, E. (1961). *Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates.* New York (US): Anchor Books.

Goffman, E. (1972). *Ecounters: Two studies in the Sociology of interaction.* City of Westminster - London (UK): Penguin University Books.

Goffman, E. (1986). *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity.* New York (US): Touchstone.

Goffman, E. (2002). The Presentation of Self in Everyday Life. In C. Cahhoun, J. Gerteis, J. Moody, S. Pfaff, & I. Virk, *Contemporary Sociological Theory* (S. 51-65). Oxford (UK): Blackwell Publisher Ltd.

Goffman, E. (2005). Introduction to The Presentation of Self in Everyday Life. In S. P. Hier, *Contemporary Sociological Thought Themes and Theories* (S. 101-110). Toronto Ontario (CA): Canadian Scholars' Press Inc.

Hastuti, D. R., Ali, M. S., Demmallino, E. B., & Rahmadanih. (2018). *Ringkasan Kumpulan Mazhab Teori Sosial (Biografi, Sejarah, Teori, dan Kritikan).* Makassar (ID): CV. Nur Lina.

Johnson, D. P. (2008). *Contemporary Sociological Theory, An Integrated Multi-Level Approach.* New York (US): Springer.

Kuhn, M., & Couch, C. (1995). *Symbolic Interaction; an Introduction to Social Psychology.* New York (ID): General Hall, Inc.

Macionis, J. (2006). *Society The Basic.* New Jersey (US): Upper Saddle River.

Manis, J., & Meltzer, B. (1967). *Book Reviews, Symbolic Interaction: A Reader. In Social Psychologi.* Boston (US): Allyn and Bacon.

Mead, G. H. (1972). *Mind, Self, and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist* . Chicago (US): University of Chicago Press.

Medlin, A. (2008). *Bargain Theater: A Dramaturgical Analysis of a Flea Market [Thesis].* Auburn (US): Auburn University.

Mulyana, D. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paraidgma Baru Penelitian Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya.* Bandung (ID): Remaja Rosdakarya.

Rinawati, R. (2006). Dramaturgi Poligami. *Mediator*, 7 (1): 147 – 161.

Ritzer, G. (2012). *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern.* Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar.

Santoro, E., & dkk. (2012). *Teori Komunikasi.* Yogyakarta (ID): Graha Ilmu.

Stolley, K. S. (2005). *The Basics of Sociology.* West, Connecticut (UK): Greenwood Press.

Sudikin, & Suharso, P. (2015). *Pemikiran Sosiologi Kontemporer.* Jember (ID): UPT Penerbit UNEJ.

Sunarto, K. (2004). *Pengantar Sosiologi.* Jakarta (ID): Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Supardan, D. (2011). *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural.* Jakarta (ID): Bumi Aksara.

Susanto, A., Wahyuni, Mirawati, Muharram, B., Asdar, Taufiq, M., . . . dk. (2020). *Biografi Tokoh-Tokoh Sosiologi Klasik Sampai Potmodern.* Pare-Pare (ID): IAIN Parepare Nusantara Press.

Turner, J. H. (2013). *Contemporary Sociological Theory.* California (US): SAGE Publications, Inc.

Turner, J. H. (2014). *Theoretical Sociology A Concise Introduction to Twelve Sociological Theories.* California (IS): SAGE Publication, Inc.

Wallace, R. A., & Wolf, A. (1995). *Contemporary Sociological Theory, Continuing the Classical Tradition.* New Jersey (UK): Prentice Hall Englewood Cliffs.

Widodo, S. (2010). *Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial.* Malang (ID): Aditya Media Publishing.

TENTANG PENULIS

Wa Ode Rohmiati Mandati. Lahir di Bau-Bau, 09 September 1967. Merupakan Staf Pengajar Pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Dayanu Ikhsanuddin. Meluluskan pendidikan Magister pada Program Studi Sosiologi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2011.